



RKPD

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

TAHUN 2026

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 21 TAHUN 2025

TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2026



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Bupati dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRP dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
13. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong.
15. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
16. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2026.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yakni dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

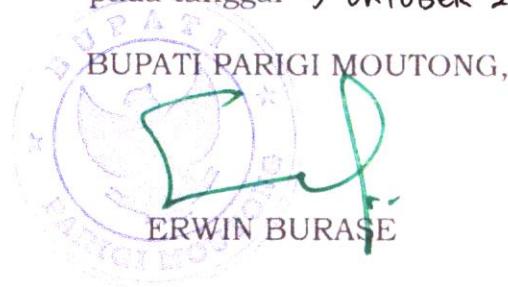
Pasal 5

RKPD dapat diubah dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan strategi ditingkat nasional dan/atau ditingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu mengubah RPJMD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 9 OKTOBER 2025



Diundangkan di Parigi
pada tanggal



Lampiran Peraturan Bupati Parigi Moutong
Nomor : 21 Tahun 2025
Tanggal : 9 Oktober 2025
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 merupakan RKPD tahun ke 2 (dua) dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029 dalam pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Parigi Moutong yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029, selain berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029, penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 147 menyebutkan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2045 di Tahun pelaksanaan 2026 pada periode berkenaan yaitu periode pertama, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.;
3. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, DPRD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 memberikan masukan dan saran berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian

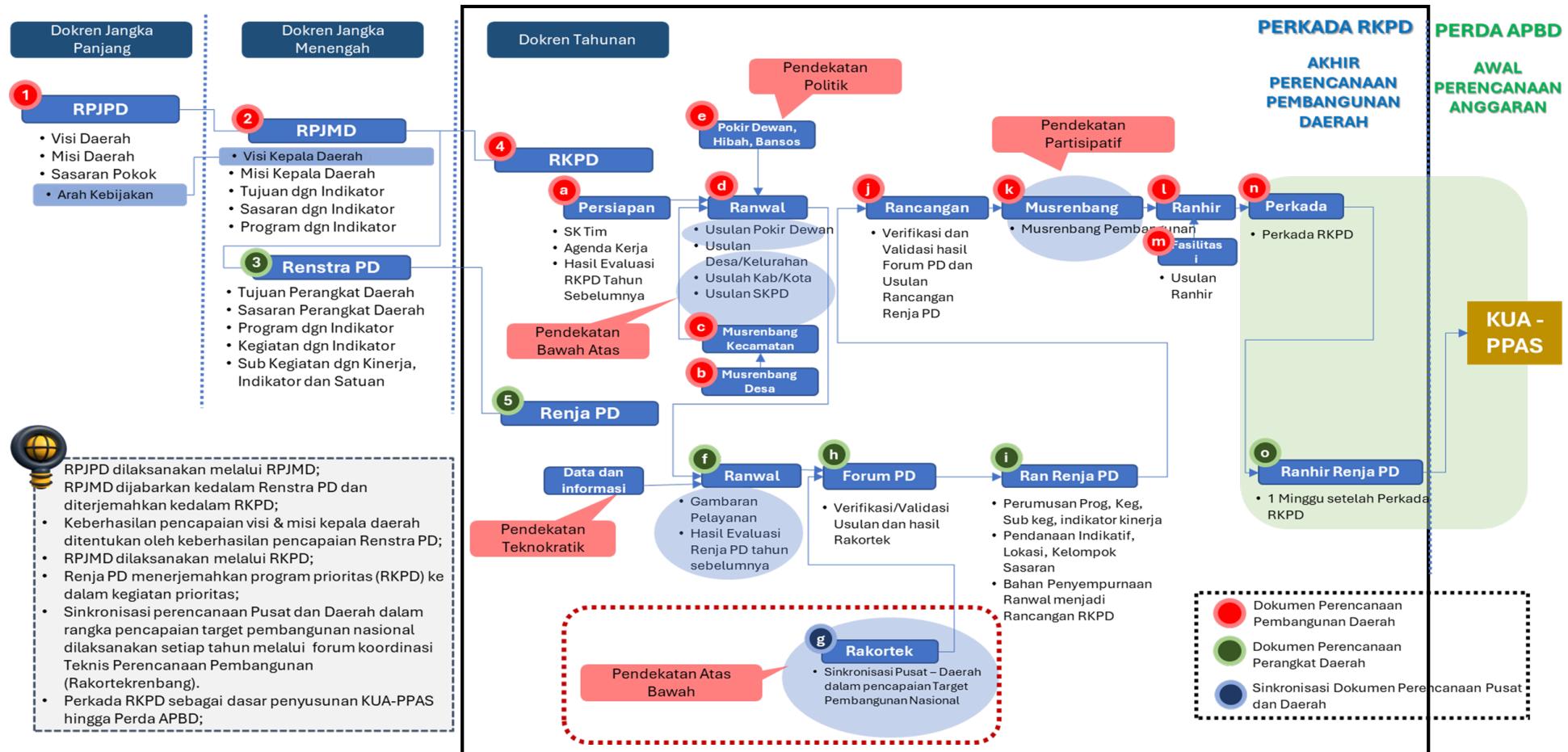
sasaran pembangunan yang telah direncanakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029.

Dokumen RKPD Tahun 2026 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Adapun alur penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1

Proses Bisnis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari Proses Bisnis Penyusunan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 (gambar 1.1) dilaksanakan dengan pendekatan:

1. Top-down, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
2. Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang mengakomodir usulan/kebutuhan masyarakat yang telah disepakati bersama melalui pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan
3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui penelaahan terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang sudah dipadu sesuaikan dengan usulan kegiatan yang bersifat bottom-up, top-down, partisipatif dan politis melalui Forum Perangkat Daerah
4. Politis, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pemenuhan pemenuhan janji politis aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang teridentifikasi berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan
5. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 merupakan dokumen yang diacu dan ditaati dalam penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

Program/kegiatan yang tidak ada dalam RKPD dan KUA/PPAS akan sangat sulit untuk diakomodir dalam APBD Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan kondisi tersebut penyusunan RKPD tahun 2026 ini merupakan suatu hal yang harus dicermati, ditelaah, dan dibahas secara seksama agar dalam pelaksanaannya menjadi benar- benar baik dan

mengakomodir semua kebutuhan yang riil, rasional, dan secara nyata berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6412);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6905)

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
13. Peraturan presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

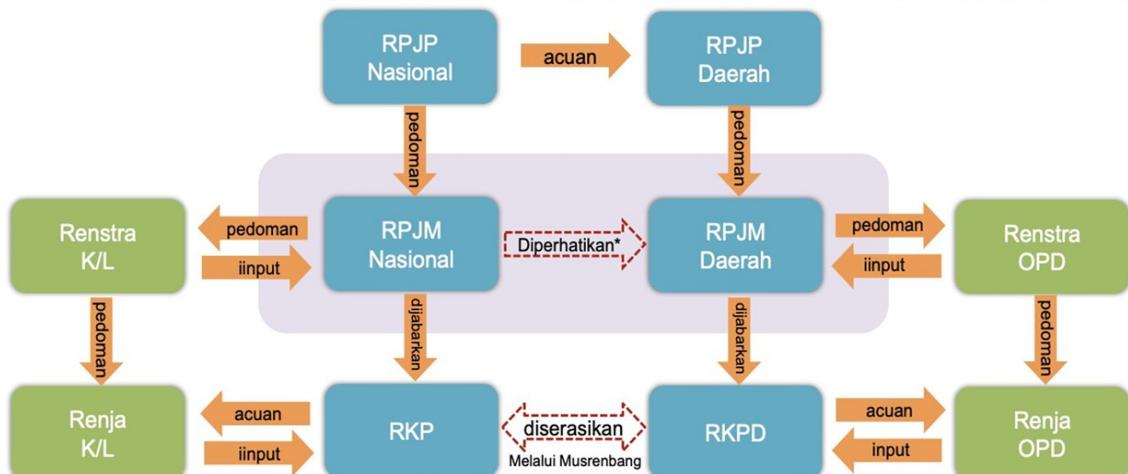
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor 3)

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam dokumen RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yaitu

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2045, serta
4. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026
4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong (RPJMD) Tahun 2025-2029,

Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut terutama yang menyangkut pada tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan. Sehingga keberadaan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong khususnya bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dalam hal kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka RKPD Kabupaten Parigi Moutong akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2026 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 antara DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan Bupati Parigi Moutong yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;

1.5. SISTIMATIKA DOKUMEN RKPD

Proses penyusunan RKPD didahului dengan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD yang tetap mengacu pada dokumen RPJPD dan RPJMD, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, diselenggarakan melalui proses kegiatan yang konsultatif dengan Perangkat Daerah serta seluruh stakeholder melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang tingkat

desa/kelurahan, kecamatan, Forum PD). RKPD disempurnakan melalui masukan-masukan dari hasil forum musyawarah Perangkat Daerah dan Para Delegasi Masyarakat serta di kaji lebih lanjut oleh Tim Penyusun RKPD yang selanjutnya dirumuskan kembali menjadi RKPD Final yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2024
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

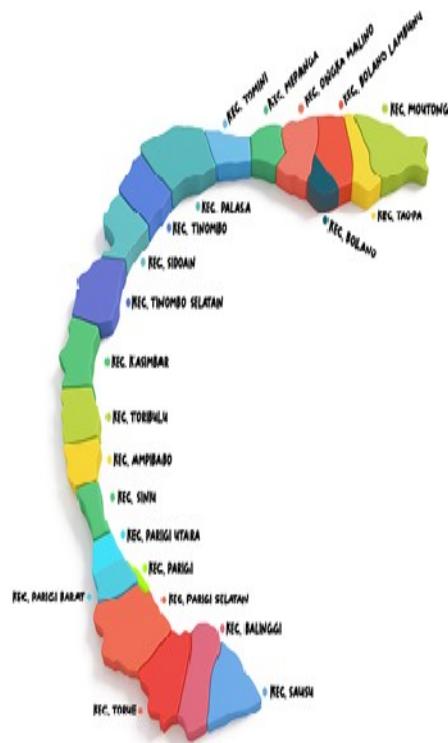
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografi

A. Letak Wilayah

Letak strategis Kabupaten Parigi Moutong terletak di pesisir Timur Pulau Sulawesi yang membentang sepanjang Teluk Tomini yang secara geografis terletak pada posisi $119^{\circ}45'$ - $121^{\circ}06'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}14'$ Lintang Selatan serta $4^{\circ}40'$ Lintang Utara. Wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang jaraknya relatif dekat dengan Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Parigi Moutong memiliki luas 5,877,47 km². Peta wilayah administrasi Kabupaten Parigi Moutong dapat diliat pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi dan Jarak Ibukota
Kecamatan ke Ibukota Kabupaten

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Parigi Moutong dapat ditempuh dengan akses transportasi dari ibukota Kabupaten menuju ibukota kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Meskipun demikian masih ada

sebagian Desa-Desa di Kabupaten ini yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, dari gambar 2.1 menunjukkan jarak antara ibu kota Kabupaten Parigi Moutong terlihat bahwa Jarak terjauh antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Moutong dengan jarak 290 km di tempuh dengan kendaraan darat kemudian disusul Kecamatan Taopa dengan jarak 274 km dengan kendaraan darat, sedangkan kecamatan yang terdekat dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Parigi Barat dengan jarak tempuh 4,4 km dari ibukota Kabupaten.

B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Parigi Moutong terletak pada posisi $119^{\circ}45' - 121^{\circ}06'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}14'$ Lintang Selatan serta $4^{\circ}40'$ Lintang Utara, serta memiliki luas 5,877,47 km², Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas 23 kecamatan pada tahun 2012, Wilayah ini terbentang dari Sausu (Kecamatan paling selatan) sampai di Moutong (Kecamatan paling utara). Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Palasa yaitu 579,78 km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Parigi yaitu sebesar 21,21 km², Secara lebih jelas data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Desa	Kelurahan
1	Sausu	229,67	10	-
2	Torue	265,13	7	-
3	Balinggi	245,05	9	-
4	Parigi	21,21	6	5
5	Parigi Selatan	384,64	10	-
6	Parigi Barat	123,61	6	-
7	Parigi Utara	91,77	5	-
8	Parigi Tengah	61,45	6	-
9	Ampibabo	158,20	19	-
10	Kasimbar	291,54	18	-
11	Toribulu	214,45	9	-
12	Siniu	99,10	9	-
13	Tinombo	319,42	15	-
14	Tinombo Selatan	371,57	20	-
15	Sidoan	288,55	11	-
16	Tomini	218,32	14	-
17	Mepanga	187,44	18	-
18	Palasa	579,78	11	-
19	Moutong	529,89	20	-

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Desa	Kelurahan
20	Bolano Lambunu	367,17	14	-
21	Taopa	236,89	11	-
22	Bolano	187,96	13	-
23	Ongka Malino	352,63	17	-
JUMLAH		5,877,47	278	5

Sumber: BPS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Sebagaimana data yang tersaji pada tabel 2.1 bahwa Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 5,877,47 kilometer persegi atau sebesar 9,42 Persen dari total wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	•Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-toli dan Provinsi Gorontalo
Sebelah Selatan	•Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi
Sebelah Barat	•Kabupaten Donggala dan Kota Palu
Sebelah Timur	•Teluk Tomini

C. Peran Strategis Daerah

Peran strategis Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dari keberadaan Kabupaten Parigi Moutong dengan 1 (satu) provinsi, dan 6 (enam) kabupaten yang secara gografis berbatasan langsung, Posisi Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi penghubung jalur antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah maupun antar provinsi. Peran strategis dari sudut pandang akses jalur transportasi darat, Kabupaten Parigi Moutong sebagai penghubung antara Kota Palu ke Kabupaten Poso – Kabupaten Tojo Una-Una – Kabupaten Banggai – Banggai Kepulauan – Banggai Laut – Morowali Utara – Morowali (Jalur Selatan), Penghubung antara Kota Palu dan Kabupaten Tolitoli – Kabupaten Buol – Provinsi Gorontalo - Provinsi Sulawesi Utara.

Peran strategis dari sisi pelayanan, keberadaan Kabupaten Parigi Moutong sebagai kabupaten penghubung mengambil peran strategis dalam penyediaan jasa makan/minum dan akomodasi, perdagangan, pariwisata, dan kesehatan, Peran strategi lain juga dilihat dari Kabupaten Parigi Moutong sebagai kabupaten lumbung pangan yang menyediakan pasokan bahan pangan (hasil pertanian maupun perkebunan) ke beberapa kabupaten baik di Provinsi

Sulawesi Tengah maupun antar provinsi di Pulau Sulawesi, dan sebagai kawasan penyanga pangan untuk mendukung pembangunan di Ibu kota Nusantara (IKN).

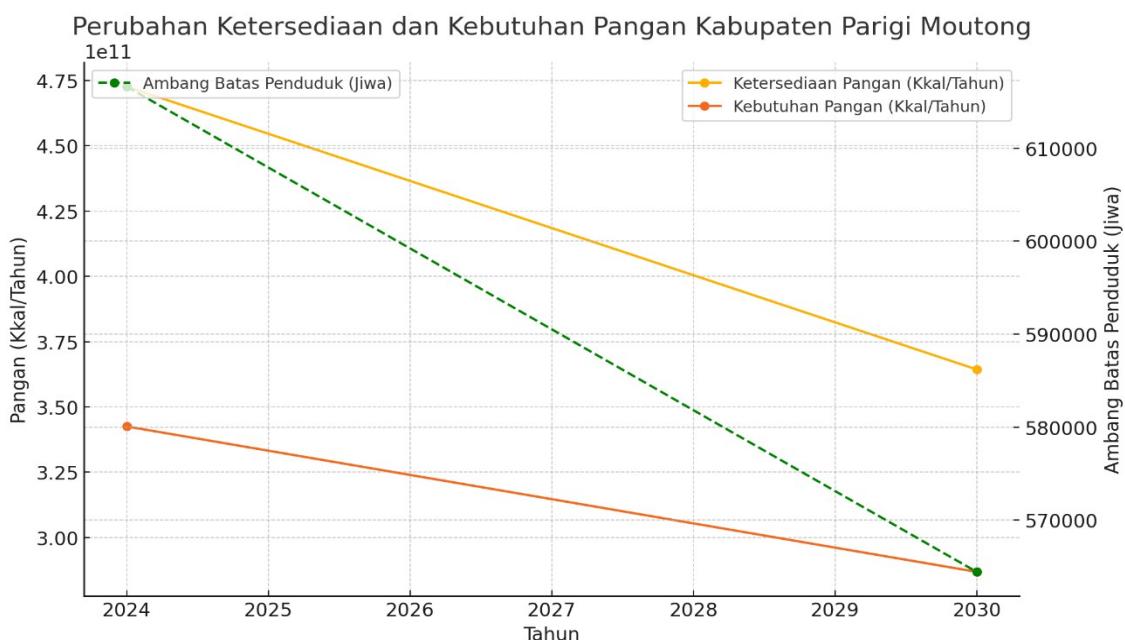
2.1.1.1. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada peningkatan laju pembangunan di berbagai sektor, hal ini telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup di sejumlah kawasan di Indonesia. Sebagai ilustrasi, sumber daya lahan, kemampuan lahan sangat berperan penting dalam menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan peningkatan jumlah penduduk, maka ketersediaan sumber daya lahan dan kemampuan lahan semakin terbatas dikarenakan semakin tingginya jumlah kebutuhan makhluk hidup dibandingkan ketersediaan sumber daya lahan. Selain itu, kualitas dan kondisi lahan yang semakin menurun akibat dari kegiatan manusia yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup semakin memperburuk kualitas lingkungan. Hal lain yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan adalah terjadinya ketaksesuaian penggunaan lahan, antara lain ditunjukkan dengan banyaknya lahan kritis atau bahkan penggurunan lahan. Sedangkan untuk sumber daya air memiliki tren yang sama, yaitu semakin menurun, baik kualitas maupun kuantitas pada air permukaan maupun pada air tanah. Hal ini terjadi karena pengelolaan sumber daya air yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, baik di hulu maupun di hilir, serta peningkatan pembangunan di sektor perindustrian yang merambah dari hulu ke hilir. Sebagai ilustrasi, kota-kota besar saat ini mengalami krisis air, dimana ketersediaan air yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang tinggal di suatu kota. Selain itu kualitas air yang buruk, mengakibatkan dibutuhkannya teknologi untuk mengolah air menjadi layak konsumsi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang optimal untuk pengelolaan sumber daya air, sehingga ketersediaan dan kualitasnya dapat selalu terjaga. Peningkatan dan penyebaran jumlah penduduk saat ini ke arah perkotaan, dimana banyak perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat kehidupan yang lebih baik mengakibatkan tekanan terhadap wilayah perkotaan. Selain itu, pertumbuhan sektor industri di suatu wilayah juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, yaitu meningkatnya tingkat pencemaran akibat emisi udara maupun limbah yang dikeluarkan dari kegiatan pabrik, berkurangnya ketersediaan sumber daya alam dari sektor kehutanan, pertanian, perikanan, mineral, kenaekaragaman hayati dikarenakan ketersediaan lahan semakin terbatas. Oleh karena itu kondisi lingkungan yang baik, dalam hal ini daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dapat menunjang

semua kegiatan manusia menjadi sangat penting untuk diperhatikan, agar dapat memenuhi semua kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

A. Daya Dukung Pangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang terukur berdasarkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Daya dukung pangan merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Parigi Moutong. Adanya peningkatan jumlah penduduk, intensifikasi penggunaan lahan, dan perubahan iklim, diperlukan pendekatan berbasis data untuk menilai ketersediaan dan kebutuhan pangan di tingkat kecamatan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah pendekatan grid, yang memungkinkan pemetaan dan analisis daya dukung pangan secara spasial dan terperinci



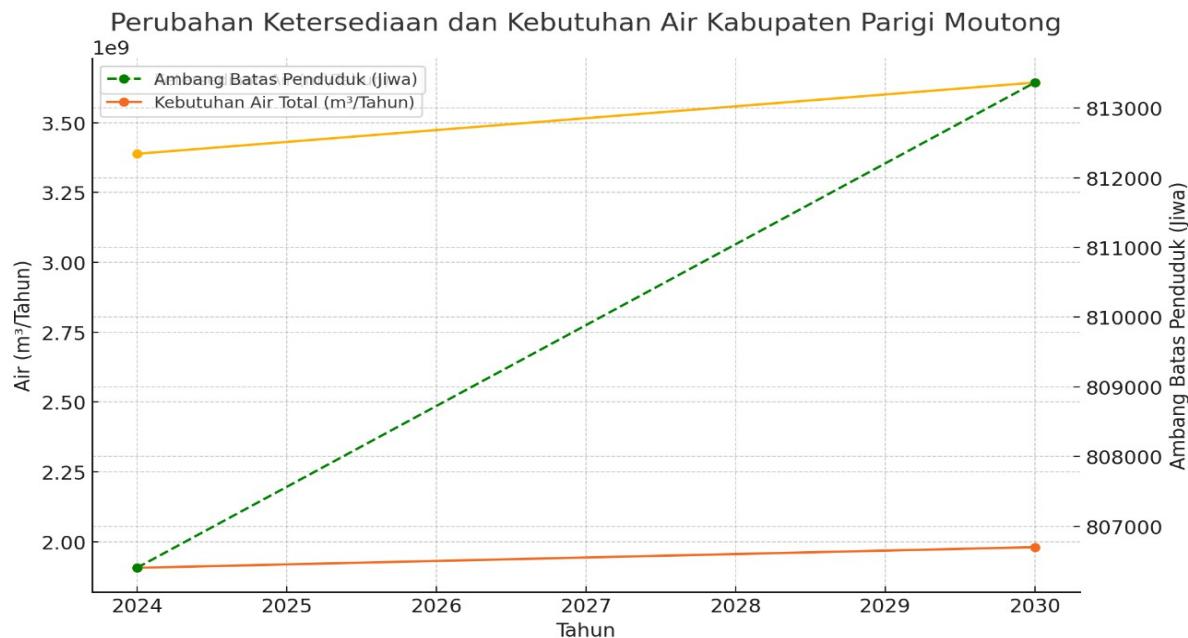
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029

Gambar 2. 2
Perubahan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan
Kabupaten Parigi Moutong 2024-2030

B. Daya Dukung Air

Meningkatnya populasi penduduk memicu adanya aktivitas-aktivitas baru yang berpengaruh pada pola penggunaan air yang tersedia, dimana pada akhirnya menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan air bahkan pula dapat menimbulkan

bencana lingkungan apabila daya dukung lingkungan terhadap air telah terlampaui. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 pasal 1, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, salah satunya dengan pendekatan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air (Admadhani, *et al.*,



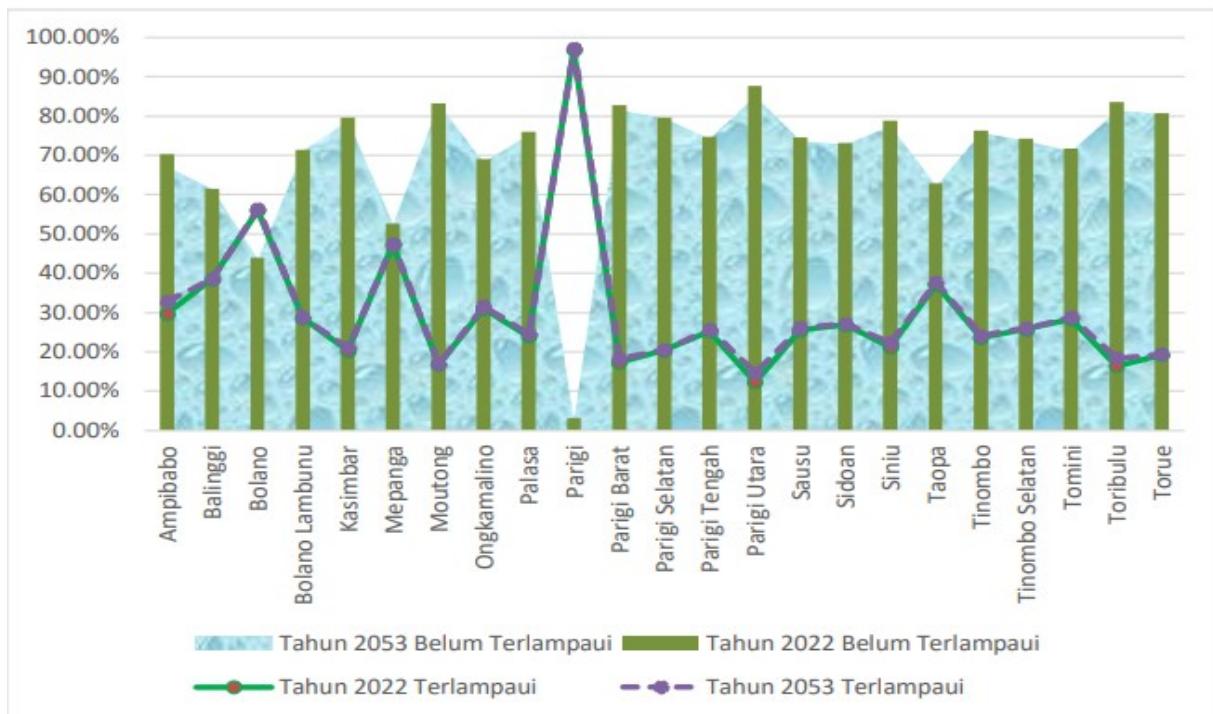
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029

**Gambar 2.3
Daya Dukung Air di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2030**

Jasa ekosistem penyedia air di Kabupaten Parigi berada pada kategori sedang dan nilainya berfluktuasi pada tiap kecamatan. Hal ini antara lain disebabkan faktor pembentuk jasa ekosistem ini yakni bentang lahan, jenis vegetasi dan tutupan lahan, bervariasi antar kecamatan. Khusus untuk tutupan lahan, selain bervariasi antar wilayah, juga antar waktu berfluktuasi karena adanya alih fungsi lahan. Grafik berikut menunjukkan perubahan luasan daya dukung air di Kabupaten Parigi Moutong dari tahun 2022 dan tahun 2053. Beberapa kecamatan yang daya dukung airnya telah terlampaui adalah Kecamatan Parigi yakni 96,93 persen (2022) menjadi 97,31 persen pada tahun 2053. Selain itu Kecamatan Bolano juga telah terlampaui sebesar 55,99 persen (2022) menjadi 56,41 persen (2053). Berdasarkan dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Parigi Moutong, terdapat empat kecamatan yang daya dukung airnya terlampaui pada tiga puluh satu tahun yang akan datang

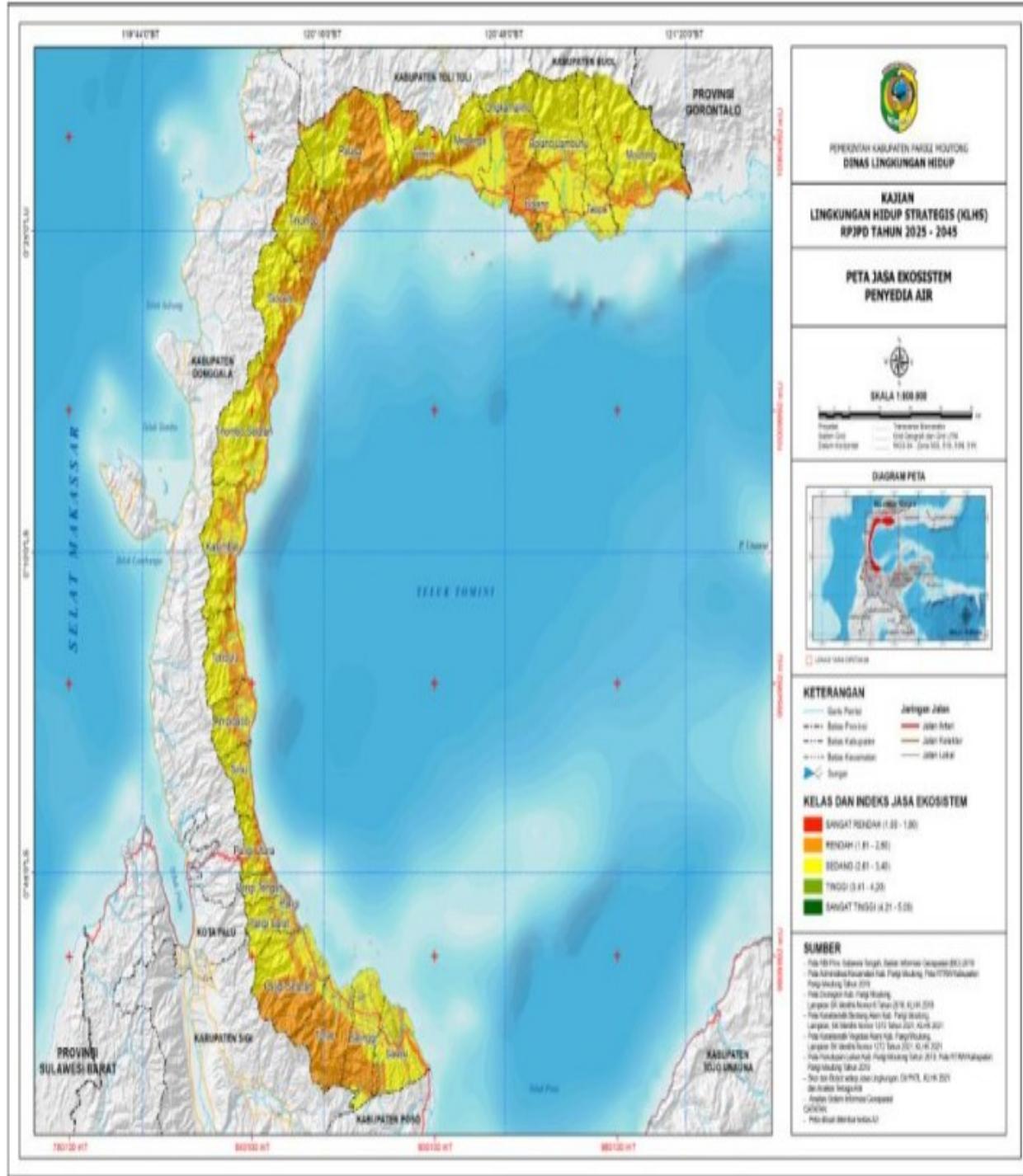
yakni kecamatan Parigi, Bolano, Balinggi dan Mepanga. Meskipun demikian pada umumnya tidak terdapat perubahan yang signifikan dari daya dukung air pada tahun 2022 dan 2053 di kabupaten ini. Data Air Bersih

ketersediaan air di Sulawesi Tengah adalah tertinggi dibandingkan propinsi lainnya di pulau Sulawesi (46.194.092.380,33 cm³/tahun dengan wilayah pemanfaatan air seluas 852.788,11 Ha atau 13,94 persen dari luas wilayah propinsi (Nugroho, dkk., 2019)



Gambar 2.4
Perubahan Persentase Luasan Daya Dukung Air

Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun 2022 dan 2053 Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan dan pemanfaatan air tetap dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutannya. Peta jasa ekosistem penyedia air di Kabupaten Parigi Moutong tercantum pada gambar 2.5 berikut.



Gambar 2.5

Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air di Kabupaten Parigi Moutong

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kabupaten Parigi Moutong maka jumlah kebutuhan hidup juga harus dipenuhi, salah satunya kebutuhan hidup yang utama adalah kebutuhan air bersih, sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Parigi Moutong telah

memiliki 11 Unit Pengelolaan Air Minum Perkotaan (SPAM Perkotaan) dimana Kapasitas produksi Air Bersih yang dihasilkan 65,98 liter/det

Tabel 2.2
Produksi Air Minum Kabupaten Parigi Moutong

NO	Nama SPAM IKK	Lokasi SPAM IKK	Jumlah Unit SPAM	Kapasitas Terpasang (L/det)	Kapasitas Produksi (L/det)	Kapasitas Idle (L/det)
UPTD						
1	IKK Parigi	Kec Parigi	2	40	19,10	20,90
2	IKK Torue	Kec Torue	1	10	9,83	0,18
3	IKK Tolai	Kec Tolai	1	10	9,65	0,35
4	IKK Moutong	Kec Moutong	2	25	9,39	15,61
				25		
5	IKK Ampibabo	Kec Ampibabo	1	10	5,51	4,49
6	IKK Kasimbar	Kec Kasimbar	1	20	1,54	18,46
7	IKK Mepanga	Kec Mepanga	1	20	2,01	17,99
8	IKK Tinombo	Kec Tinombo	1	20	6,25	14,75
9	IKK Tomini	Kec Tomini	1	20	2,70	17,30
JUMLAH			11	175	65,98	109,03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pentanaan Ruang dan Pertanahan (2024)

Untuk mengetahui besaran jumlah kebutuhan air dalam satu wilayah digunakan persamaan yang merupakan perkalian antara jumlah penduduk sehingga didapatkan proyeksi kebutuhan air bersih Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Tahun 2045 sebesar 26.382.070,5 M³.

C. Daya Tampung Persampahan

Persoalan sampah dan limbah perlu ditangani secara serius mengingat produksi sampah yang terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang juga memproduksi sampah dan limbah. Penanganan sampah dan limbah di perkotaan sering menjadi permasalahan karena berbagai hal misalnya ketidak cukupan sarana dan prasarana serta kekurangan anggaran. Oleh karena itu perlu diketahui seberapa besar perkiraan sampah yang ada di masyarakat agar sarana dan prasarana yang disiapkan dapat memadai. Untuk menduga produksi sampah dan limbah maka standar yang dapat dipakai acuan dari PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) Menurut Hakim, *et al.* (2006) sampah selalu dihubungkan dengan barang sisa atau hasil buangan tak berharga. Setiap orang setiap hari selalu menghasilkan sampah, namun manusia pula yang paling menghindari sampah. Pengelolaan sampah umumnya sampai saat ini yaitu dengan konsep buang begitu saja (*open dumping*), buang bakar (dengan *incenerator* atau dibakar begitu

saja), gali tutup (*sanitary landfill*), ternyata tidak memberikan solusi yang baik, apalagi jika pelaksanaannya tidak disiplin



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029

**Gambar 2.6
Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2045**

Berdasarkan acuan tersebut dan proyeksi penduduk maka dalam perencanaan persampahan di Kabupaten Parigi Moutong dapat diperkirakan kebutuhan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA). Strategi dan arah kebijakan persampahan dapat dikemukakan sebagai berikut

**Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Persampahan**

Strategi	Arah Kebijakan
Pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga	a) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan b) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
Pengelolaan sampah B3	(a) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan penerapan sistem insentif dalam upaya 3R (<i>Reduce-Reuse-Recycle</i>) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga (b) Pelaksanaan uji coba/pengelolaan pengembangan dan replikaasi 3R (pemanfaatan sampah melalui pemilahan sampah di sumber, pembuatan kompos dan daur ulang di permukiman)
Peningkatan dan Revitalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	a) Penentuan penggunaan teknologi dalam pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan b) Penyusunan dan penerapan SOP (standar operasional prosedur) dalam <i>sanitary landfill</i>
Penerapan dan penegakan peraturan	(a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

pengelolaan sampah	dalam pengelolaan persampahan (b) Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran peraturan persampahan

D. Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya, Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan peruntukan lindung terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya meliputi kawasan hutan lindung, Kawasan hutan lindung seluas 141,070,40 (seratus empat puluh satu ribu tujuh puluh koma empat nol)hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Siniu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, dan Kecamatan Torue.

Pada kawasan hutan lindung terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 9,073 (sembilan ribu tujuh puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Palasa, Kecamatan Tomini, Kecamatan Taopa dan Kecamatan Moutong yang digambarkan dalam bentuk outline di atas pola ruang, Pemanfaatan ruang pada kawasan outline dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

- b. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas :

- i. Sempadan Pantai,

Sempadan pantai seluas kurang lebih 2,486 (dua ribu empat ratus delapan puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu,

Kecamatan Sidoan, Kecamatan Siniu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, dan Kecamatan Torue.

ii. Sempadan sungai

Sempadan sungai seluas kurang lebih 4,129 (empat ribu seratus dua puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano, Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu, Kecamatan Siniu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, dan Kecamatan Torue,

iii. Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar berada di Danau Bolano Sau Kecamatan Bolano Lambunu.

c. Kawasan konservasi

Kawasan konservasi yang terdiri atas:

i). Kawasan Suaka Alam (KSA)

Kawasan suaka alam (KSA) terdiri atas:

Cagar Alam Gunung Panggi Binangga seluas 6,163,16 (enam ribu seratus enam puluh tiga koma satu enam) hektar terdapat di Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Tengah, dan Kecamatan Parigi Utara;

Cagar Alam Gunung Sojol seluas 35,700,60 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus koma enam nol)hektar terdapat di Kecamatan Palasa, Kecamatan Sidoan, dan Kecamatan Tinombo;

Cagar Alam Gunung Tinombala seluas 11,265,04 (sebelas ribu dua ratus enam puluh lima koma nol empat) hektar terdapat di Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Mepanga, dan Kecamatan Ongka Malino; d, suaka margasatwa Tanjung Santigi seluas 1,840,86 (seribu delapan ratus empat puluh koma delapan enam) hektar terdapat di Kecamatan Bolano.

ii). Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (KWP3K) terdiri atas:

- Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas:

(1) Kawasan terumbu karang terdapat di Kecamatan Sausu, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Siniu, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Toribulu, Kecamatan Tomini, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Taopa, dan Kecamatan Moutong

(2) Kebun benih bakau di kecamatan Toribulu,

- Kawasan konservasi maritim adalah kawasan religi dan budaya masyarakat suku mandar/kampung bajo yang terdapat di Kecamatan Balinggi, Kecamatan Torue, dan Kecamatan Parigi.

d. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya terdiri atas: Tugu Khatulistiwa Siney seluas kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Tinombo Selatan, Kawasan Kerajaan Tinombo seluas kurang lebih 4 (empat) hektar terdapat di Kecamatan Tinombo.

e. Kawasan ekosistem mangrove

Kawasan ekosistem mangrove berupa kawasan pantai berhutan bakau seluas kurang lebih 1,824 (seribu delapan ratus dua puluh empat)hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, dan Kecamatan Torue.

2. **Kawasan Peruntukan Budidaya**

Kawasan peruntukan budidaya terdiri atas:

a. Kawasan hutan produksi;

Kawasan produksi terdiri atas:

i). Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Seluas 103,669 (seratus tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Siniu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo,

Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, dan Kecamatan Torue.

ii). Kawasan Hutan Produksi Tetap

Seluas 22,146,78 (dua puluh dua ribu seratus empat puluh enam koma tujuh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Sausu, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, dan Kecamatan Torue.

iii). Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Seluas 13,624,39 (tiga belas ribu enam ratus dua puluh empat koma nol tiga sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Sausu, Kecamatan Siniu, dan Kecamatan Toribulu.

Pada kawasan hutan produksi terbatas terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi terbatas menjadi kawasan pertambangan mineral logam seluas kurang lebih 1,371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Palasa, Kecamatan Taopa, Kecamatan Moutong, Kecamatan Kasimbar dan Kecamatan Tinombo Selatan.

b. Kawasan Pertanian;

Kawasan Pertanian meliputi:

i). Kawasan Tanaman Pangan

Seluas kurang lebih 59,956 (lima puluh embilan ribu embilan ratus lima puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Siniu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, dan Kecamatan Torue; Kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dengan luas kurang lebih 59,956 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) hektar.

ii). Kawasan Hortikultura

Seluas kurang lebih 33,468 (tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong,

Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Siniu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, dan Kecamatan Torue.

iii). Kawasan Perkebunan

Seluas kurang lebih 83,900 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus)hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano,Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Siniu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, danKecamatan Torue; Pada kawasan perkebunan terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan perkebunan menjadi taman hutan raya seluas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Sausu yang digambarkan dalam bentuk outline di atas pola ruang.

iv). Kawasan Peternakan

Seluas kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Bolano.

c. Kawasan Perikanan;

Kawasan perikanan terdiri atas:

i). Kawasan Perikanan Tangkap

Terdapat di laut yang berada di sepanjang pesisir Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Siniu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, dan Kecamatan Torue.

ii). Kawasan Perikanan Budidaya Terdiri Atas:

- Kawasan perikanan budidaya darat seluas kurang lebih 9,027 (sembilan ribu dua puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan

- Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Sausu, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, Kecamatan Torue; dan
- Kawasan perikanan budidaya laut, di Kecamatan Sausu, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Siniu, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Bolano, Kecamatan Moutong, Kecamatan Palasa, Kecamatan Balinggi,

iii). Pelelangan Ikan

Untuk mendukung perikanan tangkap dan budidaya dilengkapi dengan sarana tempat pelelangan ikan di Kecamatan Sausu, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Siniu, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Bolano, Kecamatan Moutong, Kecamatan Palasa, Kecamatan Balinggi,

d. Kawasan Pertambangan dan Energi;

i). Pertambangan

Pertambangan di Kabupaten Parigi Moutong terdapat di Kecamatan Sausu, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Siniu, Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan Kecamatan Palasa Kecamatan Tomini, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Moutong;

ii). Pertambangan Mineral

- Kawasan pertambangan mineral logam seluas kurang lebih 13,992 (tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Taopa dan Kecamatan Moutong,
- Kawasan pertambangan batuan, seluas kurang lebih 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Taopa, dan Kecamatan Tinombo Selatan,

e. Kawasan Peruntukan Industri;

Kawasan peruntukan industri meliputi sentra industri kecil dan menengah. Sentra Industri Kecil dan Menengah, seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Sausu, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Torue, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Tengah,

Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Siniu, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Toribulu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Palasa, Kecamatan Tomini, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Taopa dan Kecamatan Moutong.

f. Kawasan Pariwisata;

Kawasan pariwisata terdiri atas :

i). Kawasan Pembangunan Pariwisata

- Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) meliputi DPN Toraja – Lore Lindu dan sekitarnya, serta DPN Togean – Gorontalo dan sekitarnya;
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) meliputi Palu dan sekitarnya serta Togean – Tomini;
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) meliputi Kawasan Kayubura, Kawasan Spot Diving Marantale, Kawasan Tugu Khatulistiwa, dan Kawasan Kota Pusaka Tinombo sebagai pusat bagi kepariwisataan Kabupaten Parigi Moutong;
- Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) terdiri atas KPP1 terdiri atas kawasan pembangunan pariwisata bagian selatan Parigi Moutong; dan, KPP2 terdiri atas kawasan pembangunan pariwisata bagian utara Parigi Moutong,

ii). Destinasi Pariwisata

Terdiri atas : Air Terjun 7 (tujuh) Bidadari di Desa Boloung Olanggata Kecamatan Moutong, Pulau Lolayo di Kecamatan Moutong, Pantai Moian di Kecamatan Taopa, Tanjung Santigi dan Pulau Ongka di Desa Kayujati Kecamatan Ongka Malino, Puncak Durian dan Air Terjun Ogotumuba di Kecamatan Tomini, Pulau Kelelawar di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu, Puncak Pimpin dan Air Terjun di Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan, Wisata Mangrove di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan, Air Terjun Pomporaupa di Desa Marantele Kecamatan Siniu, Air Terjun Sumpa di Desa Silanga Kecamatan Siniu, Air Terjun Gangga di Desa Gangga Kecamatan Parigi Selatan, Wisata Olobaru di Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan, Pulau Makakata di Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan, Agrowisata Pertanian di Dolago Kecamatan Parigi Selatan, Pantai Garata dan Pantai Goda di Desa Torue Kecamatan Torue, Pantai Tasi Garata di Desa Torue Kecamatan Torue, Wisata Agro di Desa Catur Karya Kecamatan Balinggi, Air Terjun di Desa Catur Karya Kecamatan Balinggi, Pulau Tiga/Pulau Panda di Sausu Gandasari Kecamatan Sausu; dan Wisata Mangrove di Desa Sausu Peopre Kecamatan Sausu,

g. Kawasan Permukiman;

Kawasan permukiman terdiri atas:

i). Kawasan Permukiman Perkotaan

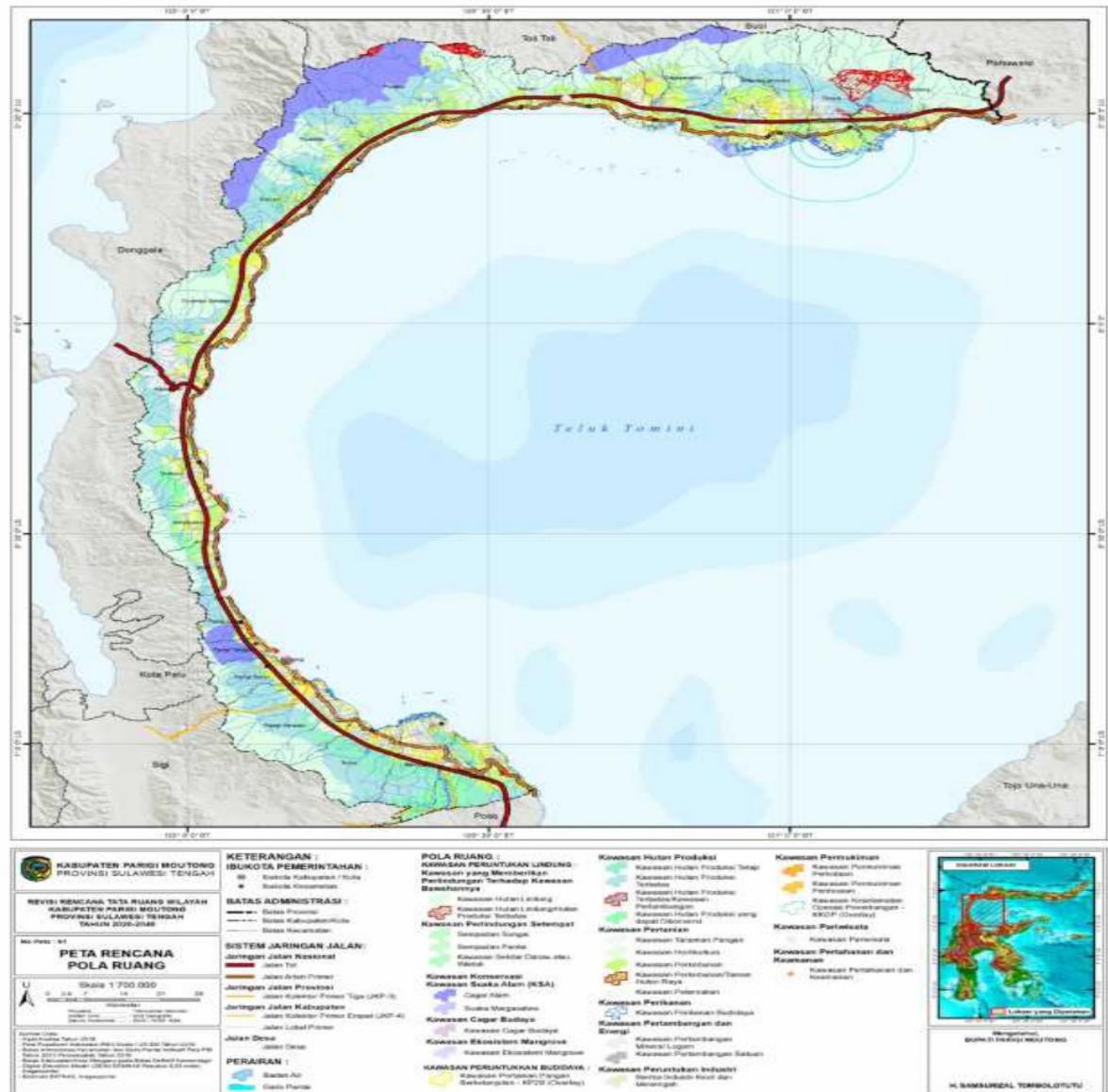
Seluas kurang lebih 5,084(lima ribu delapan puluh empat) hektar terdapat di Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu, dan Kecamatan Tinombo,

ii). Kawasan Permukiman Perdesaan

Seluas kurang lebih 18,866 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Siniu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, dan Kecamatan Torue.

h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas: Komando Distrik Militer (KODIM), Rayon Infantri (YONIF), Komando Rayon Militer (KORAMIL), Kawasan Latihan Menembak, Patroli Pos Pengamat TNI Angkatan Laut, Pangkalan TNI Angkatan Udara, Korps Brigade Mobil (BRIMOB), Polisi Resort (POLRES), Polisi Sektor (POLSEK),



Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang

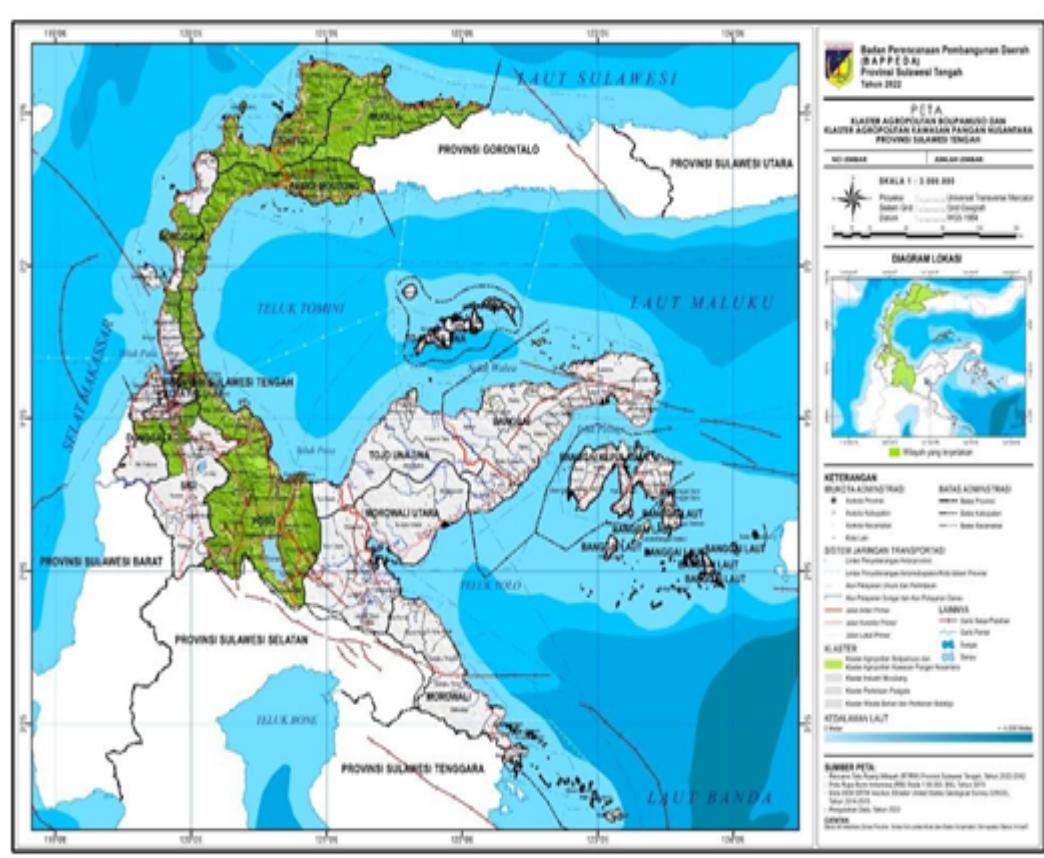
3. Kawasan Startegis Kabupaten

a. Kawasan Strategis Nasional

- (i). Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Palapas yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - (ii). Kawasan Kritis Lingkungan Lambunu - Buol yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - (iii) Kawasan Prioritas Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate (NEPIE) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;.

- b. Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten

- (i) Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Palapas yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- (ii) Kawasan Kritis Lingkungan Lambunu - Buol yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- (iii) Kawasan Prioritas Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate (NEPIE) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;



Gambar 2.8
Klaster Agropolitan: Bolipauso dan Kawasan Pangan Nusantara

- c. Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas :
- (i). Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 - (-).Kawasan Perkotaan Parigi, Perkotaan Tinombo dan Perkotaan Moutong meliputi Kecamatan Parigi, Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Moutong;
 - (-).Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Paristoba, meliputi Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Torue, dan Kecamatan Balinggi;
 - (-) Kawasan Perbatasan Kabupaten Bagian Utara Parigi Moutong, meliputi Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Taopa dan Kecamatan Moutong;
 - (-). Kawasan Tugu Khatulistiwa di Kecamatan Tinombo Selatan;

(-) Kawasan Teluk Tomini, meliputi kawasan pesisir seluruh kecamatan;

(-) Kawasan Minapolitan, meliputi Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Tomini dan Kecamatan Tinombo; dan

(-) Kawasan Koridor Jalan Arteri (Trans Sulawesi) Sausu – Moutong, meliputi Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Siniu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, dan Kecamatan Torue,

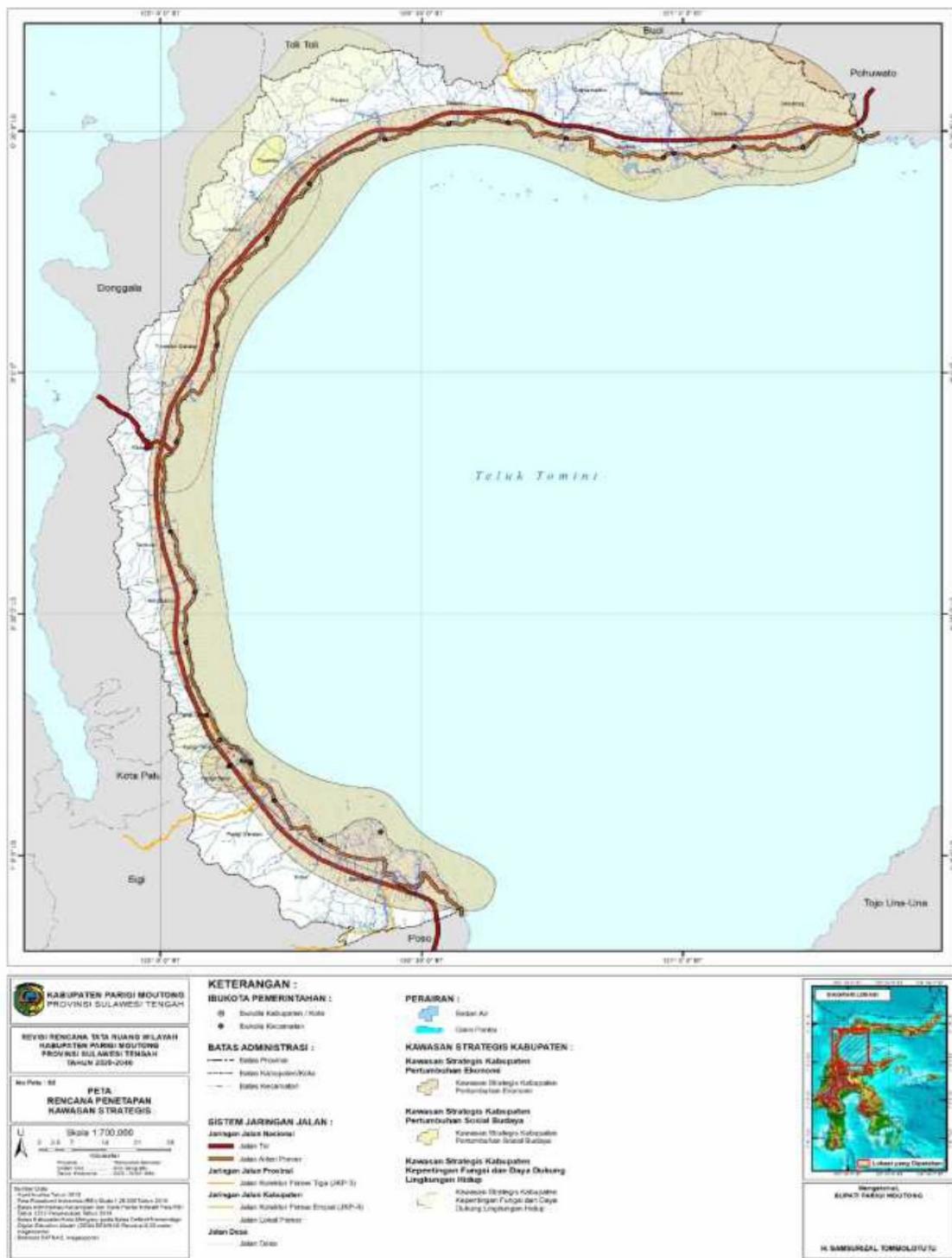
(ii). Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas:

(-). Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Balinggi, Kecamatan Parigi, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Palasa dan Kecamatan Moutong; dan

(-). Kawasan Adat Terpencil Tinombo di Kecamatan Tinombo,

(iii).Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

meliputi Cagar Alam Gunung Tinombala di Kecamatan Tomini dan Mepanga, Cagar Alam Gunung Sojol di Kecamatan Tinombo dan Palasa, Cagar Alam Pangi Binangga di Kecamatan Parigi Barat, Parigi Tengah dan Parigi Utara, Suaka Margasatwa Tanjung Santigi di Kecamatan Bolano Lambunu,



Gambar 2.9
Peta Rencana Kawasan Strategis

2.1.1.2. Indeks Ketahanan Daerah

Pengukuran tingkat kapasitas daerah Kabupaten Parigi Moutong dapat dilakukan berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan dan peran serta masyarakat. Dalam

mengoptimalkan kajian penilaian kapasitas maka pengkajian kapasitas diukur berdasarkan penggabungan komponen ketahanan daerah yang berlaku umum dan menyeluruh pada tatanan pemerintah daerah dan kesiapsiagaan desa di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan perlakuan perbencanaan, Komponen-komponen kapasitas yang diukur dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut.

**Tabel 2.3
Indeks Ketahanan Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024**

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Ketahanan Daerah	
			Indeks	Kelas
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,85	0,73	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,85		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,70		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,66		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Daeruat Bencana	0,62		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1		

Sumber: BPBD Kabupaten Parigi Moutong, 2024.

Tabel 2.3 menunjukkan ketahanan daerah kabupaten Parigi Moutong dalam menghadapi Bahaya bencana yang berpotensi berada pada kelas sedang dengan indeks 0,73. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Parigi Moutong telah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun belum secara menyeluruh

2.1.1.3. Indeks Risiko Bencana

Secara geomorfologi Kabupaten Parigi Moutong terletak di Bagian timur leher pulau Sulawesi yang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah berbatasan teluk Tomini, perbukitan yang membentang dari utara ke selatan. Kondisi geomorfologi ini menjadikan Kabupaten Parigi Moutong memiliki multi Bahaya bencana (multi hazard) baik Bahaya bencana geologi maupun Bahaya bencana hidrometeorologi, Hasil kajian risiko bencana Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan pada tahun 2023 – 2028 terdapat 9 (sembilan) jenis Bahaya bencana yang ada di Kabupaten Parigi Moutong antara lain : gempa

bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, Banjir bandang, gelombang ekstrem, tsunami kekerigan, kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrime,

Tabel 2.4
Potensi Luas Zona Rawan Bahaya
Kabupaten Parigi Moutong

No	Potensi Bahaya Bencana	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Gempa Bumi	451,658	77,760	39,778	569,197
2	Tsunami	183,6	289,98	1286,82	1760,4
3	Tanah Longsor	5,762	3,912	13,969	23,643
4	Banjir	10,668	13,287	4,096	28,051
5	Banjir Bandang	12,475	5,981	1,734	20,190
6	Gelombang Extrrim	1,657	809	770	3,236
7	Tsunami Kekeringan	89,933	101,229	87,276	278,438
8	Kebakaran Lahan	91,076	36,814	36,721	164,612
9	Cuaca Extrrim	114,667	19,447	27,232	161,346
Jumlah					

Sumber: BPBD Kabupaten Parigi Moutong (Dokumen Kajian Bencana 2023-2028)

Tabel 2.5
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Parigi Moutong

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana	108,39	108,39	102,67	97,72	93,53

Sumber: BNPB (Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia 2024)

2.1.1.4. Ketahanan Pangan

Hasil penilaian IKP dari Badan Pangan Nasional di tahun 2024 adalah Kabupaten Parigi Moutong mengalami peningkatan peringkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2023. Artinya ada perbaikan dari aspek ketahanan pangan dibanding tahun sebelumnya, nilai IKP Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 adalah 77,59 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan nilai 1,32 yaitu sebesar 78,91 Jika ditilik dari nilai yang dikeluarkan disebabkan, semua indikator memang yang mengalami kenaikan.

Tabel 2.6
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong

No	Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Ketahanan Pangan	75,05	75,03	76,83	77,59	78,91	
2	Indeks Keterjangkauan	72,22	72,89	77,62	77,86	78,72	
3	Indeks Ketersediaan	94,73	95,47	96,66	95,71	95,61	

No	Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	Indeks Pemanfaatan	62,41	61,31	61,37	63,80	66,51	

Sumber: Badan Ketahanan Pangan (Publikasi Indeks Ketahanan Pangan), 2025

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Dalam hal ini melestarikan lingkungan hidup merupakan tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)* 2015 yakni mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan, serta pada tahun 2015 diharapkan dapat mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.

Dalam Meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Ciri ekonomi hijau yang paling membedakan dari gagasan ekonomi lainnya yaitu penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya di mana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset, Green Ekonomi meliputi:

- a) Pengurangan Emisi Gas Buang Co2;
- b) Program Penghijauan;
- c) Program Industri ramah lingkungan.

Sumber daya alam yang terbatas serta terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, maka tuntutan untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan atau yang sering disebut sebagai *green industry* merupakan isu penting. Hal ini merupakan tugas pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat serta dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Menitikberatkan pada penggunaan sumber daya yang baik, efisiensi bahan baku, energi, sampah, pengelolaan karbon, bahkan transportasi menjadi hal yang utama pada konsep ini.

Upaya menuntun dunia industri agar ramah lingkungan memang tidak mudah. Hal ini diperlukan instrumen pendukung yang bersifat pembinaan, pengawasan dan pemantauan, instrumen tersebut dapat berupa administratif, sosial, dan teknis. Instrumen administratif meliputi hukum dan kebijakan, peraturan dan ketentuan-ketentuan, dan penegakan hukum.

Pemberian insentif bagi industri yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dapat dimasukkan dalam kategori ini. Sedangkan, intrumen sosial adalah partisipatif masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung *green industry*, Intrumen terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah instrumen teknis dimana mencakup AMDAL, Penilaian Risiko, Penentuan Kriteria dan Standar.

Penerapan manajemen lingkungan dan konsep industri hijau memerlukan pemahaman yang komprehensif. Untuk itu diperlukan konsep dasar yang terintegrasi, Konsep *green industry* yaitu terintegrasinya perencanaan dan implementasi pengelolaan lingkungan dalam manajemen industry. Dinamakan *green industry* yakni artinya industri yang berwawasan lingkungan, Pengelolaan Lingkungan telah diberikan tempat bersamaan dengan proses perancangan hingga operasional suatu industri, *Green industry* memiliki pola pengelolaan sebagai berikut:

- Membuat dokumen lingkungan pada tahap perencanaan proyek;
- Melakukan pengelolaan aspek lingkungan baik di input-proses-output untuk masing-masing unit/sub kegiatan;
- Berupaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam melalui langkah Reduce, Reuse, Recycle, Recovery;
- Bertanggungjawab terhadap aspek lingkungan yang akan dilepaskan ke alam dengan tidak melampaui beban maksimum lingkungan;
- Bertanggung jawab terhadap potensi kondisi darurat dengan menerapkan upaya pengendalian dan pemulihan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berbagai langkah dan pendekatan dilakukan untuk penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan yang dilakukan. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dari jumlah kasus yang masuk, semuanya ditindaklanjuti. Indikator Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024 Kabupaten Parigi Moutong

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
2	Persentase penanganan sampah	6,22	7,34	6,85	4,42	51,76
3	Presentase Penanganan RTH	0,0104	21,66	36,59	96,34	70,11

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	20,49	19,23	339,28	80	30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Tabel indikator urusan lingkungan hidup tahun 2020-2024, terlihat persentase penanganan sampah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 sebesar 4,42 persen dan pada tahun 2024 naik menjadi 51,76 persen.

2.1.2. Demografi

Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya. Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah- masalah sosial dan ekonomi.

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat tinggi merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (in migration) lebih besar dari pada migrasi keluar (out migration). Selanjutnya berdasarkan hasil Sensus Penduduk Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 457.031 jiwa meningkat menjadi 461.576 jiwa pada tahun 2024 atau terjadi peningkatan

sebesar 0,99 persen selama periode Tahun 2023-2024 Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022-2024 menurut kecamatan tersaji pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2022-2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2022-2023	2023-2024
Sausu	21,722	20,939	20.997	-3,60	0,28
Torue	20,429	20,227	20.244	-0,99	0,08
Balinggi	17,526	17,721	17.688	1,11	-0,19
Parigi	31,273	31,141	31.287	-0,42	0,47
Parigi Selatan	23,456	23,142	23.257	-1,34	0,50
Parigi Barat	8,532	8,893	9.068	4,23	1,97
Parigi Utara	7,032	7,198	7.270	2,36	1,00
Parigi Tengah	9,358	9,222	9.380	-1,45	1,71
Ampibabo	23,181	22,938	23.154	-1,05	0,94
Kasimbar	23,677	24,452	25.109	3,27	2,69
Toribulu	17,733	17,461	17.676	-1,53	1,23
Siniu	10,192	10,384	10.412	1,88	0,27
Tinombo	20,331	24,130	24.465	18,69	1,39
Tinombo Selatan	28,259	29,174	29.541	3,24	1,26
Sidoan	14,624	15,650	15.823	7,02	1,11
Tomini	19,025	20,072	20.450	5,50	1,88
Mepanga	30,157	30,223	30.332	0,22	0,36
Palasa	26,278	28,896	29.645	9,96	2,59
Moutong	21,541	22,467	22.519	4,30	0,23
Bolano Lambunu	21,059	20,537	20.697	-2,48	0,78
Taopa	14,132	14,642	14.704	3,61	0,42
Bolano	16,271	16,473	16.641	1,24	1,02
Ongka Malino	20,924	21,049	21.217	0,60	0,80
Parigi Moutong	446,712	457,031	461.576	2,31	0,99

Sumber: BPS, Parigi Moutong Dalam Angka Tahun 2025.

Tabel tren jumlah penduduk, terlihat Kecamatan Kasimbar memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2,69 persen periode 2023-2024, dimana pada tahun 2023 jumlah penduduknya sebanyak 24.452 jiwa meningkat menjadi sebanyak 25.109 jiwa tahun 2024, Sementara kecamatan yang memiliki tren pertumbuhan terendah pada periode yang sama adalah Kecamatan Balinggi dengan pertumbuhan hanya sebesar -0,19 persen, dimana penduduk kecamatan Balinggi tahun 2023 sebanyak 17.721 jiwa menurun pada tahun 2024 menjadi 17.688 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk yang merupakan Profil dari tingkat

perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Parigi Moutong bervariasi antar kecamatan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk periode Tahun 2024 sekitar 0,99 persen. Selengkapnya data mengenai persentase jumlah penduduk di Kabupaten Parigi Moutong menurut Kecamatan terlihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah	Persentase (%)
Sausu	20.997	4,55
Torue	20.244	4,39
Balinggi	17.688	3,83
Parigi	31.287	6,78
Parigi Selatan	23.257	5,04
Parigi Barat	9.068	1,96
Parigi Utara	7.270	1,58
Parigi Tengah	9.380	2,03
Ampibabo	23.154	5,02
Kasimbar	25.109	5,44
Toribulu	17.676	3,83
Siniu	10.412	2,26
Tinombo	24.465	5,30
Tinombo Selatan	29.541	6,40
Sidoan	15.823	3,43
Tomini	20.450	4,43
Mepanga	30.332	6,57
Palasa	29.645	6,42
Moutong	22.519	4,88
Bolano Lambunu	20.697	4,48
Taopa	14.704	3,19
Bolano	16.641	3,61
Ongka Malino	21.217	4,60
Parigi Moutong	461.576	100

Sumber: BPS, Parigi Moutong Dalam Angka Tahun 2025.

Tabel 2.9 terkait jumlah dan persentase penduduk menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong adalah Kecamatan Parigi sebagai ibukota Kabupaten Parigi Moutong dengan persentase sebesar 6,78 persen dari total penduduk Kabupaten Parigi Moutong secara keseluruhan, diikuti oleh Kecamatan Mepanga sebesar 6,57 persen, Kecamatan Palasa sebesar 6,42 persen, dan selanjutnya Kecamatan Tinombo Selatan sebesar 6,40 persen, sedangkan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya di Kabupaten Parigi Moutong adalah Kecamatan Parigi Utara yang hanya sebesar 1,58 persen dari total

penduduk Kabupaten Parigi Moutong. Pada tahun 2024 penduduk Kabupaten Parigi Moutong mengalami peningkatan menjadi 461.576 (BPS Kab. Parigi Moutong). Data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020-2024, tabel 2.10 sebagai berikut.

Tabel 2.10
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Parigi Moutong
Dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah,
Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Menurut Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bangkep	120,142	121,684	123,576	123,420	130.008
Banggai	362,275	366,224	370,971	373,7	377.804
Morowali	161,727	167,910	176,244	170,450	198.968
Poso	244,875	248,345	252,650	251,654	253.350
Donggala	300,436	302,965	305,890	308,3	310.998
Toli-Toli	225,154	226,796	228,641	231,71	233,90
Buol	145,254	146,628	148,246	150,524	162,27
Parigi Moutong	440,015	443,170	446,712	457,031	461.576
Tojo Una-una	163,829	166,339	169,478	169,00	170.815
Sigi	239,421	261,676	266,812	266,654	270.189
Banggai Laut	70,435	70,872	71,346	73,10	77.830
Morowali Utara	120,789	122,240	124,006	126,05	129,64
Palu	373,218	377,030	381,572	387,493	389.959
Sulawesi Tengah	2,985,734	3,021,879	3,066,143	3,086,75	3.165,1

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2025

Pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, Pada tahun 2024, total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 3.165,1 jiwa, Kabupaten Parigi Moutong merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 461.576 jiwa, menyusul Kota Palu dengan jumlah penduduk sebanyak 389.959 jiwa dan peringkat ketiga Kabupaten Banggai sebanyak 377.804 jiwa, peringkat keempat Kabupaten Donggala sebanyak 310.998 jiwa, Daerah dengan penduduk terendah yaitu Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah penduduk sebesar 77.830 jiwa.

B. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Parigi Moutong tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, dimana Kecamatan Parigi sebagai pusat pemerintahan memiliki luas Wilayah Kecamatan sebesar 21,21 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 31.287 jiwa sehingga kepadatan penduduk mencapai 1.331,36 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Moutong dengan tingkat kepadatan sebesar 38,76 Jiwa per km². Lebih lengkap mengenai data rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 disajikan sebagaimana table 2.11 berikut,

Tabel 2.11
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Parigi Moutong
Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan (Org/Km ²)
	Km ²	%	Jumlah	%	
Sausu	229,67	3,91	20.997	4,55	51,17
Torue	265,13	4,51	20.244	4,39	73,39
Balinggi	245,05	4,17	17.688	3,83	79,01
Parigi	21,21	0,36	31.287	6,78	1.331,36
Parigi Selatan	384,64	6,54	23.257	5,04	58,67
Parigi Barat	123,61	2,10	9.068	1,96	76,66
Parigi Utara	91,77	1,56	7.270	1,58	73,71
Parigi Tengah	61,45	1,05	9.380	2,03	124,90
Ampibabo	158,20	2,69	23.154	5,02	120,95
Kasimbar	291,54	4,96	25.109	5,44	89,43
Toribulu	214,45	3,65	17.676	3,83	83,23
Siniu	99,10	1,69	10.412	2,26	87,53
Tinombo	319,42	5,43	24.465	5,30	85,66
Tinombo Selatan	371,57	6,32	29.541	6,40	77,78
Sidoan	288,55	4,91	15.823	3,43	44,82
Tomini	218,32	3,71	20.450	4,43	94,51
Mepanga	187,44	3,19	30.332	6,57	146,46
Palasa	579,78	9,86	29.645	6,42	48,35
Moutong	529,89	9,02	22.519	4,88	38,76
Bolano Lambunu	367,17	6,25	20.697	4,48	54,11
Taopa	236,89	4,03	14.704	3,19	60,45
Bolano	187,96	3,20	16.641	3,61	101,31
Ongka Malino	352,63	6,00	21.217	4,60	55,80
Parigi Moutong	5,877,47	100,00	461.576	100	74,08

Sumber: BPS, Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka Tahun 2025.

Selanjutnya mengenai tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Parigi Moutong jika dilihat dari rata-rata per rumah tangga, data tahun 2024 tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Parigi Moutong sebesar 3 jiwa/Rumah Tangga. Secara lengkap berikut disajikan

data rata-rata penduduk Per Rumah Tangga di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12
Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga
Menurut Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata ART
Sausu	20.997	7.011	2,99
Torue	20.244	6.749	3,00
Balinggi	17.688	5.938	2,97
Parigi	31.287	10.093	3,10
Parigi Selatan	23.257	7.618	3,05
Parigi Barat	9.068	2.965	3,05
Parigi Utara	7.270	2.261	3,21
Parigi Tengah	9.380	3.074	3,05
Ampibabo	23.154	7.413	3,12
Kasimbar	25.109	7.792	3,22
Toribulu	17.676	5.506	3,21
Siniu	10.412	3.457	3,01
Tinombo	24.465	7.125	3,43
Tinombo Selatan	29.541	8.898	3,32
Sidoan	15.823	5.001	3,16
Tomini	20.450	6.301	3,24
Mepanga	30.332	9.703	3,12
Palasa	29.645	9.219	3,21
Moutong	22.519	7.191	3,13
Bolano Lambunu	20.697	6.825	3,03
Taopa	14.704	4.930	2,98
Bolano	16.641	5.422	3,06
Ongka Malino	21.217	6.774	3,13
Parigi Moutong	461.576	147.269	3,13

Sumber: BPS, Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka Tahun 2025 dan Dinas Dukcapil 2024

Tabel penduduk dan rumah tangga, terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga sebesar 3,13 orang tiap rumah tangga, kecamatan yang memiliki rata-rata penduduk per Rumah Tangga terendah di Kabupaten Parigi Moutong adalah Kecamatan Taopa dan Kecamatan Balinggi, dengan total penduduk sebanyak 14.704 jiwa dan memiliki jumlah rumah tangga sebanyak 4.930 rumah tangga atau sebanyak 2,98 jiwa/Rumah Tangga. Sementara Kecamatan Tinombo merupakan kecamatan yang memiliki rata-rata penduduk per Rumah Tangga tertinggi dibanding kecamatan lainnya dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebesar 3,43 jiwa/Rumah Tangga dengan jumlah penduduk sebesar 24,465 jiwa dan jumlah rumah tangga sebanyak 7.125 rumah tangga.

Selanjutnya mengenai tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Parigi Moutong jika dilihat dari rata-rata per Desa, kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Torue dengan rata-rata

kepadatan penduduk sebanyak 2,892 jiwa per Desa. Terlihat dari jumlah Desa di Kecamatan Torue sebanyak 7 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 6.749 jiwa, Sedangkan kepadatan terendah adalah Kecamatan Moutong yang memiliki jumlah Desa sebanyak 20 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 22.519 jiwa sehingga angka rata-rata kepadatan penduduk sebanyak 1,126 jiwa per Desa, Secara lengkap berikut disajikan data rata-rata penduduk Per Desa dan Per Rumah Tangga di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 pada tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Rata-rata Penduduk per Desa dan Per Rumah Tangga
Menurut Kecamatan Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah			Rata-Rata Penduduk	
	Desa	Rumah Tangga	Penduduk	Per Desa	Per RT
Sausu	10	7.011	20.997	2.100	2,99
Torue	7	6.749	20.244	2.892	3,00
Balinggi	9	5.938	17.688	1.965	2,97
Parigi	11	10.093	31.287	2.844	3,10
Parigi Selatan	10	7.618	23.257	2.326	3,05
Parigi Barat	6	2.965	9.068	1.511	3,05
Parigi Utara	5	2.261	7.270	1.454	3,21
Parigi Tengah	6	3.074	9.380	1.563	3,05
Ampibabo	19	7.413	23.154	1.219	3,12
Kasimbar	18	7.792	25.109	1.395	3,22
Toribulu	9	5.506	17.676	1.964	3,21
Siniu	9	3.457	10.412	1.157	3,01
Tinombo	15	7.125	24.465	1.631	3,43
Tinombo Selatan	20	8.898	29.541	1.477	3,32
Sidoan	11	5.001	15.823	1.438	3,16
Tomini	14	6.301	20.450	1.461	3,24
Mepanga	18	9.703	30.332	1.685	3,12
Palasa	11	9.219	29.645	2.695	3,21
Moutong	20	7.191	22.519	1.126	3,13
Bolano Lambunu	14	6.825	20.697	1.478	3,03
Taopa	11	4.930	14.704	1.337	2,98
Bolano	13	5.422	16.641	1.280	3,06
Ongka Malino	17	6.774	21.217	1.248	3,13
Parigi Moutong	283	147.269	461.576	1.631	3,13

Sumber: Kabupaten Parigi Moutong dalam Angka, Tahun 2025 dan Dukcapil (diolah kembali)

C. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "Sex Rasio" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, dimana

semakin besar porsi penduduk perempuan maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
di Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
Sausu	20.997	106,48
Torue	20.244	103,81
Balinggi	17.688	104,34
Parigi	31.287	102,37
Parigi Selatan	23.257	102,75
Parigi Barat	9.068	104,42
Parigi Utara	7.270	103,93
Parigi Tengah	9.380	100,90
Ampibabo	23.154	104,36
Kasimbar	25.109	105,86
Toribulu	17.676	105,39
Siniu	10.412	107,25
Tinombo	24.465	106,21
Tinombo Selatan	29.541	105,55
Sidoan	15.823	106,84
Tomini	20.450	104,30
Mepanga	30.332	104,55
Palasa	29.645	106,96
Moutong	22.519	101,37
Bolano Lambunu	20.697	104,88
Taopa	14.704	102,45
Bolano	16.641	103,76
Ongka Malino	21.217	105,23
Parigi Moutong	461.576	104,58

Sumber: BPS, Parigi Moutong Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.14 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin dapat dilihat bahwa Kecamatan Palasa merupakan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 dengan rasio sebesar 106,96, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah kecamatan Parigi Tengah dengan rasio sebesar 100,90. Secara keseluruhan terlihat sex rasio pada tingkat kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong relatif bervariasi antara 100 sampai 106, Namun secara komulatif pada tingkat Kabupaten Parigi Moutong dalam tahun terakhir komposisi penduduk laki- laki dan perempuan telah relatif berbeda (sex rasio = 100) dengan angka rasio sebesar 104 dan bahkan terdapat kecenderungan sex rasio tetap diatas angka 100.

D. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur penduduk Kabupaten Parigi Moutong. Pada Tahun 2024 penduduk di bawah usia 15 tahun mencapai 115,013 jiwa atau sebesar 24,92 persen dari total penduduk Kabupaten Parigi Moutong yang berjumlah 461.576 jiwa. Dengan demikian Kabupaten Parigi Moutong mempunyai penduduk tergolong dalam penduduk Intermediate, dimana proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun sekitar 24 persen, seperti yang terlihat pada tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kabupaten Parigi Moutong
Menurut Kelompok Umur, Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	15.887	14.770	30.657
5 – 9	21.204	19.902	41.106
10 – 14	22.227	21.023	43.250
15 – 19	20.594	19.858	40.452
20 – 24	22.359	21.843	44.202
25 – 29	18.990	17.386	36.376
30 – 34	16.544	15.846	32.390
35 – 39	15.564	15.617	31.181
40 – 44	17.499	17.181	34.680
45 – 49	16.912	16.494	33.406
50 – 54	14.644	13.861	28.505
55 – 59	11.712	11.142	22.854
60 – 64	8.125	7.747	15.872
65 – 69	5.783	5.514	11.297
70 – 74	3.816	3.583	7.399
75+	4.098	3.851	7.949
Parigi Moutong	235.958	225.618	461.576

Sumber: BPS, Parigi Moutong Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.15 dapat dikemukakan komposisi atau struktur umur penduduk Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2024 sebesar 58,16 persen berada pada kelompok umur 0-34 tahun atau sebanyak 268.433 jiwa, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Parigi Moutong dominan berada pada kelompok penduduk usia muda. Sementara untuk Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 tercatat sebesar 44,28 yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung kurang lebih 44 orang penduduk yang belum/tidak produktif.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga, Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator dan setiap variabel yang akan dianalisis terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator yang setiap variabel akan dianalisis menurut kebutuhan data akan disajikan berdasarkan Indikator aspek kesejahteraan masyarakat.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Distribusi PDRB menurut sektor, PDRB perkapita dan tingkat inflasi (Kota Palu).

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor PDRB

Perkembangan perekonomian nasional secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap perkembangan ekonomi pada tingkat regional, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten termasuk di kabupaten Parigi Moutong. Walaupun di sadari secara makro ekonomi tiap-tiap daerah mempunyai potensi dan keunggulan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan Hasil Penghitungan PDRB Kabupaten Parigi Moutong, Secara detail Data persentase Laju Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan 2010 Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terlihat sebagaimana tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan 2010 Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
a	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,77	3,63	2,27	2,40	2,83
b	Pertambangan dan Penggalian	-12,22	4,57	2,23	4,02	5,22
c	Industri Pengolahan	-1,01	2,08	3,27	2,69	3,53
d	Pengadaan Listrik dan Gas	3,17	4,04	7,21	6,87	7,53
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,07	4,49	3,12	3,31	3,92
f	Konstruksi	-9,62	4,99	4,50	2,63	3,30
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7,25	6,89	4,96	5,81	4,40
h	Transportasi dan Pergudangan	-32,42	4,53	14,44	5,34	6,60
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,37	8,06	8,67	8,20	6,40

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
j	Informasi dan Komunikasi	9,11	8,92	8,94	6,99	4,22
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,45	7,95	-0,74	1,68	9,08
l	Real Estat	0,53	2,66	6,01	5,82	5,24
m	Jasa Perusahaan	-2,72	1,60	5,69	5,55	5,15
n	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,62	5,67	0,01	3,16	1,21
o	Jasa Pendidikan	-1,83	4,19	1,63	4,58	2,76
p	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,42	4,05,	4,57	5,07	5,26
q	Jasa lainnya	-0,01	4,31	4,65	5,95	4,13
Produk Domestik Regional Bruto		-4,95	4,67	3,71	3,59	3,58

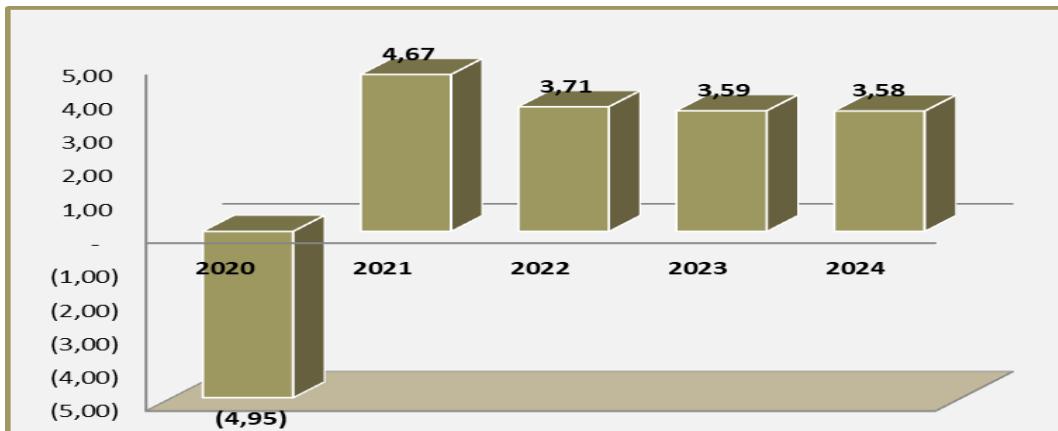
Sumber: PDRB Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dapat diketahui lebih lanjut tentang laju pertumbuhan PDRB ADH Konstan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 sebesar 3,58 persen. Capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2023 mencapai sebesar 3,59 persen. Jika dilihat dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi selama tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) sektor mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya diantaranya adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor konstruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan asuransi sebesar 9,08 persen. Adapun pertumbuhan lapangan usaha lainnya secara berturut-turut juga mengalami peningkatan, di antaranya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2,83 persen, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian 5,22 persen, Industri Pengolahan 3,53 persen, Pengadaan Listrik dan Gas 7,53 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3,92 persen, Konstruksi 3,30 persen, Transportasi dan Pergudangan 6,60 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,26 persen,

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Parigi Moutong masih sama selama lima tahun terakhir, terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Parigi Moutong. Sumbangan terbesar secara berturut turut dihasilkan oleh lapangan usaha usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 42,47 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 15,18 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,94 persen.

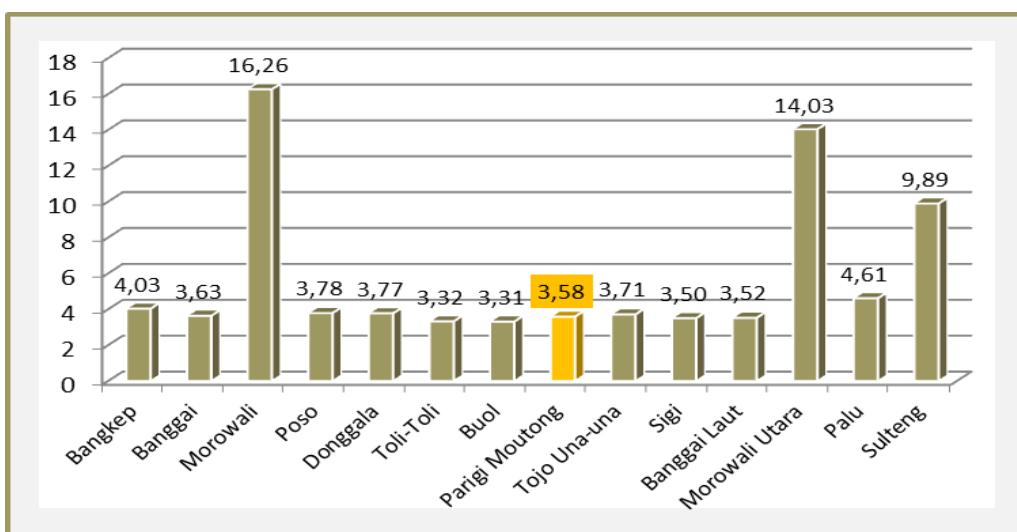
Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 11 persen, Berikut disajikan data persentase Laju Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan 2010 periode tahun 2020-2024 gambar 2.10 sebagaimana berikut.



Sumber: PDRB Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (diolah kembali)

**Gambar 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan 2010
Kabupaten Parigi Moutong (Persen) Tahun 2020-2024**

Kondisi perekonomian selama 5 (lima) tahun terakhir dalam perhitungan PDRB Kabupaten Parigi Moutong didominasi oleh tiga sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Parigi Moutong yaitu Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Sektor Konstruksi masih menjadi sektor unggulan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Parigi Moutong. Gambaran perbandingan atau peringkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong dibanding kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah disajikan gambar 2.11 berikut.



Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2025

**Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB-ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, Tahun 2024 (Persen)**

Berdasarkan gambar laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Parigi Moutong berada di bawah Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dengan laju pertumbuhan sebesar 9,89 persen sementara Kabupaten Parigi Moutong hanya sebesar 3,58 persen di tahun 2024.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kemajuan perekonomian Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dari gambaran perekonomian makro daerah ini, dimana secara makro laju pertumbuhan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta peningkatan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/region.

Data PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Kondisi perekonomian Kabupaten Parigi Moutong saat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB baik Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku maupun Atas Dasar Harga (ADH) Konstan, serta terciptanya laju pertumbuhan PDRB yang positif.

Gambaran perekonomian Kabupaten Parigi Moutong ditinjau dari PDRB ADH Berlaku Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 sebesar 23.475,94 Miliar rupiah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 21.664,14 juta rupiah, Lebih jelasnya mengenai gambaran data pertumbuhan PDRB ADH Berlaku dan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut.

**Tabel 2.17
PDRB-ADH Berlaku (Miliar Rupiah) Kabupaten Parigi Moutong
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.321,25	7.833,53	8.479,94	9.190,14	9.969,49
B	Pertambangan dan Penggalian	962,74	1.027,260	1.130,00	1.230,85	1.381,36
C	Industri Pengolahan	440,15	456,64	482,71	498,20	546,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,97	2,08	2,28	2,48	2,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,21	12,34	13,14	13,86	14,68
F	Konstruksi	2.196,26	2.372,44	2.560,57	2.750,27	3.037,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.591,07	2.793,04	3.045,00	3.324,08	3.563,71
H	Transportasi dan Pergudangan	774,49	818,06	1.010,00	1.102,76	1.212,20

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113,09	126,70	140,01	153,52	166,25
J	Informasi dan Komunikasi	457,92	502,77	549,170	586,97	620,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	157,59	176,78	190,28	196,02	214,57
L	Real Estat	174,30	185,68	202,64	230,53	256,79
M	Jasa Perusahaan	32,75	33,64	36,92	40,40	44,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	931,12	1.002,29	1.041,66	1.102,42	1.136,21
P	Jasa Pendidikan	591,91	622,39	650,53	688,50	723,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	250,85	275,38	297,74	324,44	342,45
R	Jasa lainnya	189,02	197,95	210,90	228,70	242,93
PDRB		17,197,68	18,438,95	20,061,50	21,664,14	23,475,94

Sumber: PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

Tabel 2.17 menunjukkan kondisi perekonomian selama lima tahun terakhir dalam perhitungan PDRB Kabupaten Parigi Moutong didominasi oleh tiga sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Parigi Moutong yaitu sektor pertanian, sektor Perdagangan dan sektor Konstruksi, Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Parigi Moutong dengan kontribusi yang paling tinggi dari tahun ke tahun, sektor Perdagangan merupakan sektor unggulan ke dua setelah sektor pertanian, perannya juga terus mengalami peningkatan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, Adapun sektor unggulan ke tiga yaitu sektor Konstruksi kemudian diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian.

Sedangkan PDRB ADH Konstan menunjukkan capaian 12.926,58 Miliar rupiah tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 12.479,50 Miliar rupiah. Pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 sebesar 3,58 persen menurun dibandingkan tahun sebelumnya 3,59 persen. Lebih detail data PDRB ADH Konstan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18
PDRB-ADH Konstan (Miliar Rupiah) Kabupaten Parigi Moutong
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.008,54	5.190,59	5.308,30	5.435,78	5.589,60
b.	Pertambangan dan Penggalian	554,51	579,84	592,79	616,65	648,87
c.	Industri Pengolahan	269,45	275,05	284,05	291,70	302,00
d.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,8	1,93	2,07	2,21	2,38
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	6,64	6,94	7,16	7,39	7,68

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
	Ulang					
f.	Konstruksi	1.337,71	1.404,51	1.467,71	1.506,36	1.556,00
g.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.626,21	1.738,25	1.824,42	1.930,51	2.015,55
h.	Transportasi dan Pergudangan	491,83	514,12	588,36	619,77	660,69
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	69,28	74,87	81,36	88,03	93,67
j.	Informasi dan Komunikasi	349,92	381,15	415,20	444,24	426,96
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	99,03	106,90	106,11	107,89	117,69
l.	Real Estat	119,60	122,78	130,16	137,73	144,95
m.	Jasa Perusahaan	21,05	21,39	22,60	23,86	25,09
n.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	526,64	556,53	556,58	574,18	581,11
o.	Jasa Pendidikan	356,43	371,36	377,427,3	394,71	405,62
p.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	149,54	155,60	162,71	170,96	179,96
q.	Jasa lainnya	110,25	115,00	120,36	127,52	132,79
PDRB		11.098,50	11.616,82	12.047,38	12.479,50	12.926,58

Sumber: PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

Selama kurun waktu 2020-2024, terdapat tiga sektor yaitu, sektor Pertanian, sektor Perdagangan dan konstruksi yang menjadi sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Parigi. Ketiga sektor tersebut dari tahun ke tahun masih menjadi andalan Kabupaten Parigi Moutong dalam pembentukan PDRB. Dimana kontribusi Sektor Pertanian tahun 2024 sebesar 42,47 persen selanjutnya diikuti oleh Sektor Perdagangan sebesar 15,18 persen dan terakhir yang ketiga tertinggi yaitu Sektor Konstruksi dengan nilai kontribusi sebesar 12,94 persen.

1. Kontribusi Sektor PDRB

Perkembangan kontribusi PDRB Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024 menunjukkan kondisi berfluktuasi. Berdasarkan peranan harga berlaku menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan dalam perkembangan perekonomian Parigi Moutong. Tabel berikut akan menyajikan distribusi persentase PDRB sektoral yang memperlihatkan sektor-sektor yang mendominasi perekonomian dan menjadi andalan Kabupaten Parigi Moutong dalam pembentukan PDRB ADH Berlaku sebagaimana tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19
Kontribusi PDRB-ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A,	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,57	42,48	42,36	42,42	42,47
B,	Pertambangan dan Penggalian	5,60	5,57	5,63	5,68	5,88

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
C,	Industri Pengolahan	2,56	2,48	2,41	2,30	2,33
D,	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E,	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
F,	Konstruksi	12,77	12,87	12,76	12,70	12,94
G,	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,07	15,15	15,18	15,34	15,18
H,	Transportasi dan Pergudangan	4,50	4,44	5,013	5,09	5,16
I,	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,66	0,69	0,70	0,71	0,71
J,	Informasi dan Komunikasi	2,66	2,73	2,74	2,71	2,64
K,	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,92	0,96	0,95	0,90	0,91
L,	Real Estat	0,01	1,01	1,01	1,06	1,09
M	Jasa Perusahaan	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19
O,	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,41	5,44	5,19	5,09	4,84
P,	Jasa Pendidikan	3,44	3,38	3,24	3,18	3,08
Q,	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,46	1,49	1,48	1,50	1,46
R	Jasa lainnya	1,10	1,07	1,05	1,06	1,03
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

Tabel Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menjelaskan bahwa Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Parigi Moutong Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha terdapat tiga sektor yang sangat dominan terhadap pembentukan total PDRB yaitu sektor pertanian sebesar 42,47 persen sektor perdagangan sebesar 15,18 persen dan sektor konstruksi sebesar 12,94 persen. Sementara sektor-sektor yang mempunyai andil lebih kecil dari satu persen adalah sektor listrik dan gas sebesar 0,01 persen, sektor Jasa Perusahaan 0,19 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,71 persen dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 0,91 persen.

Sektor lain yang juga mengalami pertumbuhan yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian yang terus meningkat dan juga sebagai penyumbang terbesar keempat dalam pembentukan PDRB Kabupaten Parigi Moutong dengan peranannya tercatat sebesar 5,88 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.20
Kontribusi PDRB-ADH Konstan (%) Kabupaten Parigi Moutong
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
A,	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45,13	44,68	44,06	43,56	43,24

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
B,	Pertambangan dan Penggalian	5,00	4,99	4,92	4,94	5,02
C,	Industri Pengolahan	2,43	2,37	2,36	2,34	2,34
D,	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E,	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F,	Konstruksi	12,05	12,09	12,18	12,07	12,04
G,	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,65	14,96	15,14	15,47	15,59
H,	Transportasi dan Pergudangan	4,43	4,43	4,88	4,97	5,11
I,	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,64	0,68	0,71	0,72
J,	Informasi dan Komunikasi	3,15	3,28	3,45	3,56	3,58
K,	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,89	0,92	0,88	0,86	0,91
L,	Real Estat	1,08	1,06	1,08	1,10	1,12
M	Jasa Perusahaan	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19
O,	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,79	4,62	4,60	4,50
P,	Jasa Pendidikan	3,21	3,20	3,13	3,16	3,14
Q,	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	1,34	1,35	1,37	1,39
R	Jasa lainnya	0,99	0,99	1,00	1,02	1,03
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

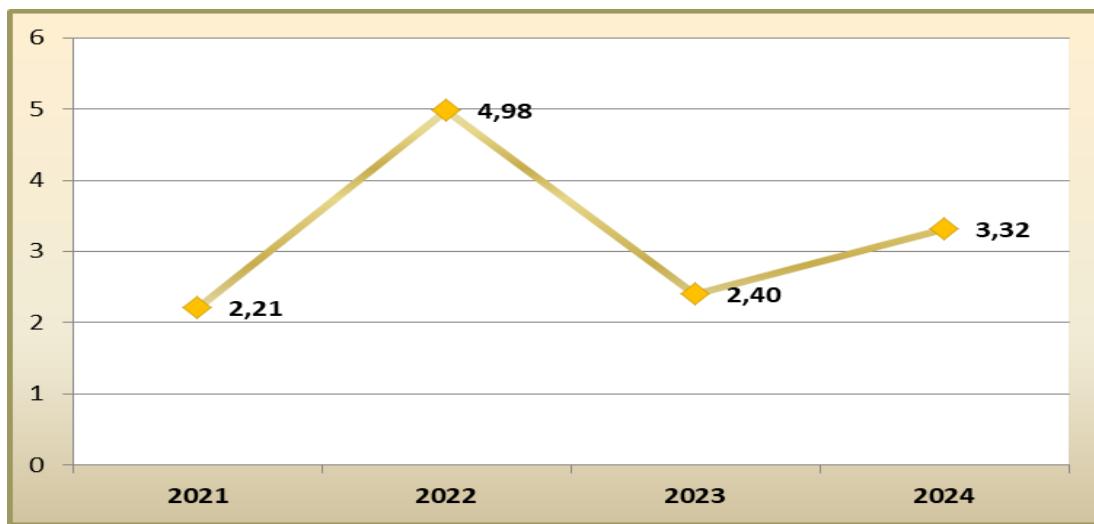
Sumber: PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

Kontribusi PDRB ADH Konstan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 Menurut Lapangan Usaha terdapat empat sektor yang sangat dominan terhadap pembentukan total PDRB yaitu Sektor Pertanian sebesar 43,24 persen, Sektor perdagangan sebesar 15,59 persen dan Sektor Konstruksi sebesar 12,04 persen. Sementara sektor-sektor yang mempunyai andil lebih kecil dari satu persen adalah Sektor Listrik dan Gas sebesar 0,02 persen, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah sebesar 0,06 persen, sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,19, Sektor Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,72 persen dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,91 persen.

C. Tingkat Inflasi

Pembangunan sektor ekonomi sangat tergantung pada keadaan fiskal dan moneter, jika keadaan tersebut tidak terkendali akan mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menurun, atau sebagai pertanda bahwa nilai uang semakin merosot. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen) perbulan. Ada banyak indikator yang dapat mengukur pembangunan, baik itu indikator ekonomi maupun indikator sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan atau

penurunan jumlah rumah tangga/ masyarakat miskin adalah Inflasi. Perubahan inflasi menyebabkan harga-harga semakin meningkat dan membebani daya beli masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. Berikut disajikan gambar laju inflasi tahun 2021-2024.



Sumber: BPS Kabupaten Parigi Moutong

**Gambar 2.12
Inflasi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021-2024**

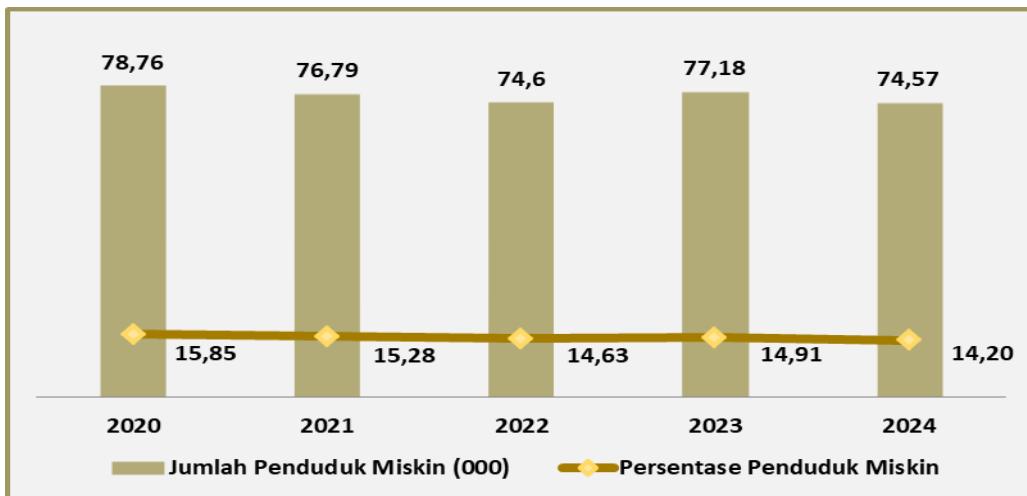
Capaian angka inflasi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 sebesar 4,98 dan pada tahun 2023 angka inflasi Kabupaten Parigi Moutong menurun menjadi sebesar 2,40, dan pada tahun 2024 naik menjadi 3,32. Terjadinya inflasi secara langsung mempengaruhi harga-harga barang di Kabupaten Parigi Moutong.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok transportasi.

D. Persentase Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2023 sebesar 14,91 persen persentase penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong dan hingga tahun 2024 Persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,20 persen sementara itu jumlah penduduk miskin jika di lihat dari trend lima tahun terakhir mengalami penurunan dari total jumlah penduduk sebesar 461.576 tahun

2024 ada sebanyak 74 ribu jumlah penduduk miskin. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 77,18 ribu. Angka perkembangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut.



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia 2024/BPS Nasional (diolah kembali)

Gambar 2.13
Data Perkembangan Angka Kemiskinan
Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2020-2024

Batas garis kemiskinan untuk Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 sebesar 553.012 rupiah perkapita sebulan, artinya setiap penduduk yang memiliki total pengeluaran perbulan (makanan + non makanan) kurang dari 553.012 rupiah dimasukan kedalam penduduk miskin. Untuk tahun 2024 persentase penduduk miskin Kabupaten se Sulawesi Tengah menempatkan Kabupaten Parigi Moutong berada pada posisi keempat yang memiliki angka penduduk miskin tertinggi dengan angka penduduk miskin sebesar 14,20 persen atau 74 Ribu jiwa pada tahun 2024. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi yakni Kabupaten Tojo Una-una mencapai 16,36 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan jumlah penduduk miskin antar Kabupaten di Sulawesi Tengah disajikan pada tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21
Penduduk Miskin (persen) Menurut
Kabupaten Se Sulawesi Tengah, Tahun 2020-2024

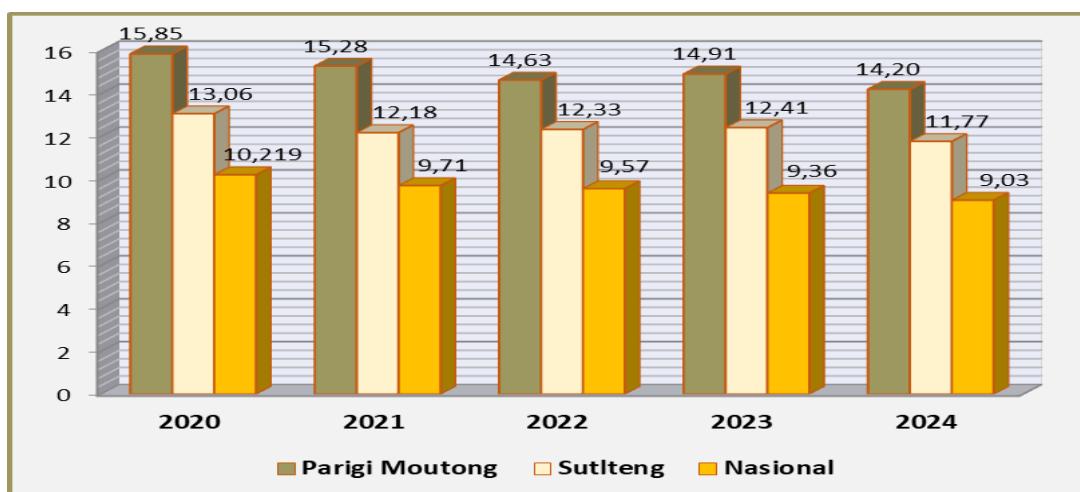
Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
BangKep	14,04	13,72	13,44	12,90	12,32
Banggai	7,39	7,83	7,33	6,94	6,56
Morowali	13,43	13,75	12,58	12,31	11,55
Poso	15,45	15,92	15,18	15,16	14,23
Donggala	17,39	16,73	16,3	16,25	15,3

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Toli-Toli	12,85	13,51	12,74	12,85	12,45
Buol	13,93	14,06	12,85	13,36	13,08
Parigi Moutong	15,85	15,28	14,63	14,91	14,20
Tojo Una-una	16,39	16,6	16,12	16,74	16,36
Sigi	12,45	13,05	12,3	12,83	12,06
Banggai Laut	14,6	14,17	13,17	14,15	13,78
Morowali Utara	14,1	13,9	12,97	12,85	11,95
Palu	6,8	7,17	6,63	6,56	5,94

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia 2024/BPS Nasional (diolah kembali)

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

Secara umum gambaran kemiskinan dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi pengeluaran makanan dan bukan makanan, tingkat kebutuhan permintaan/(*demand*) terhadap pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, terdapat kecenderungan untuk mendahulukan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk mengkonsumsi makanan. Berikut ini disajikan data perbandingan angka kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong dan Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 sebagaimana pada gambar 2.14 berikut.



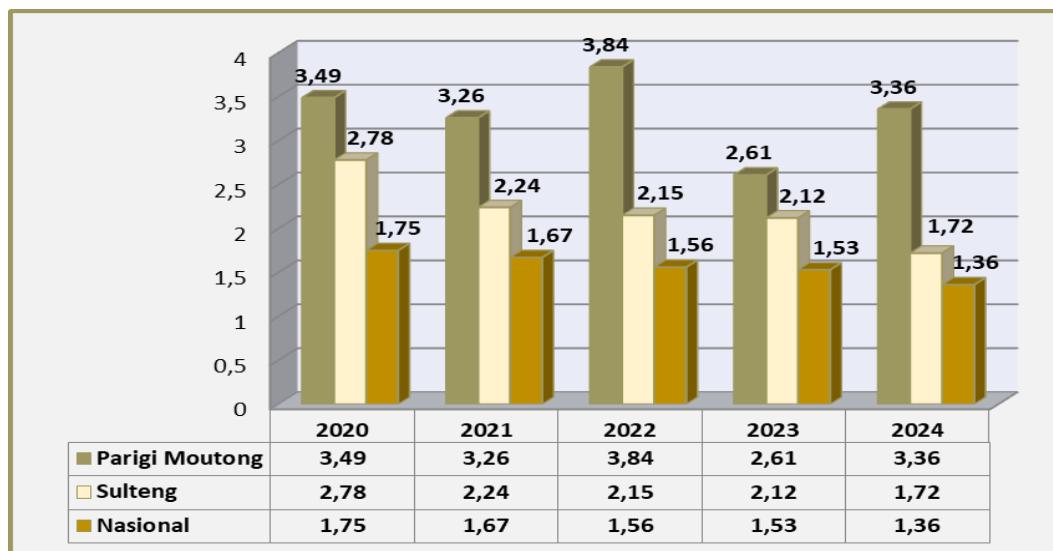
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia 2024/BPS Nasional (diolah kembali)

Gambar 2.14
**Perbandingan Persentase Masyarakat Miskin
Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024**

Persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah pada tahun 2024 mencapai 11,77 persen, angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama persentase masyarakat miskin Kabupaten Parigi Moutong menurun dari tahun sebelumnya yakni mencapai sebesar 14,20 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah cukup berhasil dalam upaya menekan angka kemiskinan.

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2022-2024 mengalami fluktuatif dari 3,84 pada tahun 2022 menjadi 2,61 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 3,36. Namun secara konsisten tahun 2024, P1 Kabupaten Parigi Moutong berada di atas capaian Sulawesi Tengah dan di atas capaian Nasional, Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong sedikit mengalami penurunan dan mendekati garis kemiskinan, Perkembangan P1 di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dan Nasional secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.15 berikut,



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia 2024/BPS Nasional (diolah kembali)

Gambar 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Capaian P1 Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 berada pada peringkat pertama (3,36). Daerah dengan indeks kedalaman kemiskinan terendah yaitu Kota Palu (0,65) Lebih

lengkapnya gambaran mengenai data indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada tabel 2.22 berikut,

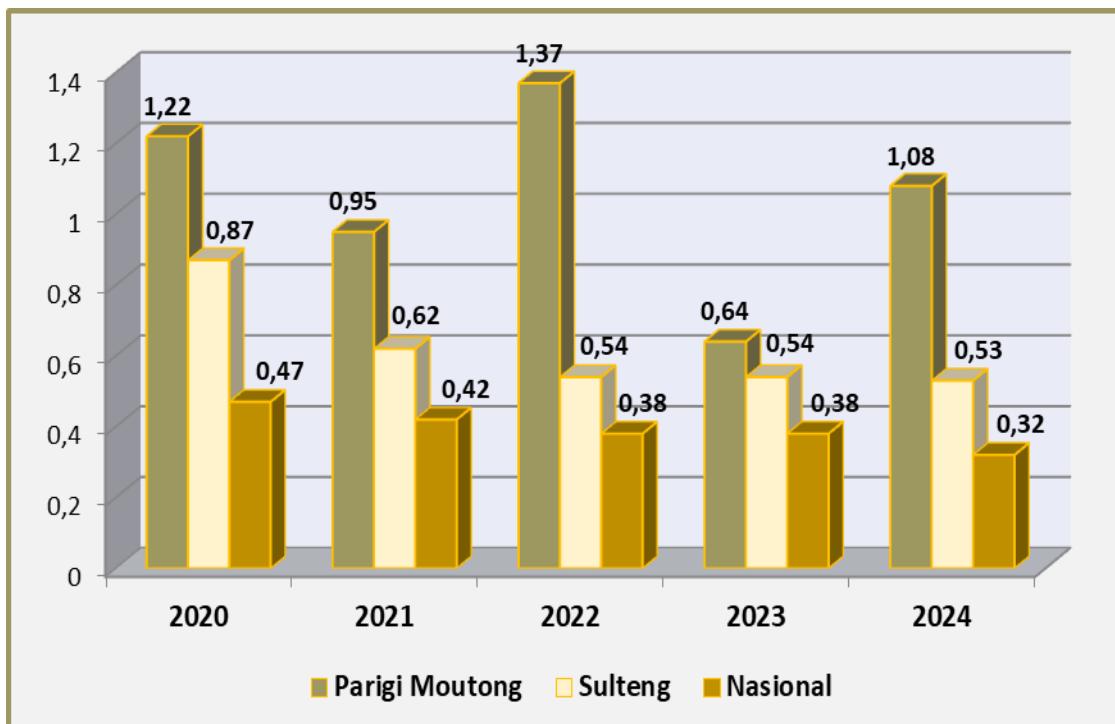
Tabel 2.22
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
BangKep	1,99	1,89	1,79	2,23	1,26
Banggai	1,05	1,09	1,2	0,80	0,86
Morowali	2,48	2,11	2,03	1,52	1,79
Poso	2,53	2,57	2,4	2,58	1,97
Donggala	3,01	2,76	2,82	2,65	3
Toli-Toli	2,33	1,66	1,53	1,59	1,73
Buol	1,97	2,01	1,79	1,63	2,2
Parigi Moutong	3,49	3,26	3,84	2,61	3,36
Tojo Una-una	3,27	3,25	2,8	2,42	2,04
Sigi	1,96	1,7	2,01	2,40	2,52
Banggai Laut	1,59	2,93	2,23	1,82	1,76
Morowali Utara	2,95	2,35	2,18	2,33	1,89
Palu	0,97	0,86	0,94	0,84	0,65
Sulteng	2,78	2,24	2,15	2,12	1,72

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia 2024/BPS Nasional (diolah kembali)

2. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2023 sebesar 0,64 dan pada tahun 2024 naik menjadi 1,08. Secara konsisten pada tahun 2024, P2 Kabupaten Parigi Moutong berada di atas capaian Sulawesi Tengah dan Nasional, Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan antar penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong kurang baik, Jika dikaitkan dengan P1 yang juga semakin meningkat, maka hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong belum membaik dan belum merata, Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan secara rinci dapat dilihat gambar 2.16 berikut.



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia 2024/BPS Nasional (diolah kembali)

Gambar 2.16
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah, capaian P2 Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 menempati angka pertama tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yakni sebesar 1,08. Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut,

Tabel 2.23
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
BangKep	0,47	0,42	0,35	0,63	0,22
Banggai	0,21	0,23	0,28	0,17	0,17
Morowali	0,67	0,54	0,54	0,32	0,43
Poso	0,68	0,62	0,66	0,63	0,45
Donggala	0,79	0,7	0,72	0,63	0,75
Toli-Toli	0,63	0,30	0,3	0,36	0,42
Buol	0,47	0,51	0,34	0,32	0,47
Parigi Moutong	1,22	0,95	1,37	0,64	1,08
Tojo Una-una	1,03	0,95	0,78	0,52	0,40
Sigi	0,49	0,38	0,48	0,64	0,70
Banggai Laut	0,36	0,83	0,61	0,44	0,35
Morowali Utara	1,02	0,60	0,65	0,71	0,39
Palu	0,22	0,20	0,25	0,19	0,09
Sulteng	0,87	0,62	0,54	0,54	0,53

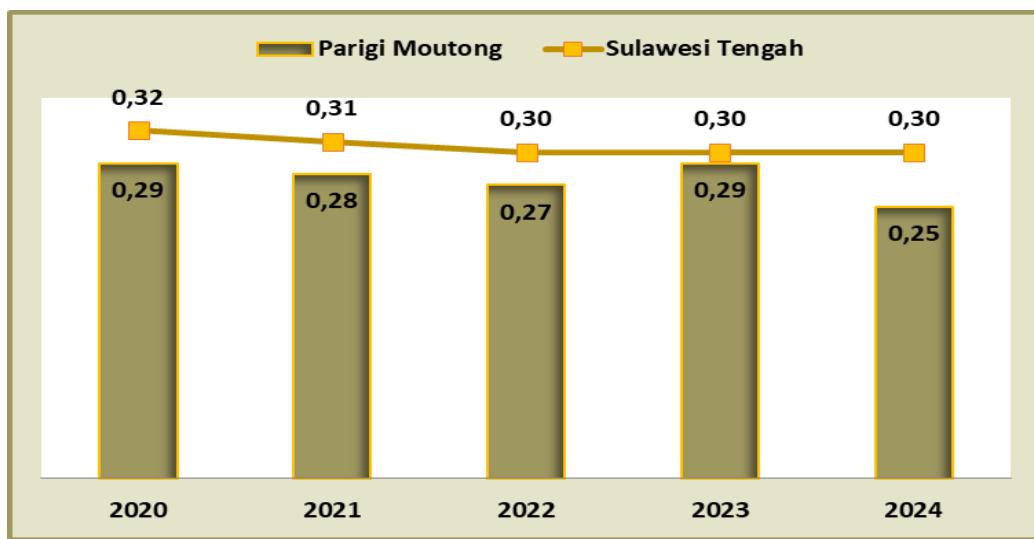
Sumber: BPS Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia 2024/BPS Nasional (diolah kembali)

E. Indeks Gini

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah rasio Gini (*gini ratio*) dan kriteria Bank Dunia. Nilai Gini ratio berkisar antara nol dan satu, Bila rasio Gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan sangat merata karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Secara grafis, ditunjukan oleh berimpitnya kurva Lorens dengan garis kemerataan sempurna, Bila rasio gini sama dengan satu, menunjukan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna, karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Kriteria bank dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan : a) **Tinggi**; bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12 persen bagian pendapatan; b) **Sedang**; bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima 12-17 persen bagian pendapatan; c) **Rendah**; bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17 persen bagian pendapatan.

Apabila rasio Gini = 0, berarti pembagian pendapatan merata sempurna, tetapi jika rasio Gini = 1, berarti pembagian pendapatan timpang total, Menurut kriteria BPS, Ketimpangan "rendah" bila indeks Gini kurang dari 0,35, Ketimpangan "sedang" bila indeks Gini antara 0,35-0,5, dan Ketimpangan " tinggi" bila indeks Gini di atas 0,5.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2025

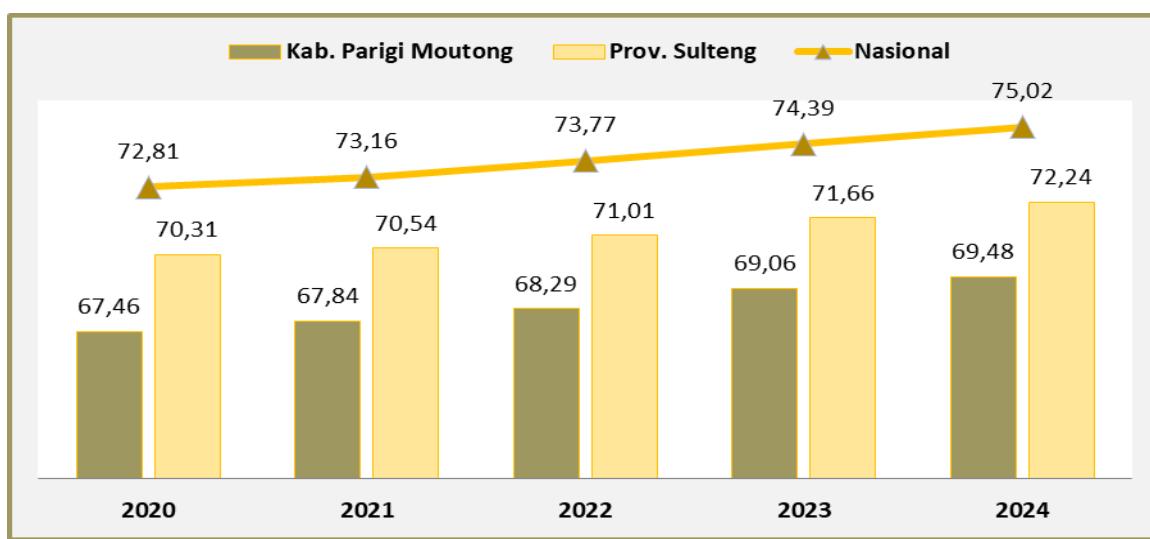
Gambar 2.17
Indeks Rasio Gini Kabupaten Kabupaten Parigi Moutong
Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.17, dapat diketahui Indeks Rasio Gini Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan di mana Pada Tahun 2020 sebesar 0,29 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,27 namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,29 dan pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 0,25 ini berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih relatif rendah.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada dasarnya IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH), yaitu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen: (1) Angka Harapan Hidup (el), (2) Harapan Lama Sekolah (Tahun) , dan (3) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) dan (4), Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).

Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Parigi Moutong sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Sementara capaian IPM tahun 2024 dengan model perhitungan baru Kabupaten Parigi Moutong berada pada urutan 9 dari 13 Kabupaten/Kota dengan nilai IPM sebesar 69,48 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dapat terlihat dari tiga indikator utama yaitu: Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli, Data perbandingan capaian IPM Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dan Nasional selama periode 2020-2024 sebagaimana gambar 2.18 berikut:



Sumber: Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2025

**Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Parigi Moutong
Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2020–2023**

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Parigi Moutong dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan namun masih berada di bawah capaian IPM Provinsi dan IPM Nasional. Tahun 2023 Indeks pembangunan manusia Kabupaten Parigi Moutong sebesar 69,06 sementara itu IPM untuk Sulawesi Tengah sebesar 71,66 dan nasional sebesar 74,39. Pada tahun 2024 Indeks pembangunan manusia Kabupaten Parigi Moutong meningkat yaitu sebesar 69,48 dan lebih rendah dari IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 72,24. Untuk melihat posisi Kabupaten Parigi Moutong dibanding Kabupaten/kota lainnya lebih jelasnya gambaran mengenai capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terlihat pada table 2.24 berikut:

Tabel 2.24
Posisi Peringkat IPM Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024

Kabupaten/ Kota	Tahun					Pertumbuhan 2023-2024(%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BangKep	65,61	65,82	66,30	67,05	67,65	0,89
Banggai	71,01	71,09	71,58	72,19	72,86	0,93
Morowali	73,06	73,12	73,39	73,82	74,36	0,73
Poso	72,10	72,27	72,75	73,25	73,65	0,55
Donggala	66,80	66,96	67,49	68,17	68,71	0,79
Toli-Toli	67,70	68,31	68,77	69,68	70,38	1,00
Buol	68,49	68,92	69,37	70,18	70,89	1,01
Parigi Moutong	67,46	67,84	68,29	69,06	69,48	0,61
Tojo Una-una	66,67	66,81	67,62	68,47	69,65	1,75
Sigi	68,48	68,84	69,40	70,28	70,90	0,88
Banggai Laut	67,60	67,82	68,40	69,12	69,65	0,77
Morowali Utara	69,42	69,52	70,02	70,74	71,64	1,27
Palu	82,74	82,96	83,26	83,71	84,12	0,49
Sulteng	70,31	70,54	71,01	71,66	72,24	0,81

Sumber: Sumber: Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2025

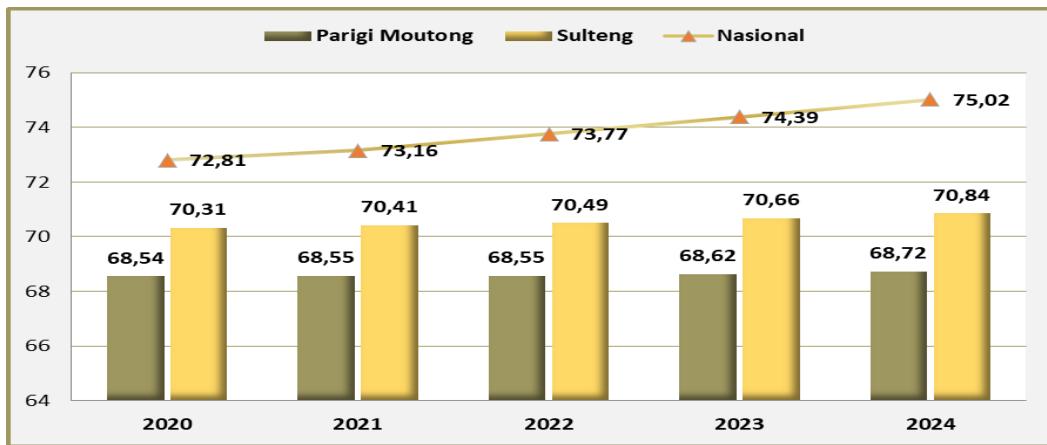
Kondisi IPM Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar 71,24 poin yang masih di bawah rata-rata nasional sebesar 75,02. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2024 masih jauh tertinggal dibanding pembangunan manusia di sebagian besar Provinsi se-Indonesia.

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama waktu atau usia seseorang untuk hidup yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan derajat kesehatan masyarakat. Untuk data Usia Harapan Hidup Kabupaten Parigi Moutong tahun 2021 yaitu

sebesar 68,54 tahun, Selanjutnya pada tahun 2022 tetap diangka 68,55, pada tahun 2023 menjadi sebesar 68,62 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 68,72. lebih jelasnya data mengenai perbandingan UHH Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah secara rinci sebagaimana terlihat pada gambar 2.19 berikut.



Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Prov, Sulawesi Tengah 2025 (diolah kembali)

Gambar 2. 19
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH)
Parigi Moutong dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan data perbandingan capaian UHH Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024, di ketahui bahwa UHH di Kabupaten Parigi Moutong menempati peringkat ke 12 (dua belas) dengan angka UHH sebesar 68,72. Data mengenai perbandingan UHH antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 2.25 berikut.

Tabel 2. 25
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Parigi Moutong
dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bangkep	66,71	67,03	67,19	67,35	67,54
Banggai	71,95	71,95	71,95	72,09	72,26
Morowali	70,93	70,95	70,95	71,00	71,09
Poso	72,97	72,97	72,97	72,98	73,02
Donggala	70,08	70,22	70,32	70,52	70,74
Toli-Toli	70,23	70,49	70,71	71,09	71,31
Buol	70,23	70,49	70,73	71,06	71,30
Parigi Moutong	68,54	68,55	68,55	68,62	68,72
Tojo Una-una	70,23	70,44	70,60	70,89	71,05
Sigi	70,80	70,87	70,91	71,11	71,33
Banggai Laut	70,06	70,34	70,48	70,75	71,04
Morowali Utara	71,95	72,02	72,06	72,19	72,35
Palu	73,46	73,49	73,56	73,71	73,91
Sulteng	70,31	70,41	70,49	70,66	70,84

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Prov, Sulawesi Tengah 2025 (diolah kembali)

2.2.2.2. Balita Gizi Buruk

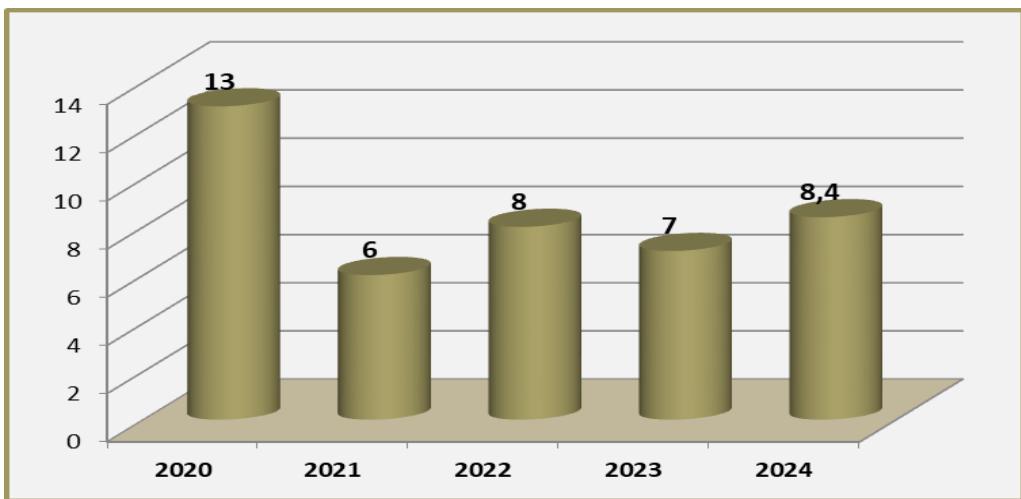
Jumlah prevalensi balita gizi buruk di kabupaten Parigi Moutong mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir, Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2024 prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Parigi Moutong sebesar 8,7 persen (SSGI) dimana mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,7 persen (SKI) pada tahun 2023. Hal ini memberikan gambaran bahwa upaya yang dilakukan dinas terkait untuk Pemantauan Status Gizi (PSG) anak balita di Kabupaten Parigi Moutong yang berhubungan dengan pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, sanitasi, pola asuh anak dan ketahanan pangan rumah tangga sudah berjalan efektif.

Tabel 2.26
Data Prevalensi Wasting dan Stunting Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2021-2024 (Persen)

Tahun	SSGI		SKI	
	Wasting	Stunting	Wasting	Stunting
2020	7,8	11,4	-	-
2021	9,8	31,7	-	-
2022	12,3	27,4	-	-
2023			12,7	28,5
2024	8,7	22,3	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan kabupaten parigi Moutong, Tahun 2025 (diolah kembali)

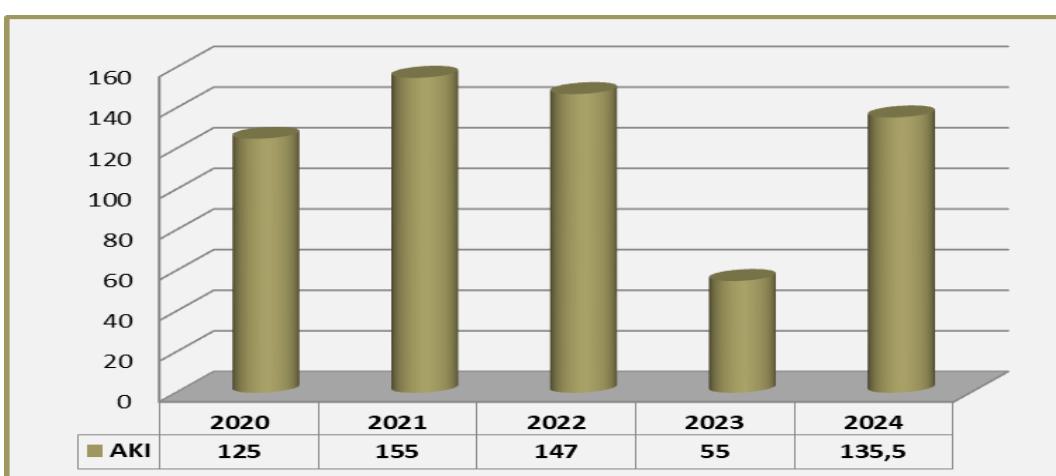
Angka kematian bayi di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2020 sebesar 13 per 1,000 kelahiran hidup, angka ini mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu sebesar 7 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2024 Angka kematian bayi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 8,4 per 1,000 kelahiran hidup. Meskipun demikian hal ini menunjukkan angka kematian bayi terus mengalami penurunan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu ≤ 19 per 1,000 kelahiran hidup, maka capaian kinerjanya mencapai 100 persen menunjukkan keberhasilan. Data perkembangan kematian bayi per 1,000 kelahiran hidup dapat dilihat pada gambar 2.20 berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan kabupaten parigi Moutong Tahun 2025

**Gambar 2.20
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024**

Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2020 sebesar 125 per 100,000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022 angka kematian ibu meningkat menjadi sebesar 147 per 100,000 kelahiran hidup pada tahun 2023 angka kematian ibu turun menjadi sebesar 55 per 100,000 kelahiran hidup dan pada tahun 2024 angka ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 135,5 per 100,000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh pertolongan yang lambat pada keadaan darurat, yang berhubungan dengan lokasi kelahiran dan proses pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan tenaga ahli dan deteksi awal serta upaya pencegahan yang kurang maksimal untuk penyakit komplikasi kehamilan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2025

**Gambar 2.21
Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024**

2.2.2.3. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan antar umat beragama di suatu wilayah, Indeks ini dihitung

berdasarkan berbagai faktor yang mencerminkan toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat beragama.

Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Indeks Kerukunan Umat Beragama mencapai nilai skoring 90, hal ini menunjukkan bahwa toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Parigi Moutong sangat baik.

2.2.2.4. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Parigi Moutong ditujukan untuk melestarikan kebudayaan daerah serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global yang cukup negatif. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Parigi Moutong memasuki kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah lokal, namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Parigi Moutong seperti halnya kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar sehingga solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja "jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan". Penyelenggaraan urusan kebudayaan di tingkat Kabupaten terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.27
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15	25	25	29	37
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah	15	35	35	41	51

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025 (data diolah kembali)

2.2.2.5. Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Rasio KDRT semakin menurun hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap

permasalahan KDRT dan telah adanya jejaring dalam penanganan KDRT. Indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2020-2024 Kabupaten Parigi Moutong

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus)	132	100	63	66	69
Rasio KDRT	0,006	0,002	0,012	0,004	0,005

Sumber: Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab, Parigi Moutong, 2025

Tabel 2.28 menunjukkan capat atas sejumlah indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020-2024. Pertama penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tahun 2022 sebesar 63 kasus dan menjadi sebesar 66 kasus pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 69 kasus, kedua rasio KDRT tahun 2023 sebesar 0,004 dan ditahun 2024 menjadi sebesar 0,005.

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender

Peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sangat penting dilakukan demi terwujudnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Ketika keluarga memiliki kualitas yang baik, setiap anggota keluarga akan lebih mampu memahami pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Kualitas keluarga yang baik juga lebih memungkinkan kesetaraan gender terwujud, Penerapan kesetaraan gender dalam keluarga dengan berbagai peran dan menghargai satu sama lain dapat membuat keluarga lebih harmonis dan bahagia.

Beberapa isu strategis dalam peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Parigi Moutong diantaranya adalah kesenjangan gender, kondisi ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pembangunan Gender, Indikator ini di sajikan pada tabel 2.29 berikut ini :

Tabel 2.29
Kondisi Kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga					

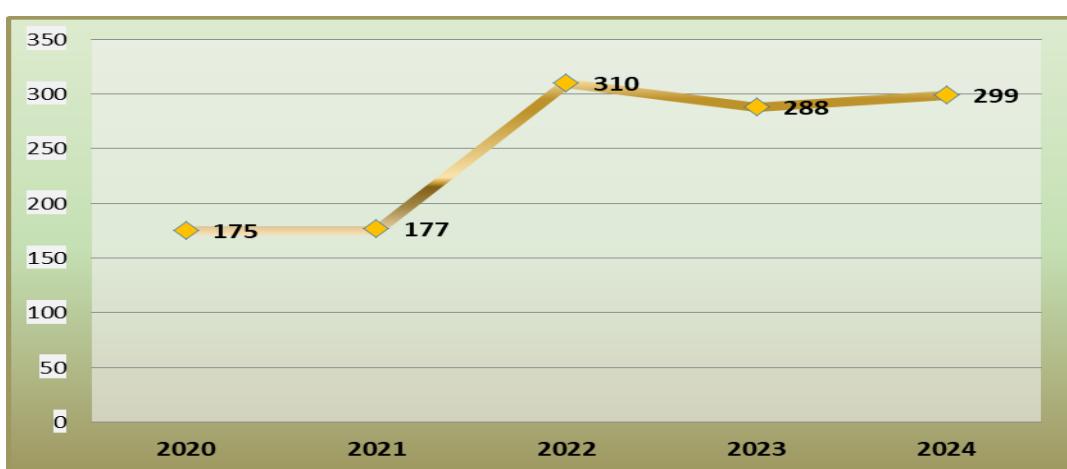
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Indeks Ketimpangan Gender	0,589	0,547	0,538	0,528	0,510
3	Indeks Pembangunan Gender	91,41	92,61	92,86	92,74	92,66

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

2.2.2.7. Pembangunan Kepemudaan

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program yaitu peningkatan peran serta kepemudaan. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan, dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat Kabupaten yang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemuda dan membangun karakter pemuda yang ada di suatu daerah adalah dengan mendorong pemuda untuk aktif dalam berorganisasi. Berdasar pada gambar di bawah ini, diketahui terjadi peningkatan jumlah Organisasi pemuda (karang Taruna) di Kabupaten Parigi Moutong dua tahun terakhir. Jumlah organisasi karang taruna di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 yakni sebanyak 288 organisasi pemuda dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang menjadi 299 organisasi pemuda.



Sumber: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayan dan Pariwisata, 2025 (data diolah kembali)

Gambar 2.22
Jumlah Organisasi Pemuda
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

2.3. ASPEK DAYA SAIING

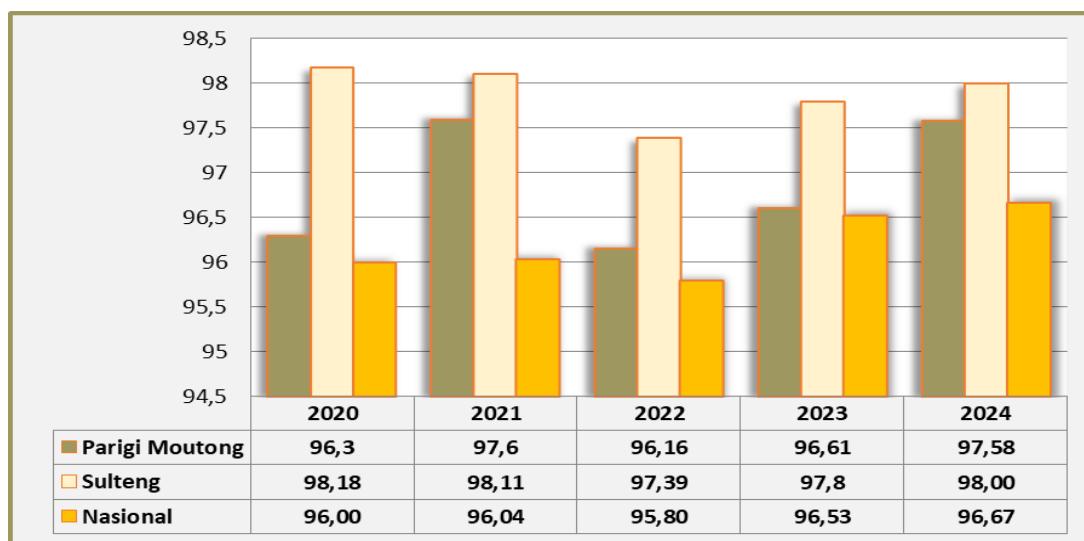
Daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menarik dan mempertahankan investasi, menciptakan lapangan usaha, serta menghasilkan output yang berdaya saing baik ditingkat regional, maupun nasional dan internasional. Tingkat daya saing daerah yang tinggi menunjukkan bahwa wilayah memiliki kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan yang kodusif untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) adalah fondasi utama dalam membangun kekuatan daerah yang berkelanjutan. Sumber Daya Manusia (*human resources*) yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus menjadi fokus perhatian dan tujuan dalam pembangunan daerah. SDM yang unggul ditandai oleh kemampuan dan etos kerja yang tinggi, meliputi keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, serta kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu dan teknologi inovatif dalam rangka mendorong pelaksanaan Pembangunan daerah dan nasional.

2.3.1.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia, Peningkatan wawasan pengetahuan masyarakat amat dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan menulis. Keterampilan baca tulis ini dibutuhkan untuk mempelajari dan menguasai keterampilan lainnya, Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat seperti pada gambar 2.23 berikut,



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov, Sulawesi Tengah 2024 dan BPS Nasional (diolah kembali)

Gambar 2.23
Perbandingan Angka Melek Huruf Parigi Moutong
Usia 15 Tahun Ke Atas, Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2020-2024

Perkembangan Angka melek huruf Kabupaten Parigi Moutong masuk kategori baik karena berada di atas posisi capaian jika dibandingkan dengan capaian Nasional. Indikator tersebut menentukan indeks capaian komponennya, dimana indeks melek huruf Kabupaten Parigi Moutong tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, Jika dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,60 tahun 2021, turun menjadi 96,16 pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 96,61 tahun 2023 dan pada tahun 2024 naik menjadi 97,58. Meski demikian indeks melek huruf Kabupaten Parigi Moutong semakin kecil perbedaannya indeks melek huruf Provinsi Sulawesi Tengah dan indeks referensi dengan nilai idealnya 100.

Berdasarkan perbandingan angka melek huruf kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 berada pada urutan ke sepuluh dengan nilai angka melek huruf sebesar 97,58 sementara daerah dengan angka melek huruf tertinggi adalah Kota Palu dengan angka melek huruf sebesar 99,64 persen dan daerah dengan urutan angka melek huruf terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan. Lebih lengkapnya data perbandingan angka melek huruf setiap kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30
Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Parigi Moutong
dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng Tahun 2020-2024

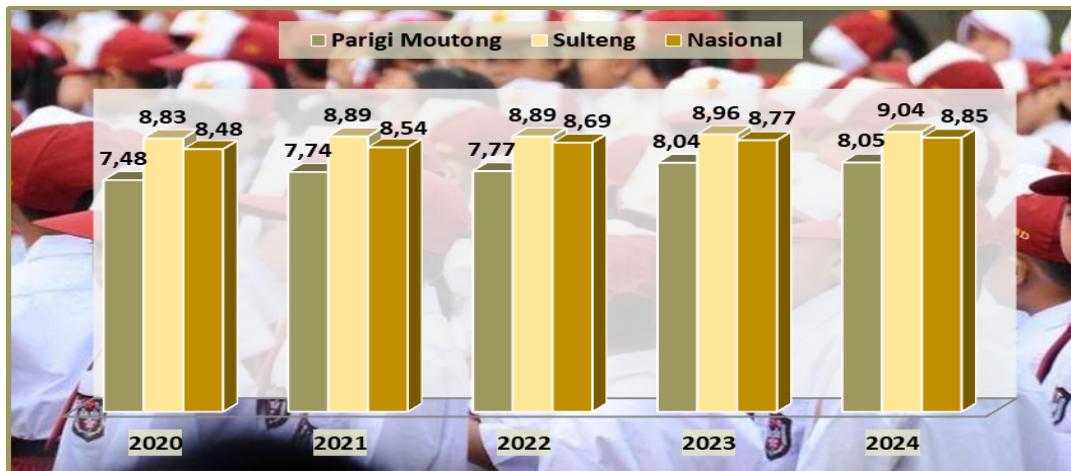
Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
BangKep	97,45	96,38	95,72	96,93	96,22
Banggai	98,36	97,27	95,96	96,92	96,52
Morowali	98,83	98,47	99,13	98,35	99,07
Poso	98,79	98,57	98,35	98,69	97,93
Donggala	97,67	98,64	96,56	97,32	97,00
Toli-Toli	98,14	97,41	96,67	97,04	97,61
Buol	99,29	98,77	98,94	99,21	98,72
Parigi Moutong	96,30	97,60	96,16	96,61	97,58
Tojo Una-una	99,40	98,33	98,59	98,32	99,30
Sigi	97,80	96,86	97,86	97,43	98,10
Banggai Laut	99,01	97,27	98,08	98,06	99,10
Morowali Utara	97,16	98,57	97,78	97,73	99,27
Palu	99,78	100,00	99,07	99,75	99,64
Sulteng	98,18	98,11	97,39	97,80	98,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Sulawesi Tengah 2024 (diolah kembali)

2.3.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Pada indikator ini terlihat rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Parigi Moutong pada keadaan tahun 2020 tercatat 7,48 tahun, angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 7,74 ditahun 2021 selanjutnya meningkat sampai tahun 2024 menjadi sebesar 8,05. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada

kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah sudah cukup tinggi dan makin meningkat. Dengan kata lain penduduk usia produktif di Kabupaten Parigi Moutong memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan semakin meningkat, Hal ini dapat dilihat seperti pada gambar 2.24 berikut.



Sumber: BPS Nasional (diolah kembali)

**Gambar 2.24
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024**

Pada Gambar 2.26 angka rata-rata lama sekolah terlihat perbandingan rata-rata lama sekolah Kabupaten Parigi Moutong dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional tahun 2024, Dimana posisi rata-rata lama sekolah Kabupaten Parigi Moutong lebih rendah dari provinsi dan angka nasional. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 8,05, angka ini masih jauh dari program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah yakni wajib belajar 12 tahun.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia sekolah memiliki rata-rata lama sekolah relative sedang, Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota rata-rata lama sekolah Kabupaten Parigi Moutong tergolong menengah. Gambaran mengenai rata-rata lama sekolah Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten lainnya dapat dilihat pada tabel. 2.31 berikut.

**Tabel 2.31
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Parigi Moutong
dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng Tahun 2020-2024**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
BangKep	8,43	8,44	8,46	8,62	8,70
Banggai	8,52	8,53	8,54	8,63	8,81
Morowali	9,33	9,34	9,35	9,37	9,38

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Poso	9,41	9,50	9,52	9,53	9,54
Donggala	7,97	7,98	7,98	7,99	8,00
Toli-Toli	8,51	8,76	8,76	8,77	8,91
Buol	8,86	9,08	9,08	9,09	9,20
Parigi Moutong	7,48	7,74	7,77	8,04	8,05
Tojo Una-una	8,39	8,40	8,41	8,51	8,56
Sigi	8,60	8,82	8,84	9,03	9,04
Banggai Laut	8,62	8,63	8,63	8,64	8,65
Morowali Utara	8,71	8,72	8,75	8,94	9,13
Palu	11,61	11,72	11,73	11,74	11,75
Sulteng	8,83	8,89	8,89	8,96	9,04

Sumber: BPS Nasional (diolah kembali)

2.3.1.3. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) dan daya saing sumber daya manusia (SDM) saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial. Tingkat Ketergantungan Penduduk adalah rasio antara jumlah penduduk yang tidak produktif (kelompok usia non-produktif) dengan jumlah penduduk yang produktif (kelompok usia produktif). Ketika tingkat ketergantungan tinggi, artinya ada banyak penduduk non-produktif (anak-anak atau lansia) dibandingkan dengan tenaga kerja produktif. Hal ini menjadi beban ekonomi yang lebih besar bagi tenaga kerja produktif. Beban ekonomi yang tinggi dapat mengurangi kemampuan tenaga kerja produktif untuk berinvestasi dalam pendidikan. Hal ini dapat menghambat peningkatan daya saing SDM. Namun, ketika tingkat ketergantungan rendah, maka lebih banyak sumber daya dapat dialokasikan untuk investasi dalam Pendidikan.

Tingkat ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau pihak lain yang menanggungnya. Sementara itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif, atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Gambaran lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Parigi Moutong tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32
Rasio Tingkat Ketergantungan Penduduk
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk Usia < 15 tahun	93,527	93,844	111,124	115.192	115.013
Jumlah penduduk Usia > 64 tahun	24,538	24,903	24,158	25.028	26.645
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	118,065	116,515	135,282	140.220	141.658
Jumlah penduduk Usia 15-64 Tahun	323,859	319,966	311,430	316.812	319.918
Jumlah Penduduk Keseluruhan	440,015	443,170	446,712	457.031	461.576
Rasio Ketergantungan	43,55	43,48	43,44	44,26	44,28

Sumber: Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2025 (diolah kembali)

Tabel 2.32 menunjukkan tabel rasio tingkat ketergantungan penduduk terlihat struktur umur dikelompokkan menjadi kelompok usia produktif (15-64 tahun) dan usia non produktif (0-14 tahun dan >64 tahun). Jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 dan turun ditahun 2024. Sedangkan Jumlah penduduk usia di atas 64 tahun menunjukkan sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk usia tidak produktif (gabungan usia < 15 tahun dan > 64 tahun) mengalami fluktuasi tetapi cenderung meningkat secara keseluruhan. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan penurunan pada 2022 dan kenaikan kembali pada 2024. Jumlah penduduk keseluruhan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi cenderung meningkat pada 2024. Rasio ketergantungan menunjukkan penurunan ditahun 2022, tetapi sedikit meningkat kembali pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan proporsi penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif selama periode 2020-2024.

Kenaikan signifikan dalam jumlah penduduk usia < 15 tahun menunjukkan adanya tren pertumbuhan populasi muda yang dapat mempengaruhi kebutuhan untuk infrastruktur pendidikan dan perencanaan masa akan datang. Untuk penduduk usia > 64 tahun tidak menunjukkan perubahan besar, peningkatan dalam kelompok ini dari tahun ke tahun dapat menandakan kebutuhan untuk program-program pensiun dan layanan kesehatan lansia yang lebih baik. Kenaikan jumlah penduduk usia tidak produktif menunjukkan adanya tekanan tambahan pada kelompok usia produktif, yang dapat mempengaruhi perencanaan ekonomi dan sosial. Fluktuasi jumlah penduduk usia 15-64 Tahun dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja dan kebijakan ekonomi, terutama dalam hal penyediaan pekerjaan. Sedangkan untuk rasio ketergantungan yang mengalami penuruan secara umum dari 2020 hingga 2022, dan

terjadi peningkatan pada 2024 dapat menunjukkan perubahan dalam dinamika demografis yang memerlukan perhatian dalam perencanaan kebijakan sosial dan ekonomi. Dengan merespons dinamika demografis ini, Kabupaten Parigi Moutong dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing SDM dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.3.2. Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi Kabupaten Parigi Moutong menyangkut berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Diversifikasi ekonomi merupakan strategi penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Upaya pengembangan sektor-sektor tersebut melalui inovasi teknologi, peningkatan akses pasar, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah, berikut gambaran produktivitas ekonomi Kabupaten Parigi Moutong

2.3.2.1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri. Efektivitas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah terlihat dari tingginya persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Angka persentase PAD terhadap pendapatan di Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2023-2024 menunjukkan angka yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 sebesar 7,75 persen kemudian meningkat menjadi 7,93 persen tahun 2024.

**Tabel 2.33
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PAD	122.631.831.820,95	100.439.604.441	130.927.194.815	140.921.563.929	147.167.380.959
Total Pendapatan	1.616.503.194.186,55	1.513.928.599.581	1.624.204.982.052	1.818.407.040.958	1.856.464.858.424
Persen	7,59	6,63	8,06	7,75	7,93

Sumber: BPKAD, 2025

2.3.2.2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Parigi Moutong

PDRB Per Kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. Angka PDRB per kapita dapat

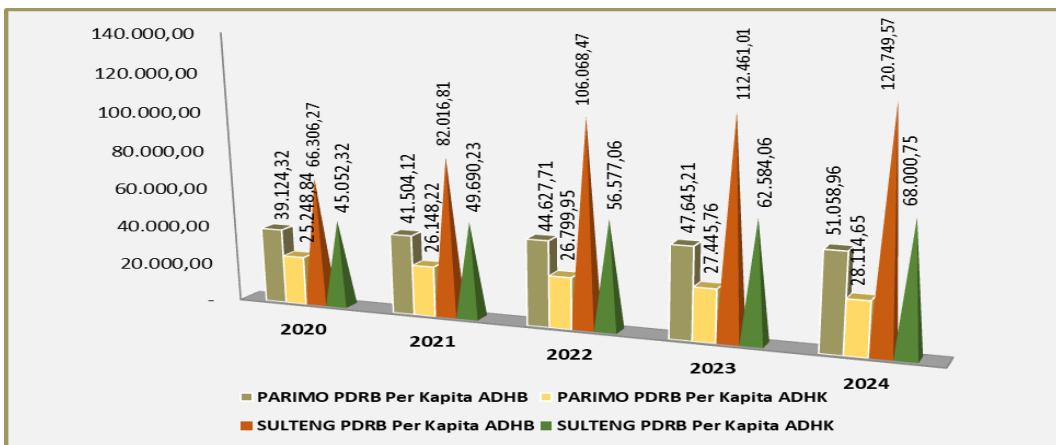
dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat, walaupun tidak dapat langsung menggambarkan kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat atau penduduk. Akibat naiknya aktivitas ekonomi riil yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap PDRB per kapita Parigi Moutong, Pada tahun 2024 perkembangan PDRB per kapita Parigi Moutong atas dasar harga berlaku sebesar Rp.51.058,96 juta sedangkan PDRB perkapita atas harga konstan sebesar Rp.28.114,65 juta. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan PDRB per kapita Parigi Moutong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.34 berikut:

**Tabel 2.34
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB					
PDRB (Juta Rp)	17.197,68	18.438,95	20.061,50	21.664,4	23.475,94
Jumlah Penduduk	440,015	443,170	446,712	457.031	461.576
PDRB Per kapita (Rupiah)	39.124,32	41.504,12	44.627,71	47.645,21	51.058,96
ADHK					
PDRB (Juta Rp)	11.098,50	11.616,82	12.047,38	12.479,50	12.926,58
Jumlah Penduduk	440,015	443,170	446,712	457.031	461.576
PDRB Per kapita (Rupiah)	25.248,84	26.148,22	26.799,95	27.445,76	28.114,65

Sumber: PDRB Kab/Kota di Sulawesi Tengah 2025

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2024 PDRB perkapita Parigi Moutong mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 51.058 juta rupiah. Jika kita melihat angka PDRB perkapita atas dasar harga konstan maka nilainya juga terus meningkat walaupun tidak sebanyak pada harga berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan PDRB per kapita Parigi Moutong dan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.25 berikut.



Sumber: Data PDRB Kabupaten/Kota di Prov. Sulawesi Tengah, Tahun 2020-2024

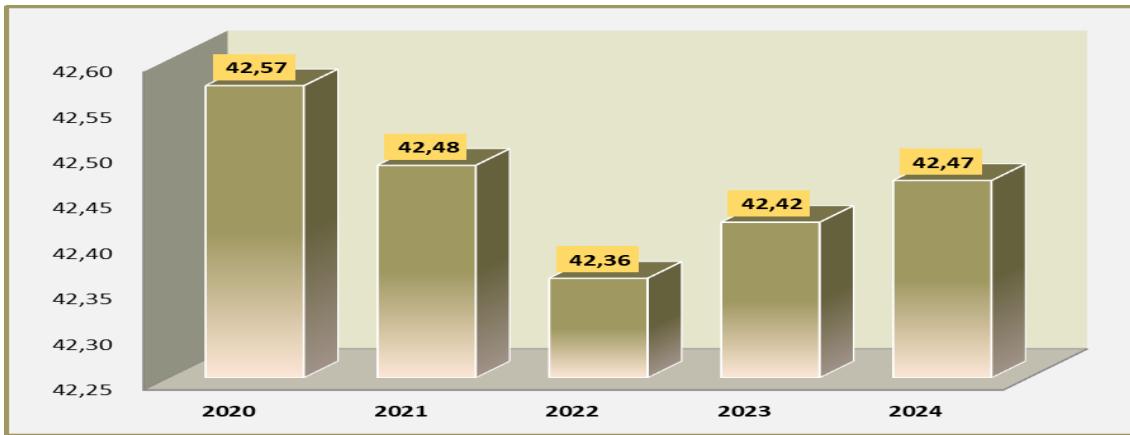
**Gambar 2.25
PDRB Per kapita Kabupaten Parigi Moutong dan
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)**

PDRB Per Kapita Kabupaten Parigi Moutong dan Provinsi Sulawesi Tengah, terlihat dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan namun berada di bawah PDRB Per Kapita penduduk Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020 mencapai 39.124,32 rupiah meningkat menjadi 41.504,12 rupiah tahun 2021, dan menjadi 44.627,71 rupiah pada tahun 2022 menjadi 47.654,21 rupiah tahun 2023 dan menjadi 51.058,96 rupiah tahun 2024. Sementara PDRB Per Kapita Harga Konstan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 telah mencapai 56.577,06 rupiah naik menjadi 62.584,06 rupiah pada tahun 2023 selanjutnya pada tahun 2024 menjadi sebesar 68.000,75 rupiah.

B. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten

Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah pertanian, Oleh karena itu Sektor Pertanian memegang peranan yang strategis dalam pengembangan ekonomi daerah, Hal ini tersebut didasarkan karena Sektor Pertanian (termasuk perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) telah memberi kontribusi rata-rata di atas 40 Persen baik PDRB ADH Berlaku maupun PDRB ADH Konstan dalam lima tahun terakhir (2020-2024).

Tanaman padi, jagung dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) merupakan bahan makanan pokok masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong, meskipun jagung dan umbi-umbian tidak sebanyak konsumsi beras namun di waktu-waktu tertentu menjadi pangan pengganti beras sebagai pangan pokok. Gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong selama kurun Tahun 2020-2024 disajikan sebagaimana gambar 2.26 berikut.



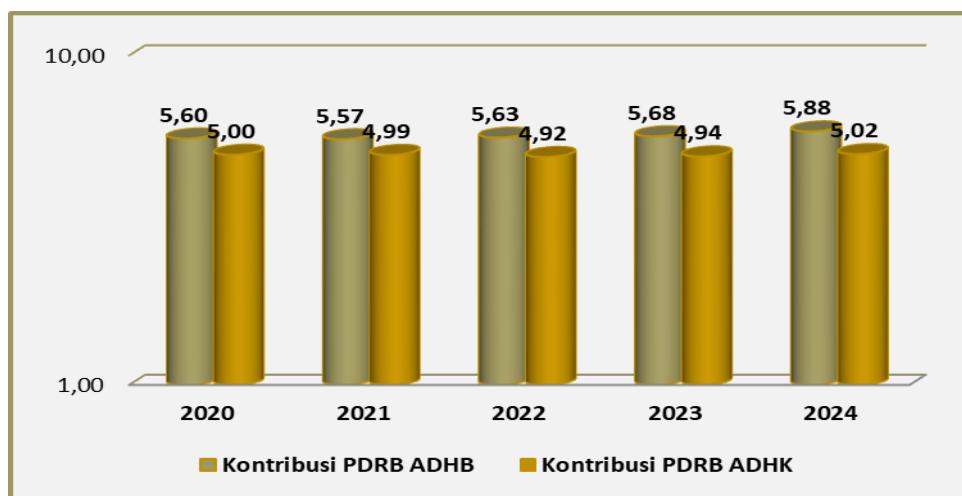
Sumber: PDRB Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Gambar 2.26
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024 (%)

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADH berlaku tahun 2023 sebesar 42,39 persen, capaian tersebut mengalami penigkatan di tahun 2024 yaitu menjadi sebesar 42,47 persen ADH berlaku.

C. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang masih kecil menggerakkan pertumbuhan (engine of growth) yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong masih rendah. Berdasarkan data tahun 2024, Persentase kontribusi sektor ini mengalami peningkatan. Gambaran secara lengkap mengenai persentase kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong selama kurun 2020-2024 sebagai berikut:



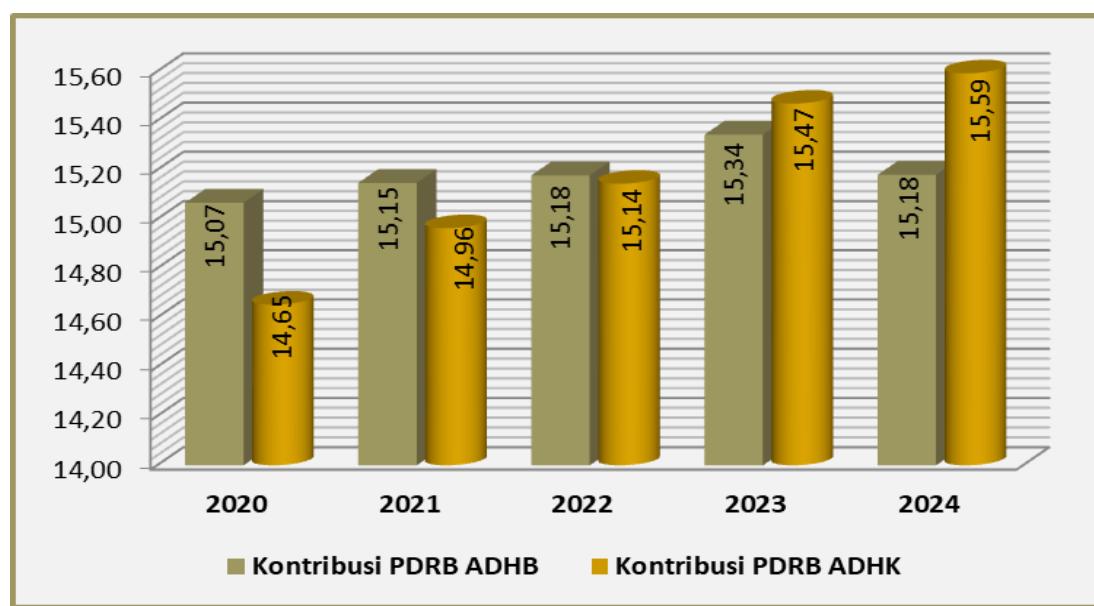
Sumber: PDRB Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

Gambar 2.27
Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024(Persen)

Pada Gambar 2.27 persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, sektor Pertambangan memiliki kontribusi sangat minim dalam menunjang PDRB di Kabupaten Parigi Moutong jika di banding dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADH Berlaku dan PDRB ADH Konstan pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika di banding dengan kontribusi tahun sebelumnya, dimana kontribusi sektor pertambangan ADH berlaku pada tahun 2022 sebesar 5,63 kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,68 persen ditahun 2023 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,88. Untuk kontribusi sektor pertambangan berdasarkan ADH Konstan dari tahun sebelumnya sebesar 4,94 persen menjadi sebesar 5,02 persen pada tahun 2024.

C. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor Perdagangan menjadi sektor andalan selain Sektor Pertanian dan Sektor Konstruksi di Kabupaten Parigi Moutong. Pada tahun 2024, kontribusi Sektor Perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku sebanyak Rp, 3.563.710,5 Juta atau sebesar 15,18 persen dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai Rp 2.015.545,4 juta atau sebesar 15,59 persen. Secara lengkap mengenai kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong selama kurun 2020-2024 terlihat sebagaimana pada gambar 2.28 berikut.

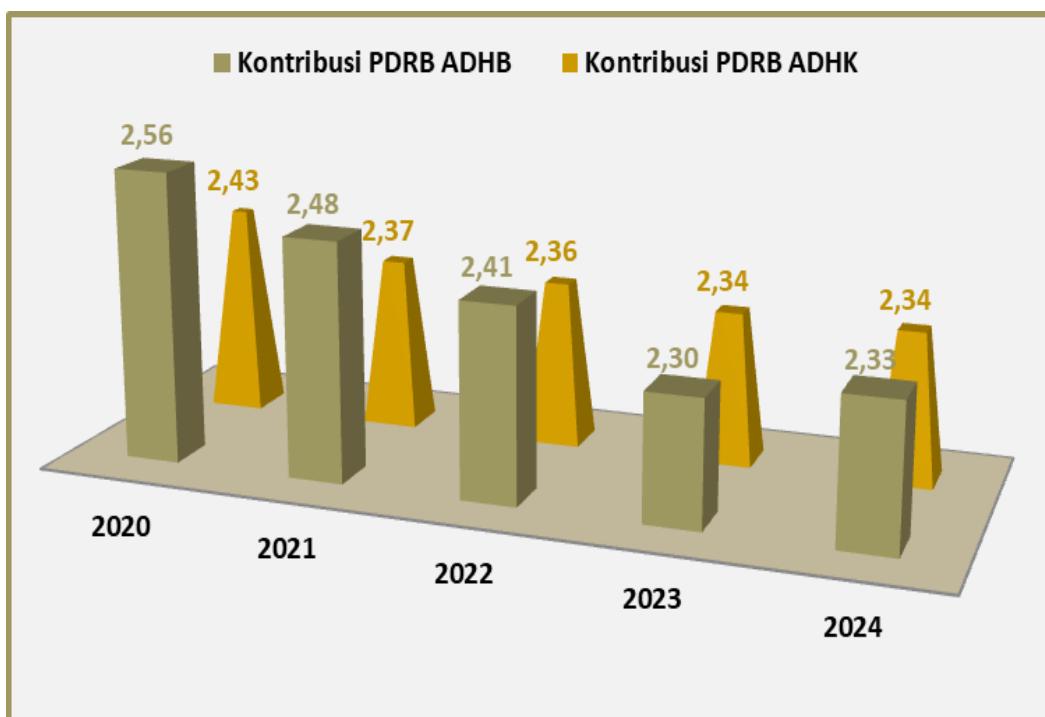


Sumber: PDRB Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (diolah kembali)

Gambar 2.28
Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024 (Persen)

D. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri merupakan sektor kunci (key sector) dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor Industri di Kabupaten Parigi Moutong memberikan kontribusi terhadap perolehan PDRB Kabupaten Parigi Moutong dan memiliki peran penting sebagai penyangga ekonomi masyarakat terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Parigi Moutong. Persentase kontribusi Sektor Industri disajikan dalam gambar 2.29 berikut.



Sumber: PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (diolah kembali)

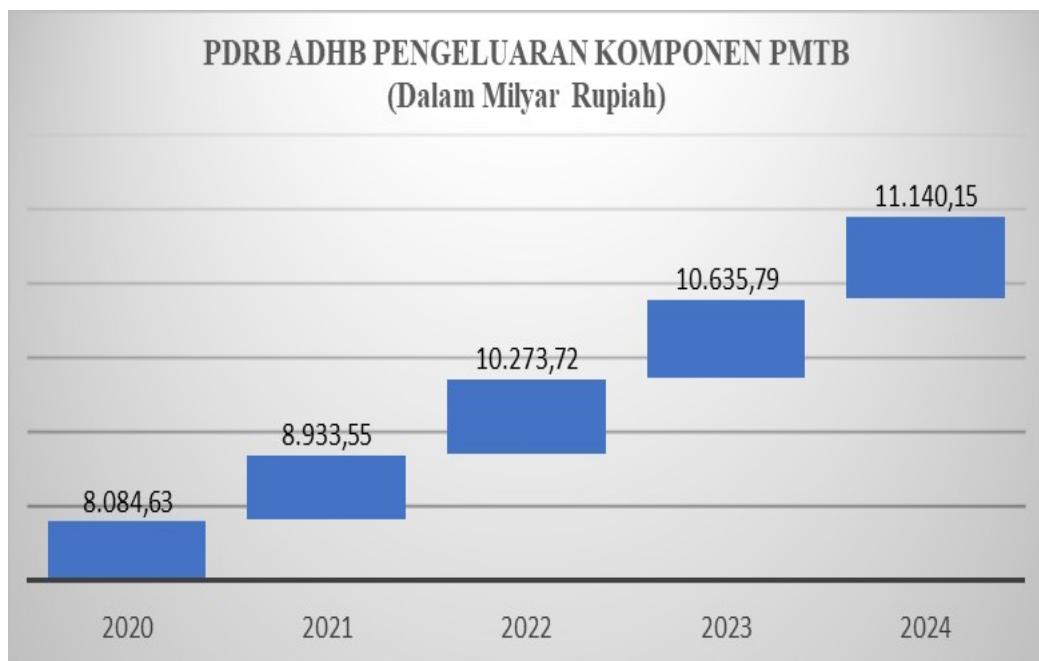
**Gambar 2.29
Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024 (Persen)**

Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan ADH Berlaku mencapai 2,33 persen dan berdasarkan ADH Konstan mencapai 2,34 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya persentase kontribusi sektor ini mengalami peningkatan berdasarkan ADH Berlaku.

E. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah komponen penyusun PDB/PDRB dari sisi pengeluaran. Pertumbuhan penanaman modal atau Investasi baru di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2022 - 2024 mengalami peningkatan hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan investor PMA sebanyak 16 Perusahaan dengan nilai investasi US\$ 101.703.618.877. Total nilai investasi penanaman modal

berdampak pada kenaikan penyerapan tenaga kerja faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal tidak bisa lepas dari sektor industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Untuk perkembangan penanaman modal atau pembentukan modal tetap bruto Kabupaten Parigi Moutong tahun 2022-2024 lebih jelasnya terlihat pada gambar 2.30 berikut



Sumber : BPS Parigi Moutong , 2025

**Gambar 2.30
Nilai PDRB ADHB Komponen PMTB Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2020-2024**

F. Rasio Pajak terhadap PDRB

Kemandirian keuangan daerah salah satunya tercermin dari kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) dan sektor utama penunjang PAD adalah pajak daerah, yang akan digunakan melaksanakan program dalam mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa serta menunjukkan keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan.

Rasio pajak terhadap PDRB sangat penting untuk diketahui karena merupakan satu indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan pajak daerah sebagai sumber PAD, Berikut perkembangan Rasio pajak terhadap PDRB di Kabupaten Parigi Moutong yang tersaji pada tabel 2.35 :

Tabel 2.35
Rasio Pajak Terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	PDRB (ADHB) dalam Milyar	18.438.952.100.000	20.061.496.600.000	21.664.136.300.000	23.475.937.600.000
2	Pajak Daerah	18.116.372.403,68	14.700.000.000,00	23.803.599.245,46	21.402.500.000
3	Rasio Pajak Terhadap PDRB	0,0009	0,0007	0,0011	0,0009

Sumber : BPS Kab. Parigi Moutong, BPKAD Kab. Parigi Moutong (Data diolah Kembali)

G. Ekspor Barang dan Jasa

Secara total, dalam kurun waktu 2020 – 2024 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan angka negatif setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Parigi Moutong sangat bergantung pada produksi luar daerah Parigi Moutong, baik itu luar daerah maupun luar negeri (lebih banyak melakukan impor daripada ekspor). Perkembangan ekspor barang dan jasa Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada tabel 2.36 berikut :

Tabel 2.36
Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

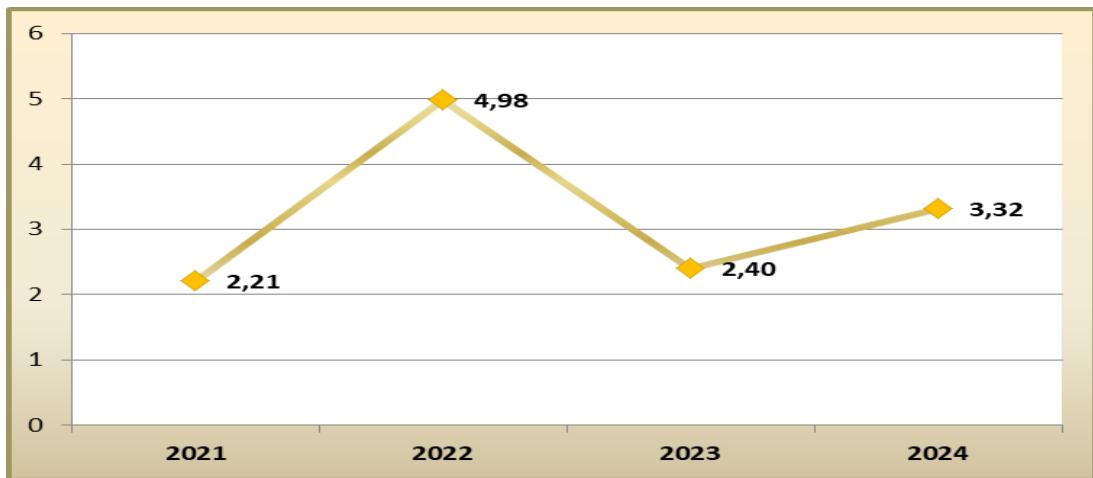
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Nilai Net Ekspor (Miliar Rupiah)					
a. ADHB	(4.857,67)	(5.219,13)	(5.800,56)	(6.081,48)	(6.104,88)
b. ADHK 2010	(3.776,18)	(3.790,51)	(4.067,39)	(4.103,39)	(4.361,31)
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	(28,25)	(28,30)	(28,91)	(28,07)	(26,00)
Pertumbuhan ⁵	(6,65)	0,38	7,30	0,89	6,29

Sumber : BPS Parigi Moutong , 2025

2.3.2.3. Tingkat Inflasi

Pembangunan sektor ekonomi sangat tergantung pada keadaan fiskal dan moneter, jika keadaan tersebut tidak terkendali akan mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menurun, atau sebagai pertanda bahwa nilai uang semakin merosot. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen) perbulan.

Ada banyak indikator yang dapat mengukur pembangunan, baik itu indikator ekonomi maupun indikator sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah rumah tangga/ masyarakat miskin adalah Inflasi. Perubahan inflasi menyebabkan harga-harga semakin meningkat dan membebani daya beli masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. Berikut disajikan gambar laju inflasi tahun 2021-2024.



Sumber: BPS Kabupaten Parigi Moutong

**Gambar 2.31
Inflasi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021-2024**

Capaian angka inflasi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 sebesar 4,98 dan pada tahun 2023 angka inflasi Kabupaten Parigi Moutong menurun menjadi sebesar 2,40, dan pada tahun 2024 naik menjadi 3,32. Terjadinya inflasi secara langsung mempengaruhi harga-harga barang di Kabupaten Parigi Moutong.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok transportasi.

2.3.2.4. Potensi Daerah

A. Potensi Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

1. Potensi Sektor Pertanian

Sektor pertanian sampai saat ini masih memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan program pembangunan sektor

pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Sebagai gambaran dan dasar evaluasi serta perencanaan pengembangan selanjutnya, berikut ini disajikan data mengenai keadaan sektor pertanian di Kabupaten Parigi Moutong beserta sub sektornya, yakni: Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura dan Sub Sektor Perkebunan.

Luas Panen tanaman padi di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2023 sebesar 59.324,9 Ha sedangkan pada tahun 2024 menjadi 59.618 Ha. Data perkembangan luas panen tanaman pangan di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37
Luas Panen Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ha)
Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	53.177	65.075	59.162	59.324,9	59.618
Jagung	14.354	14.576	9.960	5.745,6	8.527,6
Ketela Pohon	144	155	117	157,3	152,1
Ketela Rambat	296	212	111	133,9	138,8
Kacang Tanah	226	202	142	194,7	185,3
Kacang Kedelai	150	0	364	40,8	405
Kacang Hijau	51	65	52	65,1	46,1

Sumber: Dinas Pertanian dan Hortikultura, 2025 (data diolah kembali)

Gambar luas panen di Kabupaten Parigi Moutong sebagian besar mengalami peningkatan pada tahun 2024, hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah produksi tanaman padi dan tanaman pangan di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2020-2024 menurut jenis (Ton) dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38
Produksi Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Ton)
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	243.640	342.942	281.002	296.120	286.778
Jagung	58.412	60.027	41.131	30.337	45.245
Ketela Pohon	3.464	4.429	3.356	4.408	4.112
Ketela Rambat	3.579	2.735	1.435	1.746	1.830
Kacang Tanah	241	340	238	240	362
Kacang Kedelai	186	0	452	49	506
Kacang Hijau	62	35	45	36	88

Sumber: Dinas Pertanian dan Hortikultura, 2025 (data diolah kembali)

Produksi tanaman padi sawah sebesar 286.778 ton pada tahun 2024. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibanding produksi tanaman padi sawah pada tahun 2023 yaitu sebesar 296.120 ton. Untuk tanaman jagung mengalami peningkatan, pada tahun 2023 sebesar 30.337 ton meningkat ditahun 2024 yang mencapai sebesar 45.245 ton. Untuk tanaman Kacang Tanah mengalami peningkatan produksi yaitu sebesar 240 ton di tahun 2023 meningkat menjadi sesesar 362 ton pada tahun 2024. Untuk data produktivitas tanaman padi dan tanaman bahan pangan lokal menurut jenis (ton/ha) di Kabupaten Parigi Moutong disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Produktivitas Padi dan Tanaman Pangan Menurut Jenis (Kuintal/Ha)
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Tahun (Ton/Ha)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	45,82	52,7	47,5	49,91	48,10
Jagung	40,7	41,18	41,3	52,57	53,06
Ketela Pohon	240,03	286,47	287,05	280,23	270,36
Ketela Rambat	120,93	129,21	129,48	130,37	131,88
Kacang Tanah	10,7	16,8	16,84	12,32	19,56
Kacang Kedelai	12,4	0	12,4	12	12,5
Kacang Hijau	6,89	6,87	6,88	13,46	12,51

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2025 (data diolah kembali)

Produktivitas tanaman padi tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Paroduktivitas padi pada tahun 2023 sebesar 49,91 kuintal/ha menurun menjadi sebesar 48,10 kuintal/ha ditahun 2024.

Luas Panen tanaman hortikultura di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 sebagian besar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Data perkembangan luas panen tanaman pangan di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40
Luas Panen Tanaman Hortikultura Menurut Jenis (Ha)
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Tahun (Ton/Ha)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bawang Merah	205	210,30	117,30	115,50	89,80
Cabai Rawit	763	785,20	660,10	605,20	474,00
Tomat	277	246,70	164,90	118,80	132,10
Melon	87	59,20	81,50	80,30	42,30
Semangka	268	185,50	170,40	155,00	174,40

Sumber: Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2025

Tabel 2.41
Produksi Tanaman Hortikultura Menurut Jenis (Kuintal)
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

Jenis Tanaman	Tahun (Ton/Ha)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bawang Merah	18.400	17.963,49	11.319,00	11.114,20	8.378,80
Cabai Rawit	165.048	130.574,02	148.888,20	117.746,30	86.233,40
Tomat	109.180	65.176,66	39.663,40	30.079,50	38.112
Melon	36.413	12.813	15.875	16.655	9.395
Semangka	109.274	35.659,98	33.000	36.120	30.195

Sumber: Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2025

Produksi tanaman Bawang Merah sebesar 8.378,80 kuintal pada tahun 2024. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibanding produksi pada tahun 2023 yaitu sebesar 11.114,20 kuintal. Untuk tanaman Cabe Rawit mengalami penurunan, pada tahun 2023 sebesar 117.746,30 kuintal menurun ditahun 2024 yang mencapai sebesar 86.233,40 kuintal.

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah pertanian, oleh karena itu Sektor Pertanian memegang peranan yang strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Hal ini tersebut didasarkan karena Sektor Pertanian (termasuk perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) telah memberi kontribusi rata-rata di atas 44 Persen dari PDRB ADHB dan PDRB ADHK dalam lima tahun terakhir (2020-2024).

Tanaman padi, jagung dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) merupakan bahan makanan pokok masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong, meskipun jagung dan umbi-umbian tidak sebanyak konsumsi beras namun di waktu-waktu tertentu menjadi pangan pengganti beras sebagai pangan pokok. Gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong selama kurun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024 (Jutaan Rp)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Pertanian :					
- ADH Berlaku	7.321.253,2	7.833.528,0	8.497.939,1	9.190.142,3	9.969.494,3
- ADH Konstan	5.008.535,9	5.190.588,6	5.308.298,1	5.435.778,4	5.589.599,8
PDRB					
- ADH Berlaku	17.197.683,9	18.438.952,1	20.061.496,6	21.664.136,3	13.475.937,6
- ADH Konstan	11.098.504,5	11.616.816,3	12.047.381,6	12.479.502,9	12.926.579,8
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB					
- ADH Berlaku	42,57	42,48	42,36	42,42	42,47
- ADH Konstan	45,13	44,68	44,06	43,56	43,24

Sumber: PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (data diolah kembali)

Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 terhadap capaian PDRB ADH Berlaku mencapai Rp. 9.969.494,3 Juta, dan untuk PDRB ADH Konstan mencapai Rp. 5.589.599,8 juta dari total PDRB Kabupaten ADH Konstan sebesar 12.926.579,8, Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB baik harga berlaku maupun harga konstan sama-sama mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2. Potensi Sektor Perkebunan

Komoditi tanaman perkebunan sebagai tanaman perdagangan di Kabupaten Parigi Moutong memiliki peranan yang sangat penting tidak saja merupakan sumber penghasilan devisa tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja bagi masyarakat. Tanaman perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari 7 (tujuh) jenis tanaman antara lain: cengkeh, kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, lada, kakao dan pala, Produksi dan Tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.43 berikut.

**Tabel 2.43
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman
Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2020-2024 (Ton)**

Jenis Tanaman	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cengkeh	1.775,9	1.745	1.922,92	1.904,34	-
Kelapa	36.200,66	36.571,19	37.589,72	35.891,59	35.532,67
Kelapa Sawit	194,70	194,71	218,51	216,3	233,63
Kopi	100,55	733,83	155,4	189,01	109,7
Lada	23,9	25,8	-	24,1	-
Kakao	25.323,80	28.690,84	26.169	28.689,41	28.402,51
Pala	46,2	86,2	-	72,6	-

Sumber: Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2025

Informasi pada Tabel 2.43 memberikan penekanan bahwa produksi perkebunan menurut jenis tanaman terlihat jumlah produksi pada tanaman perkebunan di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 mengalami peningkatan pada sebagian jenis tanaman kecuali tanaman cengkeh, kelapa, dan kelapa sawit. Jenis tanaman yang mengalami peningkatan jumlah produksi antara lain tanaman kopi dimana tahun 2022 jumlah produksinya sebesar 155,4 ton kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 189,01 ton, kemudian diikuti tanaman kakao dimana pada tahun sebelumnya jumlah produksi sebesar 26.169 ton kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 28.689,41 ton.

3. Potensi Sektor Peternakan

Jenis-jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 di klasifikasikan kedalam tiga bagian yaitu; a) Ternak besar yang meliputi: Sapi kuda dan kerbau b) Ternak kecil antara lain: Kambing, domba dan babi; dan c) Ternak unggas yang meliputi: Ayam kampung, ayam ras dan itik, Jenis Sapi merupakan jenis ternak besar yang mendominasi di Kabupaten Parigi Moutong, dengan jumlah ternak Sapi sebanyak 28.106 ekor pada tahun 2024 dan ternak Kerbau sebanyak 37 ekor dan Kuda sebanyak 28 ekor. Populasi ternak kecil (kambing domba dan babi) di Kabupaten Parigi Moutong cenderung mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya mengenai data populasi ternak besar di Kabupaten Parigi Moutong terlihat pada tabel 2.44 berikut.

**Tabel 2.44
Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil Tahun 2020-2024**

Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ternak Besar					
- Kerbau	6	2	5	5	37
- Sapi	32,796	34,147	35,482	36,652	28.106
- Kuda	10	13	7	7	28
Ternak Kecil					
- Kambing	43,009	44,993	24,934	16.154	16.828
- Babi	33,664	21,770	26,123	65.062	10.084

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka, 2025 (data diolah kembali)

Populasi ternak sapi sebanyak 28.106 ekor tahun 2024, jumlah tersebut menurun jika dibanding jumlah populasi ternak sapi pada tahun 2023 sebanyak 36.652 ekor. Populasi ternak kecil seperti kambing mengalami peningkatan sebanyak 16.154 ekor tahun 2023 meningkat menjadi 16.828 ekor tahun 2024. Sementara populasi ternak kecil jenis babi tahun 2023 sebanyak 65.062 ekor juga mengalami penurunan sebesar 10.084 ekor ditahun 2024.

Populasi unggas yang diternak masyarakat Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari; Ayam Kampung, Ayam Pedaging, Ayam Petelur dan Itik, Dari 4 (empat) jenis unggas yang diternak masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong dalam 2 (dua) tahun terakhir didominasi unggas ayam pedaging. Data populasi unggas di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2020-2024 disajikan pada table 2.45 berikut.

**Tabel 2.45
Jumlah Uggas Menurut Jenisnya
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024**

Jenis Hewan	Tahun (Ekor)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ayam Kampung	596,181	622,716	652,557	663.852	260.843

Jenis Hewan	Tahun (Ekor)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ayam Petelur	99,808	97,040	10,650	9.070	45.511
Ayam Pedaging	713,171	783,862	324,000	1.262.356	270.000
Itik	115,187	143,341	30,716	141.806	125.616

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka 2025 (data diolah kembali)

Jumlah populasi ternak unggas jenis ayam pedaging di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2022 sebanyak 324.000 ekor, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi sebanyak 1.262.356 ekor dan pada tahun 2024 menurun menjadi sebesar 270.000. Untuk populasi ternak unggas ayam kampung tahun 2023 sebanyak 663.852 ekor mengalami penurunan populasi pada tahun 2024 menjadi 260.843 ekor. Sementara populasi ternak itik tahun 2023 sebanyak 141.806 ekor menurun menjadi 125.616 ekor pada tahun 2024 dan populasi ayam petelur pada tahun 2023 sebanyak 9.070 ekor meningkat menjadi sebesar 45.511 ekor ditahun 2024.

4. Potensi Sektor Perikanan

Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Namun peningkatan luas lahan ini tidak mempengaruhi hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Parigi Moutong. Data luas lahan perikanan budidaya di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table 2.46 berikut:

Tabel 2.46
Luas Lahan Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024

NO	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas Lahan Budidaya Perikanan (M ²):						
1	- tambak	6,866	10,058,35	4.046,78	4.046,78	67.880
2	- kolam	348	348	25.521	25.521	25.521
3	- Laut	49,000	49,000	21.215	21.215	92.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, Parigi Moutong, 2025 (data diolah kembali)

Luas lahan budidaya perikanan laut di Kabupaten Parigi Moutong mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 21.215 m² di tahun 2023 menjadi sebesar 92.000 m² pada tahun 2024.

Tabel 2.47
Produksi Perikanan di Kabupaten Parigi Moutong 2020-2024

NO	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan (Ton):						
1	Perikanan Laut	14.980	19.487	20.456	39.797,80	29.043,27

NO	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Perairan Umum	31	93	69	17.280	87.460

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2025

B. Potensi Sektor Pariwisata

Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi wisata baik wisata bahari, alam dan budaya dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa.

Tabel 2.48
Jumlah Kunjungan Wisatawan
di Kabupaten Parigi Moutong 2020-2024

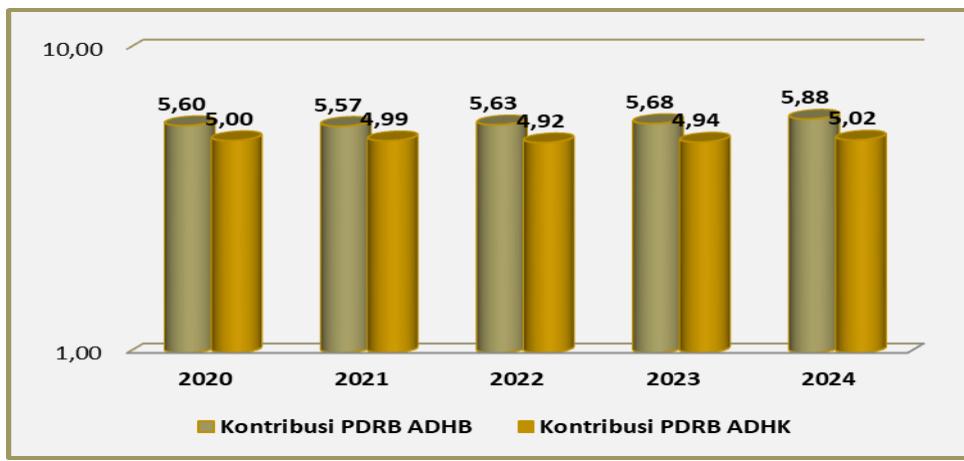
NO	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wisatawan Nusantara	681	1,588	13,150	20.676	27.077
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	0	0	0	4	33

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, 2025 (data diolah kembali)

Dari tabel 2.48 dapat dilihat Perkembangan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2023 tercatat sebesar 20.676 orang dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 27.077 pengunjung.

C. Potensi Sektor Pertambangan

Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang masih kecil menggerakkan pertumbuhan (*engine of growth*) yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong masih rendah. Berdasarkan data tahun 2024, Persentase kontribusi sektor ini mengalami peningkatan. Gambaran secara lengkap mengenai persentase kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong selama kurun 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: PDRB Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

**Gambar 2.32
Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024(Persen)**

Pada Gambar 2.32 persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, sektor Pertambangan memiliki kontribusi sangat minim dalam menunjang PDRB di Kabupaten Parigi Moutong jika di banding dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADH Berlaku dan PDRB ADH Konstan pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika di banding dengan kontribusi tahun sebelumnya, dimana kontribusi sektor pertambangan ADH berlaku pada tahun 2022 sebesar 5,63 kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,68 persen ditahun 2023 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,88. Untuk kontribusi sektor pertambangan berdasarkan ADH Konstan dari tahun sebelumnya sebesar 4,94 persen menjadi sebesar 5,02 persen pada tahun 2024.

2.3.3. Daya Saing Infrastruktur

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain: Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik; Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk; Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4; Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam); Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m); Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar; Persentase rumah tinggal bersanitasi; Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar; Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat; Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun; Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor; Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik; Rasio Jaringan Irigasi; Persentase penduduk berakses air minum; Proporsi rumah tangga

dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan; Persentase areal kawasan kumuh; Luas Kawasan Kumuh; Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan; Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dan Rasio tempat ibadah per satuan penduduk.

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik (*physical capital*) bagi masyarakat dalam menjalakan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan optimalisasi potensi sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya fisik (*physical resources*) serta sumber daya modal (*capital resources*) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Gambaran secara lengkap mengenai panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Parigi Moutong selama kurun waktu 2020-2024 diliat pada tabel 2.49 berikut.

**Tabel 2.49
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Di Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan keseluruhan	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.603,89	1.603,89
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	364,98	370,66	436,57	479,97	518,94
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	368,76	379,61	63,37	134,20	97,36
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak	160,08	131,02	19,20	27,97	33,32
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat	376,17	388,71	750,86	961,75	954,27
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	733,75	750,27	499,94	614,17	616,3
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi	0,287	0,292	0,344	0,210	0,324

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Baik					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Parigi Moutong mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2024 panjang jalan kondisi baik sepanjang 518,94 Km atau dengan proporsi 0,324 dari panjang jalan keseluruhan 1.603,89 Km. Data proporsi jalan kondisi baik tersebut mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya dimana total panjang jalan tahun 2023 sepanjang 1,603,89 Km dengan panjang jalan kondisi baik sepanjang 479,97 Km atau sebesar 0,210 dari total jalan di Kabupaten Parigi Moutong.

B. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Semakin panjang jalan yang dilalui oleh penduduk, menunjukkan semakin luas daya jangkau masyarakat untuk melayani aktivitas sosial dan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut, Atau sebaliknya, semakin pendek jalan yang dilalui oleh penduduk menunjukkan semakin pendek daya jangkau masyarakat untuk melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut. Ketersediaan infrastruktur jalan yang baik menjadi urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Gambaran secara lengkap mengenai Rasio panjang jaringan jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Parigi Moutong selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk
Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan	1,270,00	1,270,00	1,270,00	1.603,89	1.603,89
Jumlah Penduduk	440,015	443,170	446,712	457.031	461.576
Rasio Jalan Per Penduduk	0,0029	0,0029	0,0028	0,0035	0,0034

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka, tahun 2025 (diolah kembali)

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani, Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya

dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Angka rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,0034 dimana tahun 2023 sebesar 0,0035.

C. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik memberikan indikasi kuat mengenai pergerakan moda transportasi yang mengangkut orang dan barang/jasa. Semakin panjang jalan yang dilalui kendaraan roda empat, menunjukkan semakin luas daya jangkau kendaraan roda empat untuk melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, sebaliknya semakin pendek jalan yang dilalui kendaraan roda empat menunjukkan semakin pendek daya jangkau kendaraan roda empat untuk melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) di Kabupaten Parigi Moutong selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/jam)
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

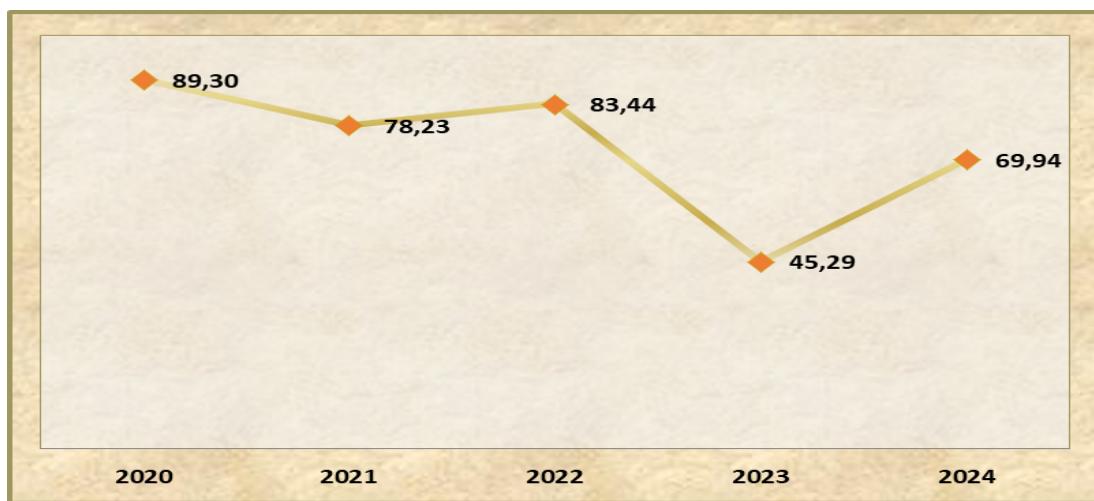
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	364,98	370,66	436,57	479,97	518,94
Panjang jalan keseluruhan	1,270,00	1,270,00	1,270,00	1.603,89	1.603,89
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)	28,73	29,18	34,37	29,92	32,35

Sumber: Dinas PUPR Kab. Parigi Moutong, 2025

Persentase jalan dalam kondisi baik (>4 km/jam) selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan dimana tahun 2023 sebesar 29,92 persen, meningkat ditahun 2024 menjadi 32,35 persen.

D. Jaringan Irigasi

Infrastruktur yang diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi tanaman pangan adalah ketersediaan Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan penggunaannya. Luas lahan yang beririgasi di Kabupaten Parigi Moutong masih terbatas atau kecil jumlahnya, jika dibanding dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Data rasio ketersediaan irigasi dan luas lahan budidaya di Kabupaten Parigi Moutong dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada gambar 2.33 berikut.



Sumber: Dinas PUPR Kab. Parigi Moutong

Gambar 2.33
Persentase Luas Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Sulawesi Tengah, mayoritas penduduk juga bekerja pada sektor pertanian, sarana pertanian yang cukup vital ketersediaanya adalah jaringan Irigasi. Data perkembangan jaringan irigasi di Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan capaian yang kurang positif, dimana pada tahun 2023 persentase jaringan irigasi dalam status baik mencapai 45,29 persen, Meningkat ditahun 2024 menjadi 69,94 persen.

E. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kondisi daerah terkait dengan Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat dilihat dari indikator kinerja diantaranya: 1) Rasio rumah layak huni, 2) Rasio Pemukiman layak huni, 3) Cakupan ketersediaan rumah layak huni, 4) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, 5) Persentase pemukiman Luas wilayah permukiman, 6) Persentase lingkungan pemukiman kumuh, 7) Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, 8) Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan dan 9) Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU.

Tabel 2.52
Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2020-2024 Kabupaten Parigi Moutong

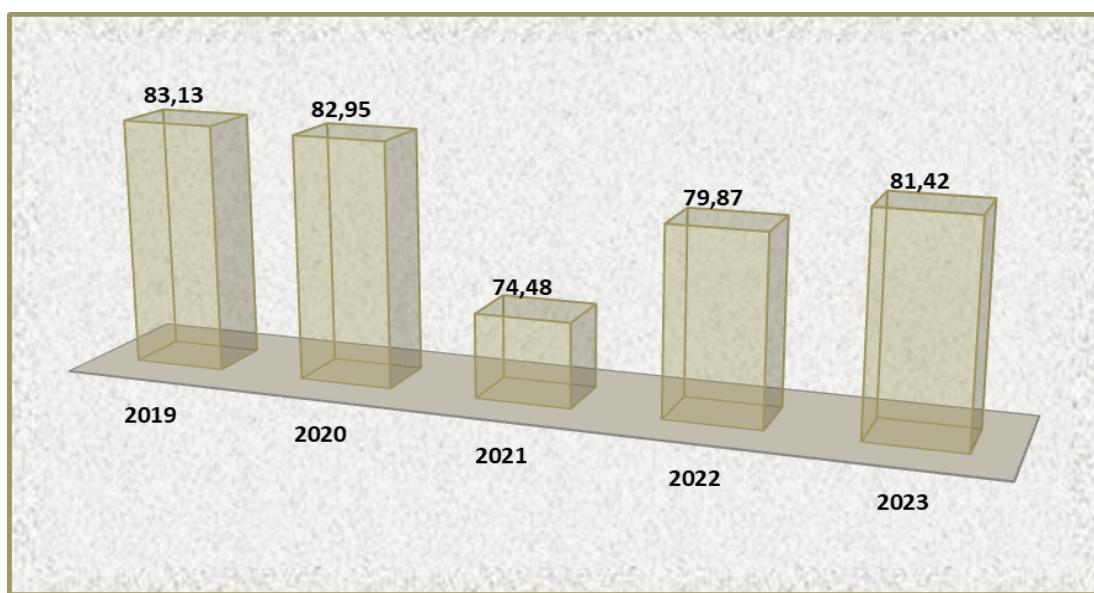
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Rumah Layak Huni	0,182	0,182	0,183	0,184	0,196
Rasio Pemukiman layak huni	0,966	0,966	0,997	0,997	-
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	73,03	73,09	73,81	76,04	80,88

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,378	0,378	0,301	0,301	0,301
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0,165	0,140	0,110	0,096	0,096
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	20,00	20,00	20,00	30,00	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

F. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Dewasa ini kebutuhan rumah tangga akan ketersediaan sumber daya listrik makin meningkat. Seiring dengan berkembangnya tingkat kebutuhan listrik sebagai sumber Energi untuk kelancara aktivitas sehari-hari. Saat ini telah banyak dipergunakan alat-alat yang menggunakan listrik, mulai dari kompor, setrika sampai pada computer. Untuk lebih jelasnya data persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dalam kurun waktu tahun 2019-2023 Kabupaten Parigi Moutong disajikan pada gambar 2.34 berikut.



Sumber: KDA Kabupaten Parigi Moutong, Tahun 2025 (diolah kembali)

Gambar 2.34
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Parigi Moutong mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 83,13 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 74,48 persen. Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 81,42 persen.

G. Status Desa Mandiri

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Status Desa Mandiri di kabupaten Parigi Moutong mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni dari jumlah 21 desa pada tahun 2023 meningkat menjadi 33 pada tahun 2024. Secara rinci perkembangan status desa di Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	4	5	9	21	33
2	Maju	61	81	110	126	134
3	Berkembang	189	174	151	129	110
4	Tertinggal	23	17	7	2	1
5	Sangat Tertinggal	1	1	1	-	-

Sumber: Kemendesa dan PDT (diolah kembali)

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Kondisi daya saing investasi dikabupaten parigi moutong dapat dilihat bagaimana daerah Kabupaten Parigi Moutong memberikan kemudahan investasi, situasi politik serta memberikan keamanan dan ketertiban daerah agar pelaku usaha dapat berinvestasi di Kabupaten Parigi Moutong, berikut gambaran daya saing iklim investasi di Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut :

A. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur untuk menilai tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, Meskipun IDI memberikan gambaran umum, penting untuk diingat bahwa demokrasi adalah proses yang dinamis dan kompleks. Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia, dan IDI hanyalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuannya.

B. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban adalah alat ukur untuk menilai tingkat keamanan, ketertiban, dan keteraturan dalam suatu wilayah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan gambaran tentang kondisi sosial masyarakat. Ujuan utama dari pengukuran indeks ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi ketenteraman dan ketertiban di suatu wilayah, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan program yang tepat.

C. Persentase Penegakan Peraturan Daerah

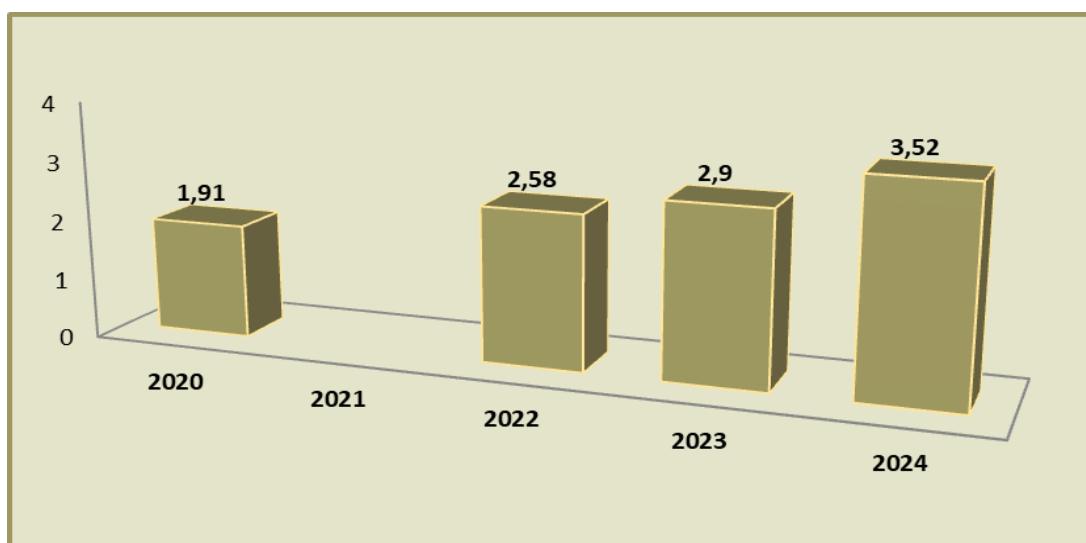
Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengacu pada tingkat keberhasilan atau efektivitas pelaksanaan Perda oleh pihak yang berwenang. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Perda yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat. Penegakan Perda bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman umum, serta menegakkan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Penegakan Perda dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum di tingkat daerah, serta instansi terkait lainnya.



**Gambar 2. 35
Persentase Penegakan Humum Perda
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022-2024**

D. Indeks Daya Saing Daerah

Perekembangan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Parigi Moutong dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan yakni Tahun 2021 sebesar 2,58 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 3,52



Sumber : BRIN, 2025

Gambar 2. 36
Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Reformasi Birokrasi

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat untuk mengukur kemajuan reformasi hukum dengan cara mengidentifikasi dan memetakan regulasi, melakukan reregulasi dan deregulasi aturan, serta memperkuat sistem regulasi nasional. IRH juga bertujuan untuk mewujudkan penataan regulasi yang berkualitas, bersih, dan akuntabel.

Untuk Kabupaten Parigi Moutong dalam pencapaian Indeks Reformasi Hukum telah mencapai 63,09 meningkat 19,02 poin dari tahun 2023 diangka 44,07. Kenaikan ini mencerminkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi birokrasi yang berdampak pada masyarakat.

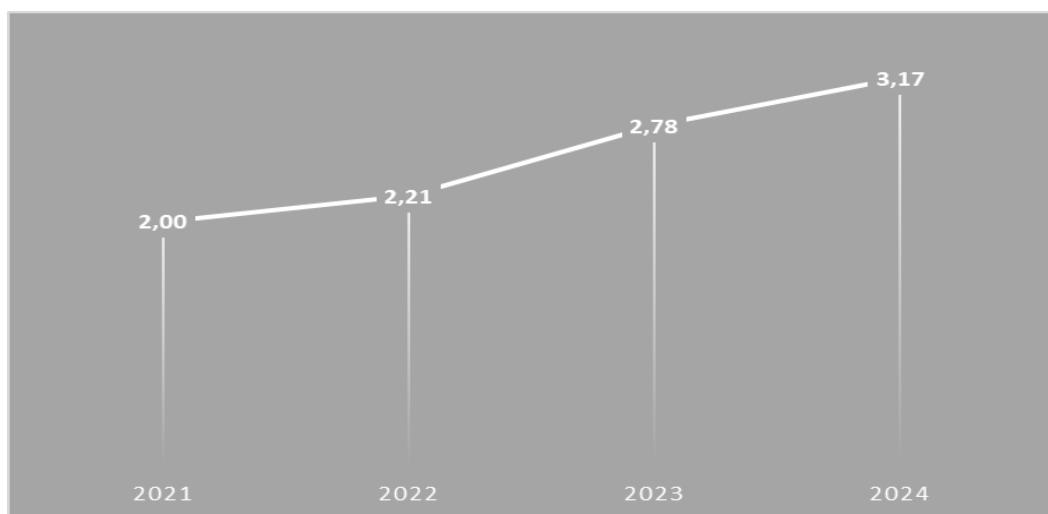
B. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. IRB bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN), serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Capaian Indeks IRB Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 mencapai 63,09 (B) pencapaian nilai IRB ini meningkat dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 44,07 (C) Nilai IRB ini dari tahun 2023 - 2024 yang terus meningkat menunjukkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Parigi Moutong berusaha menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah berusaha menciptakan dampak dalam upaya reformasi birokrasi.

2.4.2. Indeks Pelayanan Umum

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. IPP ini menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan kepuasan masyarakat. Nilai IPP Kabupaten Parigi Moutong dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan dari 2,0 menjadi 3,17.



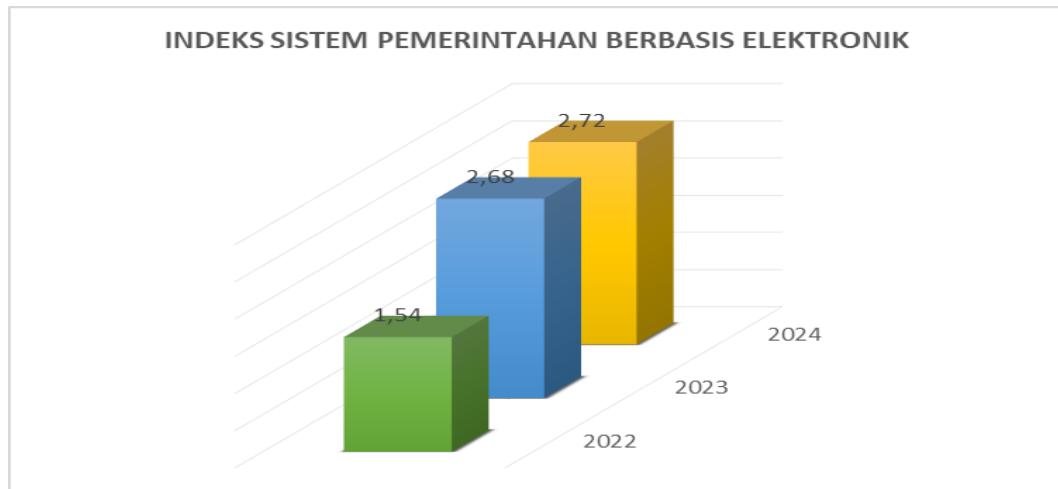
Sumber : MenPan RB (Data diolah kembali)

Gambar 2.37
Capaian Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021-2024

2.4.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Selain itu, sasaran strategi dalam kebijakan reformasi birokrasi dapat diukur melalui indikator tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau disebut Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan e-Government memang dibutuhkan. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen dalam penggunaan e-Government/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten

Parigi Moutong selama Tahun 2022 sampai dengan pada Tahun 2024 dimana pada tahun 2024 SPBE Kabupaten Parigi Moutong sebesar 2,72 dengan predikat “**Baik**” yang mana SPBE pada tahun 2023 sebesar 2,68 Capaian SPBE Kabupaten Parigi Moutong dari Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar 2.38 dibawah ini



Sumber : Menpan RB, (data diolah)

Gambar 2.38
Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021-2024

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa website milik pemerintah daerah mulai awal periode sampai dengan akhir dalam status “Ada”. Dua aspek yang menjadi urusan komunikasi dan informatika yaitu: Cakupan layanan telekomunikasi dan Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon. Realisasi indikator disajikan pada table 2.54 berikut.

Tabel 2.54
Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2024

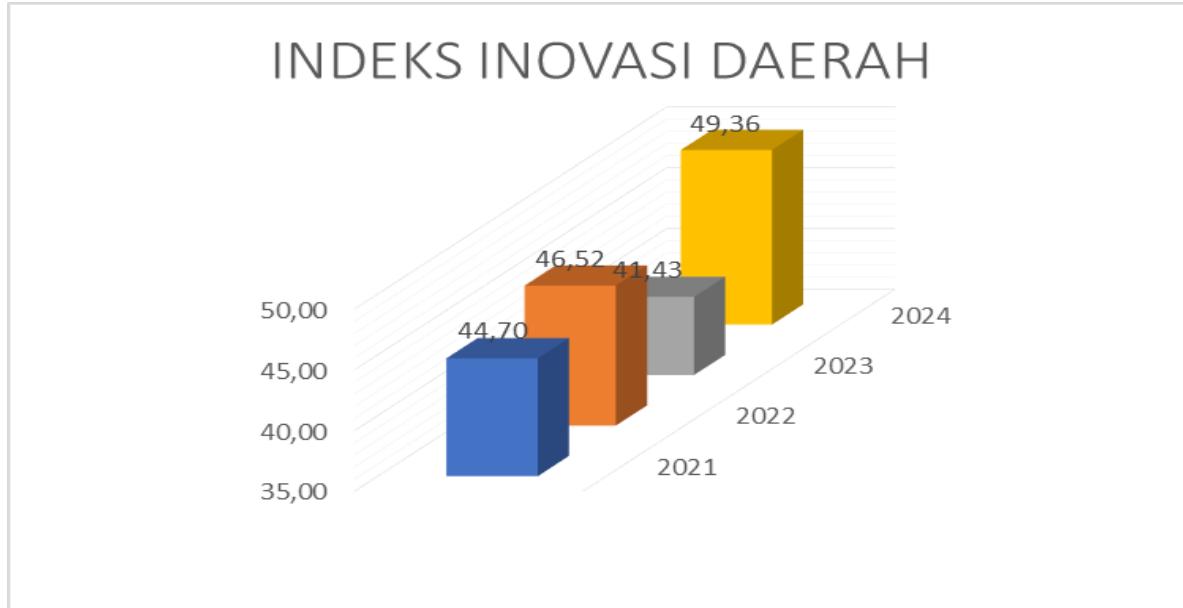
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan layanan telekomunikasi	70,4	70,6	80,5	80,5	80,5
Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	56,30	56,39	56,81	57,17	57,40

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4.4. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IID bertujuan untuk

mendorong dan memantau inovasi di berbagai sektor pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Indeks Inovasi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 mendapatkan skor 49,36 (Inovatif). mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya Secara rinci perkembangan IID Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada gambar 2.39 dibawah

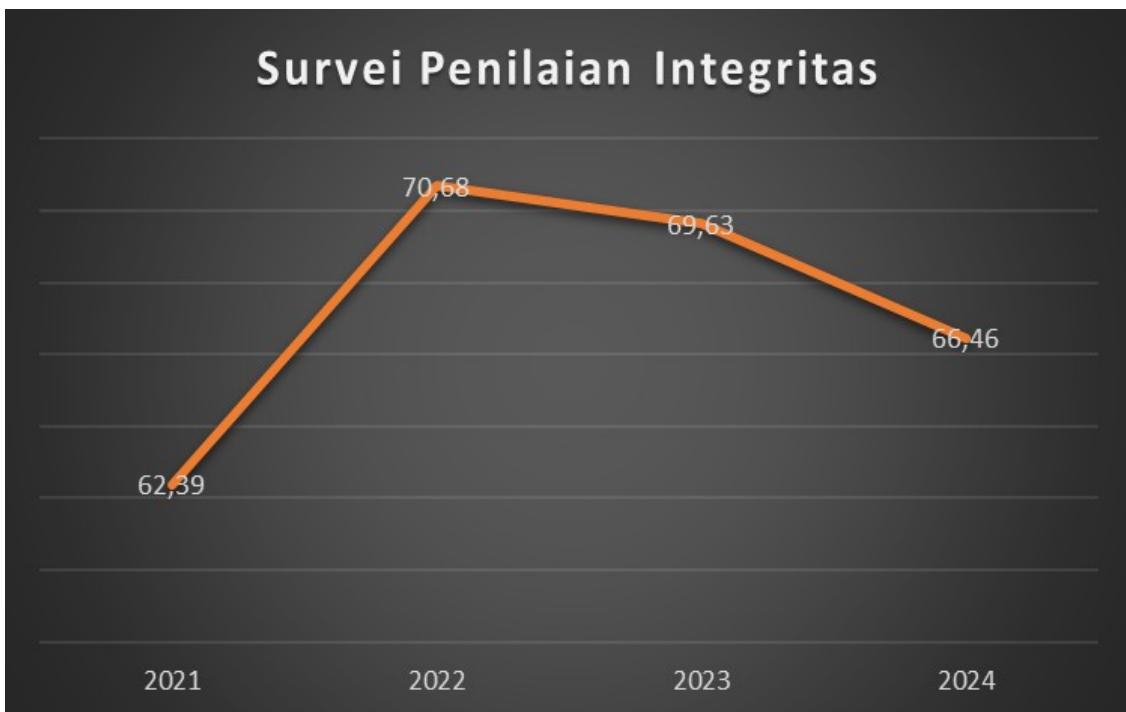


Sumber : BAPPELITBANGDA, 2025 (Data diolah)

Gambar 2.39
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 – 2024

E. Indeks Integritas Nasional (SPI)

Indeks Integritas Nasional (INN) daerah atau Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alatukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan diinstansi K/L/PD, yang terbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama. Hasil Capaian nilai SPI Kabupaten Parigi Moutong dalam kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2021 sebesar 62,39 meningkat menjadi 70,68 pada tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2023 menurun menjadi 69,63, dan pada tahun 2024 SPI menurun mencapai 66,64 pada tahun 2024. Perkembangan hasil survei penilaian integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 – 2024 tersaji pada gambar 2.40 dibawah ini.



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

**Gambar 2.40
Survei Penilaian IntegritasKabupaten Parigi Moutong Tahun 2021-2024**

2.5. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 DAN REALISASI RPD 2024-2026

Untuk menjamin suatu program pembangunan dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Landasan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pasal 14 ayat (1) bahwa Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD. Selanjutnya pada pasal 14 ayat (6) menjelaskan bahwa Bupati menyampaikan laporan dimaksud kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong

Evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung maupun yang telah dilaksanakan. Jenis evaluasi *ex-post* atau pasca pelaksanaan dimaksudkan untuk melihat pencapaian kegiatan atau program (output/outcome/impact), mampu mengatasi masalah pembangunan serta menilai efisiensi, efektivitas dan manfaat. Dengan evaluasi, akan didapatkan gambaran perkembangan setiap indikator kinerja. Kemudian dengan data yang ada, dapat dilakukan identifikasi masalah baik dalam perencanaan maupun implementasinya serta berbagai kemungkinan solusi.

2.5.1. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2024

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengukur capaian kinerja pada level kegiatan, maka evaluasi RKPD tahun 2024 dilaksanakan dengan mengukur capaian kinerja keluaran (output) pada level sub kegiatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2019, nomenklatur sub kegiatan menggambarkan aktivitas dari kegiatan yang lebih rinci (proses) untuk menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan kewenangan daerah.

Evaluasi terhadap capaian sub kegiatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran terhadap output (barang, jasa, layanan) yang dihasilkan dari penggunaan sumberdaya yang dimiliki, baik manusia, peralatan maupun anggaran selama tahun 2024. Sementara evaluasi terhadap capaian progam (outcome) baru dapat dilakukan sampai dengan tahun 2023.

Proses evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dilakukan secara triwulan dengan menggunakan sumberdata yang berasal dari :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Moutong tahun 2024-2026
2. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024
3. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024
4. Laporan hasil evaluasi perubahan renja perangkat daerah tahun 2024
5. Laporan hasil pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tahun 2024.

Pelaksanaan evaluasi RKPD tahun 2024 dilakukan melalui proses pengumpulan data sebagaimana disebut diatas, review indikator dan kinerja, serta pengkuran kinerja. Proses review dilakukan untuk mengidentifikasi terutama terhadap indikator dan target kinerja pada seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mendapatkan informasi awal bahwa perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah dapat dievaluasi atau tidak dapat dievaluasi. Selanjutnya hasil review tersebut dituangkan ke dalam lembar kerja (worksheet) dengan berpedoman pada format tabel E.60 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Secara ringkas hasil pelaksanaan RKPD tahun 2024 per urusan tertuang dalam tabel 2.53 berikut

Tabel 2.55
RINGKASAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DALAM APBD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	KODE OPD	OPD	APBD PERUBAHAN	APBD	SUB KEGIATAN/OUTPUT		REALISASI OUTPUT (%)	REALISASI BELANJA (%)		PREDIKAT KINERJA
					TOTAL	DILAPORKA N		Rp	%	
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	486.834.563.823	420.670.417.418	94	90	95,95	390.413.480.895	89,23	Sangat Tinggi
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	187.959.632.951	147.943.682.730	694	74	83,29	133.420.210.177	63,98	Tinggi
3	1.02.0.00.0.00.02.0000	Blud-Rsud Anuntaloko	120.989.371.895	44.637.828.185	7	7	100,00	115.266.952.283	95,44	Sangat Tinggi
4	1.02.0.00.0.00.03.0000	Rsd Raja Tombolotutu	30.225.468.469	26.482.476.444	7	5	71,43	23.522.047.570	74,39	Sedang
5	1.02.0.00.0.00.04.0000	Rsud Buluye Napoa"E Moutong	13.274.997.978	13.413.173.708	13	12	87,04	9.416.029.792	85,72	Tinggi
6	1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	102.437.510.224	102.086.793.223	51	49	91,04	98.845.604.635	96,68	Sangat Tinggi
7	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	9.655.394.954	10.059.597.459	29	21	62,86	9.626.739.658	91,38	Rendah
8	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.983.911.829	6.221.190.457	35	33	98,57	5.857.224.487	98,10	Sangat Tinggi
9	1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	12.824.570.923	13.149.313.543	35	33	93,53	12.722.628.520	96,65	Sangat Tinggi
10	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	8.740.341.587	9.832.941.784	32	31	97,58	8.640.362.388	96,24	Sangat Tinggi
11	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.078.131.781	5.290.382.896	23	24	92,32	4.999.741.592	93,55	Sangat Tinggi
12	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	16.639.412.863	17.600.933.653	35	34	95,71	16.425.044.028	96,32	Sangat Tinggi
13	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	8.407.882.435	8.886.217.515	40	39	229,07	8.375.975.556	99,35	Sangat Tinggi
14	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	9.505.849.943	9.854.365.965	43	40	85,60	9.402.282.174	97,94	Tinggi
15	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5.956.759.211	6.672.146.094	33	27	64,13	5.801.629.945	94,94	Rendah
16	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.883.595.683	10.750.317.562	31	29	90,00	10.713.287.186	96,12	Tinggi
17	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	9.196.710.140	9.260.494.585	18	15	73,70	9.039.036.763	81,26	Sedang
18	2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.494.506.697	8.276.469.990	30	28	93,10	7.154.584.396	93,38	Sangat Tinggi

NO	KODE OPD	OPD	APBD PERUBAHAN	APBD	SUB KEGIATAN/OUTPUT		REALISASI OUTPUT (%)	REALISASI BELANJA (%)		PREDIKAT KINERJA
					TOTAL	DILAPORKA N		Rp	%	
19	2.17.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	7.365.587.879	7.533.731.306	40	27	59,08	7.197.095.960	95,08	Rendah
20	2.18.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.692.184.820	5.660.095.935	26	24	86,71	4.040.131.449	94,46	Tinggi
21	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.836.470.099	6.174.188.382	29	29	100,00	5.735.795.744	93,23	Sangat Tinggi
22	3.25.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	14.099.571.541	15.070.426.134	40	40	120,81	13.944.376.006	98,62	Sangat Tinggi
23	3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	9.842.444.399	11.177.834.957	35	36	97,24	9.794.367.505	99,31	Sangat Tinggi
24	3.27.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	41.242.185.759	43.480.271.643	37	36	91,97	37.920.570.036	93,08	Sangat Tinggi
25	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	13.682.999.709	14.441.254.347	30	29	95,00	13.354.240.834	95,80	Sangat Tinggi
26	3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.064.125.334	11.034.206.412	31	5	6,02	9.703.653.718	89,00	Sangat Rendah
27	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	66.835.863.817	20.953.769.551	62	61	93,66	67.460.692.120	99,00	Sangat Tinggi
28	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dprd	43.036.206.275	43.274.601.272	39	39	123,68	41.688.691.898	91,02	Sangat Tinggi
29	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	13.678.840.798	15.357.745.533	48	68	100,00	13.662.439.713	99,51	Sangat Tinggi
30	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	415.380.512.924	423.835.421.161	32	26	88,71	412.825.877.711	97,02	Tinggi
31	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	13.244.121.397	11.635.676.683	33	33	91,88	12.957.547.903	96,30	Sangat Tinggi
32	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.813.893.989	8.172.058.663	32	32	100,86	7.694.732.604	97,80	Sangat Tinggi
33	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	12.900.834.634	14.010.631.900	25	25	246,30	12.716.838.239	94,75	Sangat Tinggi
34	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Sausu	2.323.986.208	2.353.363.128	17	14	80,36	2.297.617.848	87,85	Tinggi
35	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Torue	2.060.503.777	2.034.764.270	17	17	95,22	2.061.158.166	95,37	Sangat Tinggi
36	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Parigi Selatan	1.756.435.004	1.929.647.784	14	14	133,95	1.725.387.831	92,74	Sangat Tinggi
37	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Parigi	8.043.517.194	5.215.962.181	54	12	60,00	6.267.890.878	42,53	Rendah

NO	KODE OPD	OPD	APBD PERUBAHAN	APBD	SUB KEGIATAN/OUTPUT		REALISASI OUTPUT (%)	REALISASI BELANJA (%)		PREDIKAT KINERJA
					TOTAL	DILAPORKA N		Rp	%	
38	7.01.00.00.00.05.0000	Kecamatan Ampibabo	1.985.413.929	2.152.841.080	14	13	100,00	1.979.018.741	98,13	Sangat Tinggi
39	7.01.00.00.00.06.0000	Kecamatan Kasimbar	2.298.150.606	2.232.230.133	14	13	92,86	2.258.148.753	84,77	Sangat Tinggi
40	7.01.00.00.00.07.0000	Kecamatan Tinombo Selatan	2.370.422.972	2.364.898.239	11	5	28,28	1.338.326.971	22,63	Sangat Rendah
41	7.01.00.00.00.08.0000	Kecamatan Tinombo	1.979.349.616	2.164.389.938	12	12	100,00	1.965.637.214	95,19	Sangat Tinggi
42	7.01.00.00.00.09.0000	Kecamatan Palasa	1.891.103.524	1.885.644.673	13	12	103,47	1.644.703.886	94,74	Sangat Tinggi
43	7.01.00.00.00.10.0000	Kecamatan Mepanga	2.043.015.708	2.089.659.356	14	13	92,86	2.036.163.414	98,18	Sangat Tinggi
44	7.01.00.00.00.11.0000	Kecamatan Bolano Lambunu	2.260.942.615	2.213.342.143	15	13	89,14	2.215.728.151	93,62	Tinggi
45	7.01.00.00.00.12.0000	Kecamatan Moutong	2.340.481.150	2.330.544.554	12	12	100,00	2.331.791.927	98,64	Sangat Tinggi
46	7.01.00.00.00.13.0000	Kecamatan Toribulu	1.591.464.526	1.595.323.436	14	-	-	-	-	Sangat Rendah
47	7.01.00.00.00.14.0000	Kecamatan Taopa	1.895.214.508	1.938.495.908	17	16	92,94	1.853.499.074	83,41	Sangat Tinggi
48	7.01.00.00.00.15.0000	Kecamatan Tomini	1.752.616.870	1.805.664.231	13	12	92,31	1.704.774.311	84,74	Sangat Tinggi
49	7.01.00.00.00.16.0000	Kecamatan Parigi Barat	1.732.140.419	1.835.346.492	11	2	8,18	1.100.493.162	16,95	Sangat Rendah
50	7.01.00.00.00.17.0000	Kecamatan Balinggi	2.043.911.907	2.047.074.299	17	17	100,00	2.000.763.631	95,84	Sangat Tinggi
51	7.01.00.00.00.18.0000	Kecamatan Siniu	1.691.072.468	1.710.409.930	13	-	-	-	-	Sangat Rendah
52	7.01.00.00.00.19.0000	Kecamatan Parigi Utara	1.794.157.145	1.859.865.419	17	15	144,71	1.772.324.349	95,03	Sangat Tinggi
53	7.01.00.00.00.20.0000	Kecamatan Parigi Tengah	2.510.257.848	2.515.036.445	18	18	100,00	2.466.767.848	99,93	Sangat Tinggi
54	7.01.00.00.00.21.0000	Kecamatan Ongka Malino	1.516.250.721	1.779.135.573	17	16	90,00	1.407.937.925	73,25	Tinggi
55	7.01.00.00.00.22.0000	Kecamatan Bolano	1.969.698.611	1.982.543.883	13	11	84,62	659.123.758	56,64	Tinggi
56	7.01.00.00.00.23.0000	Kecamatan Sidoan	1.664.065.958	1.767.230.023	19	-	-	-	-	Sangat Rendah
57	8.01.00.00.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	82.640.221.068	62.824.242.522	26	20	76,20	82.097.978.551	80,11	Tinggi
Total			1.865.958.851.112	1.635.528.312.730	2.191	1.378	88,98	1.673.525.149.874	83,60	Tinggi

Evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2024 dilakukan terhadap 2191 sub kegiatan pada seluruh perangkat daerah. Berdasarkan hasil reviu ditemukan sebanyak 3 Kecamatan yang sama sekali tidak melaporkan kinerja kegiatannya.

Dan dari tabel diatas dapat dilihat Realisasi dan Rata-rata kinerja dalam evaluasi RKPD tahun 2024 masih ada yang predikat kinerjanya tergolong rendah bahkan sangat rendah, hal ini dikarenakan beberapa OPD tidak memasuka laporan realisasi kinerjanya dan data yang diterima dari OPD tidak diperoleh secara lengkap. Sehingga capaian target kinerja tidak dapat diukur atau tidak dapat dievaluasi.

Jumlah anggaran belanja langsung APBD tahun 2024 yang digunakan untuk melaksanakan 10 prioritas pembangunan mencapai Rp 1.865.958.851.112 dengan serapan anggaran oleh seluruh SKPD hingga Bulan Desember (triwulan IV) mencapai Rp 1.676.841.754.323 atau sekitar 86,61% terhadap APBD. Capaian ini tergolong sangat tinggi karena berada di kisaran 75 s/d 100%. Sedangkan untuk rata-rata realisasi kinerja kegiatan juga masuk ke dalam kategori tinggi yaitu mencapai 88,98 %.

Secara umum, evaluasi pelaksanaan Renja-OPD Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, telah dilaksanakan oleh OPD atau unit kerja. Meskipun demikian masih terdapat beberapa OPD yang penyerapan anggarannya tidak mencapai 100%. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024. dan ada beberapa kegiatan yang terdapat pada Renja Opd tidak dilaksanakan, dan belum semua OPD memahami tata cara pelaporan sesuai ketentuan yang ada.Secara tidak langsung kondisi ini mempengaruhi bagaimana penilaian capaian target kinerja yang berujung pada penilaian predikat kinerja yang dicapai oleh OPD tersebut. Jumlah program dan kegiatan dalam APBD tahun 2024 yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk mendukung 8 prioritas pembangunan adalah sejumlah 391 program, 1138 kegiatan, 2191 sub kegiatan, dan 13 sub kegiatan yang tidak dianggarkan di RKPD namun di anggarkan dalam DPA untuk dilaksanakan. Hasil evaluasi ini belum dapat disimpulkan sebagai rata-rata prestasi kinerja disebabkan ketersediaan data yang sangat minim. Penentuan target kinerja program dan kegiatan yang tidak terukur juga menyebabkan tidak seluruh capaian kinerja program dan kegiatan dapat dievaluasi dengan baik sehingga mempengaruhi penilaian tingkat capaian kinerja.

2.5.2. Evaluasi RPD Tahun 2024-2026 Tahap I (Tahun 2024)

Perumusan tujuan dan sasaran pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah, sehingga didasarkan pada visi, misi, analisa sasaran pokok, arah kebijakan dan isu strategis aktual Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Parigi Moutong. Sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005-2025. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024-2026 memasuki Tahap ke 4 (empat) atau tahap terakhir di RPJPD Kabupaten Parigi Moutong. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005 – 2025 memuat Visi Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong adalah: **“KABUPATEN PARIGI MOUTONG YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”** dengan misi sebagai berikut: (1) Mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan bijaksana. (2) Mewujudkan sumber daya manusia yang handal (3) Mewujudkan pertanian modern dan produktif (4) Mewujudkan tata ruang yang teratur, lingkungan hidup yang seimbang, terpelihara, asri, aman dan tertib.

Pemerintah kabupaten parigi moutong merumuskan tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026 yang didasarkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005-2025
2. Agenda pembangunan RPJMN 2020-2024
3. Agenda pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2025
4. Rumusan masalah yang ingin di tuntaskan oleh Kabupaten Parigi Moutong pada masa 3 (tiga) tahun mendatang
5. Isu-isu strategis yang diformulasikan untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dirumuskan, di tetapkan indikator dan target sasaran pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 – 2026 seperti tabel berikut. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026.

Tabel 2.56
Capaian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024

NO	PRIORITAS		SASARAN		SATUAN	Kinerja Awal Tahun 2021/2022*	Target Kinerja Tahun		kondisi akhir periode RPD	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR			Target 2024	Realisasi 2024		
1	Tata kelola birokrasi yang, efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	1	Kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	65,5	73	75	77
			2	Kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	Opini BPK terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Kualitas Pengelolaan Pendidikan yang berdaya saing	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,48	12,54	12,52	
					Rata rata lama sekolah	Tahun	7,74	7,87	8,05	
			2	Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	Usia Harapan Hidup	Tahun	64,35	65	68,72	
					Prevalensi Stunting	persen	27,4		22,3	
			3	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka kemiskinan	Tahun	15,28	14,28	14,20	

NO	PRIORITAS		SASARAN		SATUAN	Kinerja Awal Tahun 2021/2022*	Target Kinerja Tahun		kondisi akhir periode RPD
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR			Target 2024	Realisasi 2024	
3	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	1 Meningkatnya produksi pertanian, Perikanan dan Kehutanan	PDRB pertanian, perikanan, dan kehutanan	Berlaku	7.833.582	9.456.366	10.146.681	10.911.741
					Konstan	5.190.589	5.747.094	5.960.886	6.186.804
					Berlaku	456.642	520.256	545.437	572.545
			2 Meningkatnya pengolahan hasil komoditi unggulan	PDRB Pengolahan	Konstan	275.051	302.453	312.949	324.277
					Rupiah	123,732,228,049	186,352,848,144	217,663,158,191	248,973,468,240
			1 Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	50	65,5	65,6	65,7
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	97,55	94,76	94,86	94,9
				Indeks Tutup Lahan	Poin	73,11	78,69	78,79	78,8
			2 Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	108,39	108,39	108,39	108,39

NO	PRIORITAS		SASARAN		SATUAN	Kinerja Awal Tahun 2021/2022*	Target Kinerja Tahun		kondisi akhir periode RPD
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR			Target 2024	Realisasi 2024	
5	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Ketaatan terhadap RTRW	1	Meningkatnya ruang terbuka hijau	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	18	18,5	19 -20

2.5.3. Evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2024

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk pelaksanaan, pemantauan teknis pelaksanaan dan Evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, wajib dilaksanakan oleh OPD yang berada diwilayah dimana kegiatan itu dilaksanakan. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja.

Pada Awal Tahun 2024 Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan total alokasi pagu DAK sebesar Rp.371.056.289.530,- dengan pembagian DAK Fisik Sebesar Rp.129.334.098.948, dan Non Fisik sebesar Rp. 241.722.190.582,- untuk pagu DAK Fisik semuanya adalah masuk sebagai DAK penugasan yaitu sebesar Rp. 127.477.391.260 Berikut memperlihatkan Realisasi Dana Alokasi Khusus Perbidang OPD di 6 Bidang DAK

Tabel 2.57
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Perbidang OPD
TAHUN 2024

No.	Bidang/ Sub Bidang/ Tema	Perencanaan Kegiatan						Mekanisme Pelaksanaan			Target Pelaksanaan		Realisasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pagu (Rp)	Vol	Sat	Swakelola		Kontraktual				Keuangan		Fisik				
					Rp	Vol	Rp	Vol	Rp	Vol	Rp	%	Vol	%			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18		
1	Bidang Pendidikan	39.234.877.000	225		32.991.100.382	195	4.886.598.000	30	40.289.398.975	225	40.289.398.975	102,69	93	47			
	1 Subbidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	799.802.000	7		448.129.700	7	0	0	665.479.700	7	665.479.700	100	6	90	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	2 Subbidang SD	24.586.357.000	146		21.390.638.303	116	3.194.200.000	30	26.821.879.396	146	26.821.879.396	100	0	26	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
	3 Subbidang SMP	13.848.718.000	72	Ruang /Paket /Kegiatan	11.152.332.379	72	1.692.398.000	0	12.802.039.879	72	12.802.039.879	92,44	87	25	Dinas Pendidikan dan kebudayaan		
2	Bidang Kesehatan	24.148.801.948	35		193.040.000	1	23.349.000.400	27	23.542.040.400	28	18.743.980.183	77,62	35	80	Dinas Kesehatan, RSUD Tombolotutu dan RSUD Buluye Napoae Moutong, RSUD Anuntaloko		

No.	Bidang/ Sub Bidang/ Tema	Perencanaan Kegiatan						Mekanisme Pelaksanaan			Target Pelaksanaan		Realisasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pagu (Rp)	Vol	Sat	Swakelola		Kontraktual				Keuangan		Fisik				
					Rp	Vol	Rp	Vol	Rp	Vol	Rp	%	Vol	%			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18		
	1 Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan	24.148.801.948	35		193.040.000	1	23.349.000.400	27	23.542.040.400	28	18.743.980.183	77,62	35	80	Dinas Kesehatan, RSUD Tombolotutu dan RSUD Buluye Napoae Moutong, REUD Anuntaloko		
3	Bidang/ Subbidang Jalan	35.331.475.000	18		425.000.000	0	33.639.682.723	15	33.864.682.723	18	33.864.682.723	95,85	17,2	100			
	1 Nontematik (Jalan)	26.320.926.000	11,30		200.000.000	0	24.904.424.723	11	25.104.424.723	##	25.104.424.723	100	12,7	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
	2 Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	9.010.549.000	6,50		25.000.000	0	8.735.258.000	4	8.760.258.000	5	8.760.258.000	100	5	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		
4	Bidang/ Subbidang Irigasi	3.921.577.000	228		192.000.000	0	3.243.953.900	0	3.355.913.700	228	3.355.913.700	85,58	228	100			
	1 Tematik Pengembangan Food Estate	3.921.577.000	228		192.000.000	0	3.243.953.900	0	3.355.913.700	228	3.355.913.700	100	228,	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan		

No.	Bidang/ Sub Bidang/ Tema	Perencanaan Kegiatan						Mekanisme Pelaksanaan			Target Pelaksanaan		Realisasi				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pagu (Rp)	Vol	Sat	Swakelola		Kontraktual				Keuangan		Fisik				
					Rp	Vol	Rp	Vol	Rp	Vol	Rp	%	Vol	%			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18		
																Ruang dan Pertanahan	
5	Bidang/ Subbidang Pertanian	19.180.000.000	115		14.970.000.000	90	4.180.349.565	25	19.000.349.565	115	18.671.178.365	97,35	97	100			
	1 Tematik Pengembangan Food Estate (FE)	19.180.000.000	115		14.970.000.000	90	4.180.349.565	25	19.000.349.565	115	18.671.178.365	97,35	97	100	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pekerunan/Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
6	Bidang/ Subbidang Kelautan dan Perikanan	7.517.368.000	115		375.868.400	0	7.036.616.631	0	7.425.005.897	0	7.424.117.937	98,76	0	100			
	Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	7.517.368.000	115		375.868.400	0	7.425.005.897	0	7.425.005.897	0	7.424.117.937	98,76	0	100	Dinas Kelautan dan Perikanan		
Jumlah		129.334.098.948	736		49.147.008.782	286	76.336.201.219	97	127.477.391.260	614	122.349.271.883	94,60	471	100			

Dari tabel diatas dapat dilihat progres penyerapan DAK Fisik Kabupaten Parigi Moutong perbidang atau sub bidang DAK berdasarkan laporan masuk sampai dengan periode pelaporan triwulan IV tahun 2024, realisasi capaian persentasi keuangan sebesar Rp.122.349.271.883,- atau 94,60%.dan realisasi fisik rata-rata mencapai 100%.

Secara umum, pelaksanaan DAK perbidang DAK Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 , telah dilaksanakan oleh OPD atau unit kerja. Meskipun demikian masih terdapat beberapa Bidang DAK yang realisasi keuangan dan Fisiknya belum mencapai 100% dan faktor penyebabnya.seperti yang terdapat pada Bidang pendidikan pada DAK Reguler permasalahannya 1 sekolah gagal kontrak yang disebabkan legalitas lahan /tanah bermasalah pihak pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan di lapangan sampai ada legalitas lahan/tanah tersebut.sehingga progres fisik yang dicapai masih dibawah 70%.bidang pertanian di sebabkan realisasi keuangan dan fisik hanya mencapai 94,74% di karenakan ada satu paket pekerjaan Jalan Usaha Tani (JUT) hortikultur pada Kelompok tani moosoung desa lombok barat Kecamatan Tinombo, tidak dilaksanakan hingga sehingga capai keungan dan Fisik tidak mencapai 100%.

Indikator kinerja daerah (IKD) berdasarkan indikator tujuan dan indikator kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2024 belum sepenuhnya dapat dievaluasi, Hal ini disebabkan belum tersedianya data pendukung atau tidak diperoleh dari perangkat daerah terkait dan sumber lainnya.

Pelaksanaan evaluasi kinerja RKPD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 antara lain dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengetahui program dan kegiatan yang terlaksana dengan capaian maksimal dan yang realisasi capaiannya belum secara maksimal. Hal ini penting menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat adalah mengidentifikasi dan menetapkan serangkaian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan secara proporsional.

2.6. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Perumusan permasalahan daerah didasarkan pada hasil telaah capaian pembangunan daerah yang terukur melalui indikator makro pembangunan. Indikator yang menjadi perhatian utama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase penduduk miskin, Indeks Gini, serta tingkat inflasi. Dalam merancang permasalahan pembanguna daerah, capaian indikator makro pembangunan dan gambaran kondisi yang ditelaah selama 10 tahun terakhir, serta membandingkannya dengan indikator pada tingkat provinsi dan nasional yang disajikan pada Tabel 2.56, berikut.

Tabel 2.58
Perbandingan Capaian Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional

Indikator Makro Pembangunan	Wilayah	Kondisi Awal (2022)	Gambaran Kondisi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Parigi Moutong	66,26	Capaian IPM Kabupaten Parigi Moutong dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2022), menunjukkan terjadinya peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,67 persen per tahun, dari 61,98 pada Tahun 2013 menjadi 66,26 pada Tahun 2023. Namun demikian angka pencapaian IPM Kabupaten Parigi Moutong masih berada dibawah IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama periode yang sama, dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan jika dilihat dari peringkat pencapaian IPM dibanding dengan 11 kabupaten dan 1 kota, IPM Kabupaten Parigi Moutong tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 2013-2022, yaitu berada pada peringkat 9.
	Sulawesi Tengah	70,28	IPM Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2013, sebesar 65,79 dan meningkat menjadi 70,28 pada Tahun 2022, atau mengalami peningkatan sebesar 0,66 persen rata-rata per tahun selama periode 2013-2022.
	Nasional	72,91	Secara nasional IPM pada Tahun 2013, sebesar 68,31 meningkat menjadi 72,91 pada Tahun 2022, atau mengalami peningkatan sebesar 0,65 persen rata-rata per tahun selama periode 2013-2022.

Indikator Makro Pembangunan	Wilayah	Kondisi Awal (2022)	Gambaran Kondisi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Parigi Moutong	3,71	<p>Perekonomian Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun 2022 tumbuh sebesar 3,71 persen, angka tersebut lebih rendah dibanding Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah sebesar 15,17 persen maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen.</p> <p>Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong tersebut, didukung oleh 3 sektor utama yang memiliki kontribusi mencapai 71,38 persen terhadap PDRB, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 44,06 persen, Perdagangan sebesar 15,14 persen dan Konstruksi sebesar 12,18 persen.</p> <p>Selama sepuluh tahun terakhir (2013-2022), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Parigi Moutong sebesar 3,14 persen rata-rata per tahun, dari 8.839.460 juta rupiah pada Tahun 2013 menjadi 12.047.382 juta rupiah pada Tahun 2022.</p> <p>Capaian tersebut lebih rendah dari LPE Provinsi Sulawesi Tengah selama periode yang sama, yang mencapai 9,73 persen rata-rata per tahun, demikian pula lebih rendah jika dibanding dengan Laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,68 persen rata-rata per tahun.</p>
	Sulawesi Tengah	15,17	<p>Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2013-2022 adalah sebesar 9,73 persen, yaitu dari 68.219.319 juta rupiah pada Tahun 2013 menjadi 172.578.027 juta rupiah pada Tahun 2022.</p>
	Nasional	5,31	<p>Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2013-2022 adalah sebesar 3,68 persen rata-ratanya per tahun, dari 8.156.497,8 miliar rupiah pada Tahun 2013 menjadi 11.710.397,8 miliar rupiah pada Tahun 2022.</p>

Indikator Makro Pembangunan	Wilayah	Kondisi Awal (2022)	Gambaran Kondisi
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Parigi Moutong	1,71	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Parigi Moutong dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -6,05% per tahun. Pada Tahun 2013 TPT sebesar 3,0 persen menjadi 1,71 persen pada Tahun 2022.</p> <p>Sedangkan jika dibanding dengan penurunan TPT Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan lebih rendah, yaitu sebesar 4,27 persen pada Tahun 2013 menjadi 3,0 persen pada Tahun 2022 atau menurun sebesar -3,85 persen rata-rata per tahun selama periode yang sama.</p> <p>Selanjutnya TPT di Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun 2022, menempati urutan ke-3, setelah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Poso, dibanding 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.</p>
	Sulawesi Tengah	3,00	TPT Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 4,27 persen pada Tahun 2013 menjadi 3,00 persen atau turun sekitar -3,47 persen rata-rata per tahun selama periode 2013-2022.
	Nasional	5,86	Secara nasional TPT mencapai 5,86 persen, lebih tinggi jika dibanding dengan TPT Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Parigi Moutong. Namun demikian angka TPT nasional selama kurun waktu 2013-2022, juga mengalami penurunan dari 6,17 persen pada Tahun 2013 menjadi 5,86 persen pada Tahun 2022 atau turun sebesar -0,51 persen rata-rata per tahun.

Indikator Makro Pembangunan	Wilayah	Kondisi Awal (2022)	Gambaran Kondisi
Percentase Penduduk Miskin (%)	Parigi Moutong	14,63	<p>Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir persentase penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong cenderung menurun (membaik). Pada Tahun 2013 persentase penduduk miskin sebesar 17,03 persen menjadi 14,63 persen pada Tahun 2022 atau turun sekitar -1,51 persen rata-rata per tahun. Angka penurunan persentase penduduk Miskin selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Parigi Moutong tersebut lebih cepat dibanding angka penurunan penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah sebesar -1,49 persen rata-rata per tahun selama periode yang sama.</p> <p>Namun demikian jika dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah, Percentase Miskin Kabupaten Parigi Moutong menempati urutan ke-10 dari 13 kabupaten/kota.</p>
	Sulawesi Tengah	12,33	<p>Percentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2013 sebesar 14,31 persen dan mengalami penurunan menjadi 12,33 persen pada Tahun 2022, atau mengalami penurunan sebesar -1,49 persen rata-rata per tahun selama kurun waktu 2013-2022.</p>
	Nasional	7,53	<p>Percentase penduduk miskin Indonesia juga mengalami penurunan dari 8,52 persen pada Tahun 2013 menjadi 7,53 persen pada Tahun 2022 atau turun sebesar -1,23 persen rata-rata per tahun.</p>
Gini Rasio (Indeks Gini)	Parigi Moutong	0,279	<p>Indeks Gini Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 sebesar 0,300 mengalami penurunan sebesar -0,72 persen rata-rata per tahun selama sepuluh tahun terakhir menjadi sebesar 0,279 pada Tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan kategori tingkat ketimpangan rendah (< 0,50).</p> <p>Jika dibanding angka ketimpangan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 0,389 pada Tahun 2013 menjadi 0,308 pada Tahun 2022, atau turun sebesar -2,31 persen rata-rata per tahun.</p> <p>Penurunan angka ketimpangan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penurunan ketimpangan Kabupaten Parigi Moutong.</p>

Indikator Makro Pembangunan	Wilayah	Kondisi Awal (2022)	Gambaran Kondisi
			Mengindikasikan ketimpangan pendapatan penduduk di kabupaten ini relatif rendah dibanding provinsi dan nasional.
	Sulawesi Tengah	0,308	Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan sekitar -2,31 persen rata-rata pertahun selama 10 tahun terakhir dari 0,389 pada Tahun 2013 menjadi 0,308 pada Tahun 2022. Angka ini lebih rendah dibanding indeks gini nasional.
	Nasional	0,384	Indeks Gini Nasional pada Tahun 2013 sebesar 0,410, mengalami penurunan sekitar -0,65 persen rata-rata pertahun selama 10 tahun terakhir menjadi 0,384 pada Tahun 2022.
Tingkat inflasi (%)	Parigi Moutong	2,62	Pada Desember 2022, tingkat inflasi Kabupaten Parigi Moutong, mengacu pada Tingkat Inflasi Kota Palu, sebesar 2,62 persen. Jika dibanding dengan Inflasi Desember 2020 sebesar 4,81.
	Sulawesi Tengah	6,05	Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada dua kota yaitu Luwuk dan Kota Palu. Tingkat Inflasi Desember 2020 sebesar 3,32 persen mengalami kenaikan menjadi 6,05 persen pada Desember 2022.
	Nasional	5,51	Sedangkan secara nasional tingkat mengalami kenaikan dari 3,63 persen pada Desember 2020 menjadi 5,51 persen pada Desember 2020.

Sumber: Badan Pusat Statistik: Statistik Indonesia, 2024; Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2024; Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka, 2024 (Data diolah Kembali Sesuai Kebutuhan Identifikasi Indikator Makro Pembangunan)

Permasalahan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran tentang identifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan dalam mewujudkan kinerja pembangunan yang telah direncanakan. Secara khusus, upaya mengoptimalkan tata kelola pemerintahan perlu dipastikan karena menjadi syarat dalam mendukung pengelolaan sumber potensial untuk meningkatkan PAD agar dapat menambah kapasitas fiskal. Identifikasi permasalahan pembangunan yang didasari oleh celah capaian kinerja pembangunan saat ini dengan target yang direncanakan, bersumber dari faktor eksternal maupun faktor internal daerah, dirangkum sebagai berikut.

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

2. Angka Kemiskinan yang relatif tinggi;
3. Ketersediaan Lapangan Kerja yang rendah;
4. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi ;
5. Rawan Bencana;
6. Infrastruktur Dasar;
7. Ketimpangan antarwilayah;
8. Belum optimalnya penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
9. Belum terlaksananya rentang kendali secara optimal;
10. Digitalisasi;
11. Tata Kelola Pemerintahan;
12. Pemanfaatan Ruang;
13. Inovasi Daerah;
14. Iklim Investasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029 diuraikan berdasarkan bidang urusan pemerintah daerah, dirangkum pada tabel 2.57 berikut.

Tabel 2 59
Permasalahan Pembangunan Menurut Bidang Urusan
Kabupaten Parigi Moutong

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya ketersediaan Lapangan Kerja • Pendapatan per kapita masih rendah
Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kemiskinan yang relatif Tinggi • Penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya capaian rata-rata lama sekolah (RLS) • Rendahnya harapan lama sekolah (HLS) • Angka Partisipasi Murni (APM) masih rendah • Angka Putus Sekolah masih tinggi • Rendahnya aksesibilitas masyarakat adat terpencil • Belum meratanya tenaga pendidik • Sarana dan prasarana sekolah yang belum memenuhi standar nasional • Rendahnya Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH). • Angka Stunting masih tinggi • Angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi • Angka kesakitan penyakit menular masih tinggi • Angka Kesakitan penyakit degeneratif masih tinggi • Angka Obesitas masih tinggi

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Ketimpangan Pembangunan infrastruktur antarwilayah • Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar • Belum optimalnya rencana detail tata ruang kecamatan • Rendahnya capaian kemantapan infrastruktur jalan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kelayakan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman • Rendahnya kualitas infrastruktur sanitasi • Rendahnya cakupan air bersih • Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban masih rendah
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kemiskinan yang relatif Tinggi • Belum optimalnya pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) • Meningkatnya Jumlah penyandang masalah sosial • Belum optimalnya pemberdayaan kaum disabilitas • Belum optimalnya cakupan bantuan sosial dan jaminan sosial • Belum optimalnya sistem pendataan PMKS dan DTKS
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Belum optimalnya kelembagaan kesetaraan gender • Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan daerah • Belum optimalnya lembaga penyedia layanan perlindungan anak • Kurangnya ruang publik ramah anak • Belum terpenuhinya perlindungan hak-hak anak
Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau • Rendahnya standar jaminan mutu dan keamanan pangan
Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kualitas air, udara, dan luasan tutupan lahan • Belum optimalnya pengelolaan sampah • Rendahnya cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Desa maju masih kurang

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan • Belum optimalnya pengelolaan potensi desa • Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penyelenggaraan program KB • Rendahnya partisipasi penduduk dalam program KB • Belum optimalnya penerapan regulasi pernikahan anak
Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi • Rendahnya konektivitas antarwilayah dalam daerah
Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi • Belum optimalnya Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) • Belum meratanya akses jaringan informasi dan komunikasi • Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM bidang IT
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya jumlah koperasi dan UKM aktif • Rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan Koperasi • Terbatasnya akses UKM terhadap permodalan, teknologi informasi dan pasar, serta faktor produksi • Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi UKM • Rendahnya Kualitas SDM dalam pengelolaan UKM
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya produktivitas komoditas Pertanian • Menurunnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan • Rendahnya pemenuhan pupuk bersubsidi • Kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pertanian • Belum optimalnya penerapan TTG dalam peningkatan produksi pertanian • Kurangnya ketersediaan bibit bersertifikasi • Rendahnya kelompok tani yang dibina
Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya Pelaku Usaha yang belum mendaftarkan penerbitan Izin Usaha • Masih rendahnya minat Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Parigi Moutong • Kurangnya promosi potensi daerah • Kurangnya ketersediaan pasokan listrik untuk mendukung investasi • Proses penyelenggaraan pelayanan belum memenuhi azas satu pintu
Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sarana dan prasarana olahraga di kecamatan • Rendahnya prestasi pemuda dalam bidang keolahragaan • Kurangnya pembinaan atlet berprestasi • Kurangnya pembinaan organisasi kepemudaan
Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya produksi perikanan dan pemanfaatan sumberdaya ikan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kelompok nelayan dan pembudidaya ikan yang dibina • Rendahnya pemanfaatan teknologi pengolahan perikanan • Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya • Minimnya Akses permodalan bagi kelompok nelayan
Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya nilai tambah produk unggulan • Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar • Masih kurangnya pemasaran produk dan komoditi unggulan • Rendahnya stabilitasi harga komoditas pertanian
Pertambangan dan Penggalian	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan perizinan serta pengelolaan usaha pertambangan dan penggalian
Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasi antara data statistik dan data sektoral.
Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Benda, situs, dan Seni budaya belum dikelola secara optimal.
Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pelestarian bahan koleksi perpustakaan • Kurangnya pembinaan perpustakaan daerah • Kurangnya minat baca masyarakat • Kurangnya ketersediaan perpustakaan di setiap fasilitas umum dan pemerintah.
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengawasan/pengendalian internal pemerintah daerah
Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya pengelolaan arsip secara baku oleh Perangkat daerah • Kurangnya perawatan dan pemeliharaan arsip • Kurangnya pembinaan SDM kearsipan
Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya pengelolaan destinasi wisata. • Kurangnya promosi pariwisata • Kurangnya Kunjungan wisata. • Belum optimalnya penerapan Rencana Induk Pariwisata • Kurangnya ketersediaan sarana pendukung objek Pariwisata

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan ekonomi diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi daerah adalah mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, unggul serta inklusif. Tumbuhnya ekonomi daerah diarahkan mampu untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi daerah akan dipengaruhi oleh sumbangan masing-masing lapangan usaha/sector ekonomi sebagai pembentuk PDRB. Tentunya pertumbuhan sector ekonomi ini akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan, kebijakan anggaran, kemampuan pendanaan dan kondisi daerah.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan, maka sector-sektor ekonomi primer masih menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi seperti pertanian, industry, perdagangan dan jasa serta sector pariwisata tanpa mengabaikan sector-sektor lainnya. Kerangka kebijakan ekonomi daerah juga tetap disinergikan dengan kerangka kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah serta RPJMD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 - 2029.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah adalah kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro, serta kebijakan ekonomi yang berdasarkan analisa dan proyeksi dengan berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2026. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kondisi perekonomian daerah biasanya digambarkan dengan beberapa indikator seperti PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi dan lain-lain.

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Parigi Moutong dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional, dan daerah serta mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah serta sesuai arah dan kebijakan

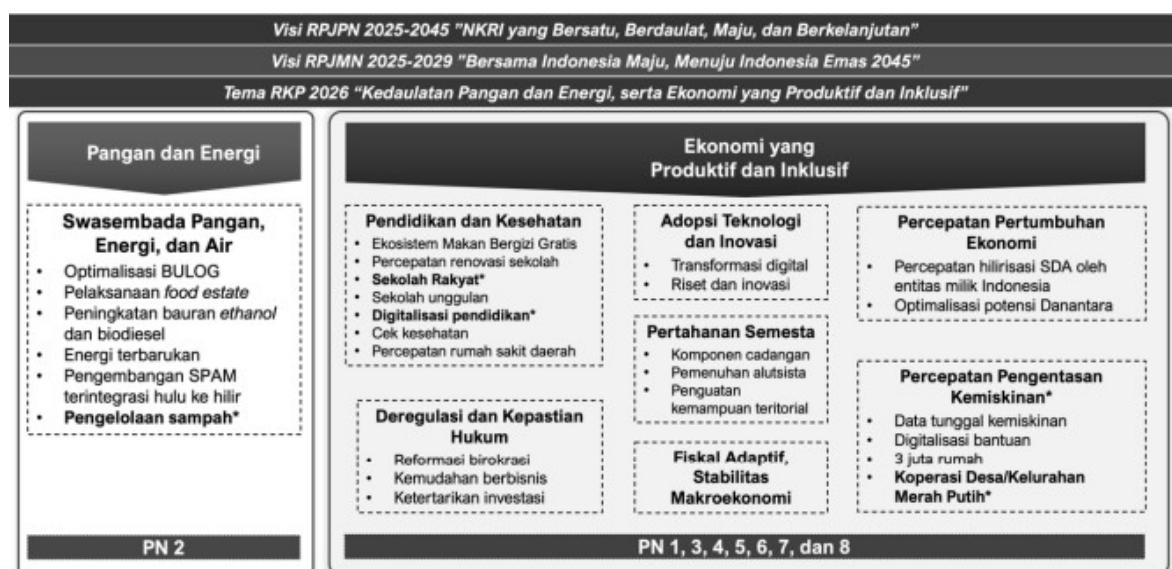
ekonomi dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 - 2029

3.1.1. Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi Indonesia tahun 2026 berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan relatif tinggi yang didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80–6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US\$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta (Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025). Arahan Presiden RI Bapak Prabowo menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan KSPP untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (blue food) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan,

keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan juga penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perum BULOG, menjadi lembaga di bawah Presiden, guna mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.

Kebijakan perekonomian Kabupaten Parigi Moutong sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global serta propinsi Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Parigi Moutong tahun 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024 serta memperhatikan juga kondisi perekonomian Nasional, Provinsi diawal tahun 2025.



Keterangan : *) Lima direktif presiden

Sumber : Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025

Gambar 3.1
Prioritas RKP tahun 2026

3.1.2. Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun arah kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2026 atau memasuki tahun ke-2 kebijakan “penguatan pondasi transformasi” Sulawesi Tengah difokuskan pada konsolidasi penguatan landasan transformasi ekonomi yang didukung oleh penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang dilaksanakan untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penunjang superhub ekonomi IKN dan Industri berbasis SDA melalui Hilirisasi dan produktivitas sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja dengan didukung transformasi digital dan penerapan

ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai wujud dalam upaya transformasi ekonomi. Selain itu, merujuk pada tema pembangunan Pulau Sulawesi yaitu penunjang superhub ekonomi Nusantara dan Industri berbasis SDA untuk menyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berfokus pada pengembangan industri hilirisasi mineral dan lumbung pangan nasional, dimana Sulawesi Tengah sebagai **Sentra Pertanian serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan**.

Industri hilirisasi SDA dilakukan untuk memberikan nilai tambah (add value) komoditas dan memanfaatkan semua output rantai pengolahan dapat bernilai ekonomis, memberikan manfaat bagi pendapatan daerah dan masyarakat serta menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan kebijakan lumbung pangan nasional dan daerah bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menjamin ketersediaan pangan. Kebijakan ini dilakukan dengan mengembangkan lumbung pangan masyarakat (LPM) dan program swasembada pangan yang didukung dengan langkah strategis, antara lain pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (food estate) yang berfokus pada tanaman padi, jagung, singkong, kakao, dan kopi dengan dukungan Sulawesi Tengah terhadap target Nasional yaitu penambahan luas panen hingga 4 juta hektare pada tahun 2029. Adapun Hasil riset diperlukan sebagai upaya dukungan (support effort) terhadap peningkatan produksi dan produktivitas komoditas dan tenaga kerja sedangkan inovasi sebagai pelengkap intervensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tataran implementasi pengelolaan potensi sumber daya alam dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar daerah, menjamin kelancaran pola distribusi dan perluasan pasar bagi komoditas unggulan daerah, meningkatkan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya usaha kecil menengah dan sektor informal serta mewujudkan peningkatan PAD sebagai sumber penerimaan daerah.

Arah kebijakan ekonomi pada pemenuhan target ekonomi Biru diarahkan pada peningkatan produktivitas SDA kamaritiman mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan melakukan transisi ekstraktif ke penciptaan nilai tambah dan produktivitas, serta mendorong inovasi dan kreativitas baru. Pengembangan ekonomi biru diharapkan dapat memperluas kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi, seperti pariwisata berkualitas, pengembangan energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan industri pengolahan berbasis sumber daya laut. Adapun Ekonomi Hijau Transisi energi difokuskan pada penerapan Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage

(CCUS) dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan berada pada kisaran 5,6 – 6,1 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah bersifat inklusif dan berdampak pada angka kemiskinan yang terus menurun, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, perwujudan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) dalam mencapai net-zero emission pada tahun 2060.

Beberapa program daerah Sulawesi Tengah sebagai bentuk implementatif kebijakan ekonomi daerah yang diharapkan dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, diantaranya: Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) untuk Sulawesi Tengah Bebas Rawan Pangan, Gerakan Petani Milenial untuk Sulawesi Tengah sebagai lumbung pangan Nasional, Smart Agropolitan dan Minapolitan untuk Sulawesi Tengah sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan nasional, Smart Tourism untuk penataan destinasi dan pembuatan paket wisata Terintegrasi dan Smart EKRAF: “Bertema Spesifik” menghasilkan produk yang mendukung penyelenggaraan paket wisata. (Me-link and watch kebutuhan industri wisata dengan BLK, memberdayakan Kelompok Usaha Bersama, Bumdes, kelompok pariwisata, UMKM, IKM, dan Koperasi).

Perwujudan dari hasil kebijakan ekonomi dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, dalam hal ini kemandirian fiskal dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui teknologi dan inovasi hilirisasi komoditas unggulan dan penguatan kerjasama dalam rangka peningkatan nilai investasi daerah . Selain itu, perlu dilakukan penguatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat dan terhindar dari kerentanan sosial yang dihadapi masyarakat miskin dan penyintas bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah. Bersamaan dengan itu, diharapkan hasil dan manfaat dari program prioritas dan lintas bidang atau wilayah dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman pada Prioritas dan Agenda Pembangunan Nasional yang termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) tahun 2026.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, agrowisata-maritimforestry dan

kondisi sosial ekonomi yang beranekaragam dan karakter fisik daerah unik yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut memerlukan strategi arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat untuk menciptakan peluang peningkatan investasi, pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru. Pelaksanaan program daerah yang didasarkan pada arah kebijakan di tahun 2026, lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah atau mengurangi gap (kesenjangan) antara kabupaten-kabupaten daratan dengan kabupaten-kabupaten yang memiliki ciri kepulauan seperti: Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Tojo Una-una.

Trigger pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah diantaranya: pertambangan nikel, gas dan hasil tambang lainnya serta industri hilirisasinya, pembangunan kawasan pertanian pangan dan perkebunan, perikanan dan hirilisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT), Kawasan Sentra Hirilisasi Rumput Laut, peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, melalui kegiatan hulu dan hilir yang terintegrasi, hilirisasi inovasi teknologi pertanian, peningkatan produksi tuna, rumput laut dan udang, generalisasi petani milenial, peningkatan kunjungan destinasi pariwisata, pembangunan pusat kebudayaan dan situs megalith, literasi digitalisasi, pembangunan ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan stunting, dan pada aspek yang lain secara paralel tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa tahun ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2025-2029.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada tahun 2026 diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada kebijakan moneter, fiskal, dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP). Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan konsumsi serta investasi. Prediksi kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,2-5,8 persen dan Inflasi tetap terkendali di bawah 1,5-3,5 persen. Sulawesi Tengah mendukung kebijakan ekonomi pemerintah dengan berupaya menyelesaikan ketimpangan PDRB per Kapita antar kabupaten dan juga provinsi Sulawesi Tengah dengan provinsi maju lainnya untuk mendongkrak posisi Indonesia agar tidak terjebak dalam negara-negara middle income trap dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi perekonomian dan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah tahun

2026 diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan selesainya pesta demokrasi terbesar karena melaksanakan pemilu serentak untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif MPR/DPR RI, DPD, DPRD prov/kab/kota serta kepala Daerah secara demokratis.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periodisasi 2025-2029 atau memasuki periodisasi awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 yang fokus tema pembangunannya yaitu peningkatan ekonomi yang berkelanjutan melalui Penguatan Hilirisasi SDA Unggulan, Peningkatan Kapasitas Riset Inovasi dan Produktifitas tenaga Kerja serta mengoptimalkan pengelolaan potensi Daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah dan pengurangan kemiskinan dan peningkatan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, diperlukan kerja keras dan saling bersinergi antar perangkat daerah, pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam arahan kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode-periode sebelumnya. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, andil sektor-sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi pada periodisasi 2025-2029 yang disesuaikan dengan Tema Pembangunan Sulawesi Tengah yaitu **Sebagai Sentra Pertanian serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan** dalam upaya memposisikan wilayah penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA dan sekaligus sebagai wilayah penyangga IbuKota Nusantara (IKN) dan Pintu Gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui Pengembangan Industri Hilirisasi Mineral dan Lumbung Pangan Nasional. Dimana Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang terletak strategis berada ditengah persimpangan antara Selat Makassar, Laut Sulawesi, Teluk Tolo, Teluk Tomini dan Teluk Bone serta 5 (lima) provinsi sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN), maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sumberdaya manusia yang berdaya saing.
2. Mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi swasembada pangan di Indonesia dengan membangun sentra-sentra pangan pertanian, perkebunan dan peternakan melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan, mempermantap status jalan penghubung antara kantong-kantong produksi dan produsen, melakukan regenerasi petani milenial.
3. Menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah bebas rawan pangan dengan tingkat produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang maksimal. Ketersediaan, keterjangkauan dan kemanfaatan pangan yang cukup dan memadai untuk memenuhi kebutuhan fisiologis masyarakat melalui upaya penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Meningkatkan PDRB Perkapita, mencegah diskriminasi sistemik dan meningkatkan strategi antisipasi terhadap perubahan iklim ekstrem.
4. Menjadikan Sulawesi Tengah sebagai kawasan industri 'raksasa' yang berisi berbagai fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel dengan kapasitas produksi puluhan juta ton tiap tahunnya sebagai upaya mendukung hilirisasi hasil tambang. kawasan industri yang dipersiapkan merupakan kawasan industri yang memiliki smelter nikel terintegrasi dengan hasil produk nikel yang beragam yang mampu memproduksi jenis nikel kadar rendah (limonite) hingga nikel kadar tinggi (saprolite) yang bisa memberikan nilai tambah untuk negara.
5. Peningkatan investasi daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah;
6. Perbaikan dan peningkatan pembangunan jaringan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas kawasan pertanian dan mobilitas jasa untuk memberikan stimulasi tumbuhnya investasi dan konektivitas antar wilayah dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
7. Pembangunan Kawasan Pertanian, kawasan perikanan, kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, membangkitkan UMKM, koperasi dan usaha mikro rakyat lainnya sebagai sumber penggerak utama pertumbuhan dengan menggali

- potensi unggulan daerah dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan kawasan produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya;
8. Peningkatan nilai tambah (add value) sumberdaya alam hasil olahan pada industri hulu dan inovasi teknologi hilirisasi berbasis agro, maritim, hasil hutan, mineral dan migas untuk penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara (bahan setengah jadi) dan industri hilirnya.
 9. Peningkatan distribusi pendapatan melalui peningkatan hasil produksi, nilai jual produk dan peluang pasar yang memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan penciptaan keseimbangan serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah;
 10. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan dan kelautan, pengembangan energi dan mineral dasar laut, pengembangan kawasan wisata bahari, kemampuan industri maritim dan perkapalan serta membangun transportasi laut antar pulau yang memadai.
 11. Mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan jalur distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah sehingga dapat menekan laju inflasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah.
 12. Mengalokasikan program dan kegiatan prioritas penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, program petani (regenerasi) milenial, program Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra-Pandu) untuk mengurangi desa rawan pangan, mengurangi disparitas wilayah, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penambahan dan pembangunan sarana/prasarana pelayanan rumah sakit. Arah kebijakan ekonomi daerah akan tertuang di dalam strategi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan menjadi keinginan kuat pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut serta membentuk tatanan ekonomi daerah yang diinginkan. Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat menjadi arahan untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah. Selain itu, dapat menjadi bahan perbaikan dari kebijakan-kebijakan yang lalu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kabupaten Parigi Moutong dapat digambarkan capaian pada tahun 2023, Target 2024 dan target 2025 dapat ditargetkan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Prospek Ekonomi Makro Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2024 -2026

INDIKATOR	Capaian 2024	Target 2025*	Target 2026*
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	3,58	5,01	5,13
Inflasi (% , yoy)	3,32	4,0	3,5
Pendapatan perkapita	51.058.960	56.473.562	62.110.000
Angka kemiskinan	14,20	14,10	13,11
TPT	2,10	2,5	1,77

Sumber : BPS Kab. Parigi Moutong

* Ranwal RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu regional yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi.

Nilai PDRB Parigi Moutong atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 23.47 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penaikan sebesar 1.81 triliun rupiah di banding tahun 2023 yang mencapai 21.66 triliun rupiah. penaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Parigi Moutong Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2022 – 2026

NO.	LAPANGAN USAHA	2022	2023	2024	2025**	2026**
1	2	4	4	5	6	7
1	PERTANIAN,KEHUTANAN,DAN PERIKANAN	8.497.939,1	9.190.142,3	9.969.494,3	10.911.741,01	10.396.681,00
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1.130.002,4	1.230.845,9	1.381.360,1	1.406.217,98	1.002.887,74
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	482.711,5	498.204,4	546.625,6	572.545,23	584.683,83
4	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	2.277,3	2.477,2	2.676,4	2.799,27	2.871,21

NO.	LAPANGAN USAHA	2022	2023	2024	2025**	2026**
5	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	13.136,78	13.857,40	14.684,1	19.465,05	19.850,09
6	KONSTRUKSI	2.560.572,87	2.750.270,80	3.037.893,9	3.612.178,23	3.706.126,00
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	3.044.997,3	3.324.079,3	3.563.710,5	4.201.546,49	4.291.492,99
8	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	1.010.004,9	1.102.759,9	1.212.202,5	1.148.993,39	1.148.993,39
9	PENYEDIAAN AKOMODASI	140.012,1	153.518,9	166.246,0	194.449,22	195.971,20
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	549.170,35	586.971,80	620.073,1	823.418,65	841.101,49
11	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	190.278,1	196.020,1	214.567,6	302.829,98	306.656,13
12	REAL ESTATE	202.640,75	230.529,90	256.791,5	255.088,77	264.193,39
13	JASA PERUSAHAAN	36.922,10	40.399,20	44.342,2	42.667,24	44.424,79
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1.041.658,93	1.102.418,70	1.136.212,3	1.537.734,26	1.571.197,05
15	JASA PENDIDIKAN	650.530,26	688.499,20	723.682,0	853.814,73	887.599,72
16	JASA KESEHATAN DAN SOSIAL	297.740,96	324.444,50	342.448,9	460.135,36	477.414,02
17	JASA LAINNYA	210.901,03	228.696,80	242.926,8	261.820,61	272.257,97
Produk Domestik Regional Bruto		20.061.496,6	21.664.136,3	23.475.937,6	24.564.186,82	26.607.445,48

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

** Ranwal RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029 (angka Proyeksi)

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penaikan, dari 12.47 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 12,92 triliun rupiah pada tahun 2024. Penaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, dipengaruhi inflasi.

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2022 – 2026

NO.	LAPANGAN USAHA	2022	2023	2024	2025*	2026**
1	2	3	4	5	6	7
1	PERTANIAN,KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	5.308.298,1	5.435.778,4	5.589.599,8	6.186,80	6.285.398,0

NO.	LAPANGAN USAHA	2022	2023	2024	2025*	2026**
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	592.794,3	616.652,0	648.866,2	766,82	862.522,0
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	284.046,6	291.696,6	301.996,2	324,27	331.562,0
4	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	2.069,0	2.211,2	2.377,7	2,42	2.475,6
5	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	7.157,84	7.394,62	7.684,3	8,56	8.739,4
6	KONSTRUKSI	1.467.711,59	1.506.355,53	1.555.998,5	1.867,99	1.923.237,6
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	1.824.424,5	1.930.507,7	2.015.545,4	2.361,68	2.397.414,8
8	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	588.356,1	619.774,1	660.685,9	635,37	641.799,0
9	PENYEDIAAN AKOMODASI	81.362,5	88.032,4	93.666,1	109,95	112.369,7
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	415.204,33	444.236,10	462.961,8	568,95	582.792,0
11	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	106.108,5	107.892,4	117.694,0	150,36	155.404,3
12	REAL ESTATE	130.163,65	137.734,92	144.950,8	140,34	143.368,06
13	JASA PERUSAHAAN	22.602,51	23.856,97	25.086,0	24,03	24.427,1
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	556.584,60	574.184,84	581.106,0	731,84	752.531,3
15	JASA PENDIDIKAN	377.427,28	394.713,37	405.615,4	466,60	474.051,0
16	JASA KESEHATAN DAN SOSIAL	162.714,68	170.960,75	179.955,2	197,78	201.959,7
17	JASA LAINNYA	120.355,50	127.521,09	132.790,5	142,02	144.436,6
Produk Domestik Regional Bruto		12.047.381,6	12.479.502,9	12.926.579,8	13.969,41	14.685,85

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

** Ranwal RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029 (angka Proyeksi)

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama tiga tahun terakhir (2021-2023) struktur perekonomian Parigi Moutong didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Parigi Moutong.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Parigi Moutong pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Parigi Moutong atas dasar harga konstan 2010, mencapai 12,92 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 12,47 triliun rupiah pada tahun 2023. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif.

3.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Nilai PDRB per kapita Parigi Moutong atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 tercatat sebesar 47,64 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 51,05 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga.

Tabel 3.4
PDRB Perkapita Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha (Ribu Rupiah) Tahun 2010-2024

PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Atas Dasar Harga Berlaku	39.124	41.504	44.628	47.645	51.059
Atas Dasar Harga Konstan	25.249	26.148	26.800	27.446	28.115
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK/2010	5,77	3,56	2,49	2,41	2,44

Sumber : BPS, PDRB Kab. Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

3.1.3 Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha

Selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,58 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 3,59 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi dapat kami sajikan sebagai berikut :laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar harga Konstan menurut lapangan usaha pada tabel 3.5

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 – 2026

NO.	LAPANGAN USAHA	2022	2023	2024	2025**	2026**
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	PERTANIAN,KEHUTANAN,DAN PERIKANAN	2,27	2,40	2,83	3,79	8,43
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	2,23	4,02	5,22	6,20	7,38
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	3,27	2,69	3,53	3,62	5,41
4	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	7,21	6,87	7,53	5,31	6,98
5	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	3,12	3,31	3,92	4,62	10,76
6	KONSTRUKSI	4,50	2,63	3,30	6,26	9,77
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	4,96	5,81	4,40	6,78	9,52
8	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	14,44	5,34	6,60	4,45	8,49
9	PENYEDIAAN AKOMODASI	8,67	8,20	6,40	8,05	10,81
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8,94	6,99	4,22	8,45	12,02
11	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	-0,74	1,68	9,08	7,42	12,3
12	REAL ESTATE	6,01	5,82	5,24	3,13	8,16
13	JASA PERUSAHAAN	5,69	5,55	5,15	2,96	6,76
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	0,01	3,16	1,21	5,92	10,99
15	JASA PENDIDIKAN	1,63	4,58	2,76	4,92	7,85

NO.	LAPANGAN USAHA	2022	2023	2024	2025**	2026**
16	JASA KESEHATAN DAN SOSIAL	4,57	5,07	5,26	5,40	12,31
17	JASA LAINNYA	4,65	5,95	4,13	4,47	7,69
	Produk Domestik Regional Bruto	3,71	3,59	3,58	5,01	5,13

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Parigi Moutong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

** Ranwal RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029 (angka Proyeksi)

Perkembangan struktur PDRB Kab. Parigi Moutong tahun 2023 diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan tahun 2024, karena Pembangunan masih bertumpuh pada sektor Pertanian dan Pengembangan pada sektor ekonomi, Pariwisata dan jasa. Kegiatan ekonomi disektor tersebut akan mendorong permintaan disektor perdagangan dan industri pengolahan. Sehingga akan mendorong perdagangan Internasional melalui kegiatan eksport dan Impor. Oleh karena itu peran Pemerintah kab. Parigi Moutong untuk terus mengembangkan produksi lokal yang berbasis masyarakat agar mampu bersaing dipasar internasional, nasional dan regional melalui perluasan Pasar dan peningkatan daya saing sehingga diharapkan akan mampu mendorong investasi Jangka Panjang.

Dengan demikian secara makro regional, kondisi perekonomian daerah kab. Parigi Moutong sangat mendukung terciptanya suasana optimis terhadap proyeksi perekonomian makro ekonomi, sehingga untuk mewujudkan Visi dan Misi Kab. Parigi Moutong sebagaimana yang tertuang didalam RPJMD 2025-2029, hal inilah yang meyakini Pemerintah Daerah Kab. Parigi Moutong untuk dapat mencapai tujuan karena didukung oleh faktor internal dan eksternal yang akan menciptakan percepatan maupun lompatan pembangunan.

3.1.4 Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2024 sebesar 3,32% lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi provinsi Sulawesi Tengah maupun tingkat inflasi nasional, namun tahun 2025 sampai 2026 tingkat inflasi Kabupaten Parigi Moutong di proyeksi menjadi 3,5%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak, sehingga mengakibatkan naiknya harga-harga secara umum, utama bahan-bahan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi ini didasari oleh faktor bahwa kondisi perekonomian nasional dan regional mengalami perbaikan-perbaikan baik terhadap kebijakan fiskal nasional maupun terhadap kebijakan distribusi barang dan jasa. Tabel 3.5 menunjukkan data inflasi tahunan sampai tahun 2024.

Tabel 3.6
Tingkat Inflasi Kab. Parigi Moutong
Tahun 2021-2024

TAHUN	KAB. PARIGI MOUTONG
(1)	(2)
2021	2,21
2022	4,98
2023	2,40
2024	3,32

Sumber: BPS, Kabupaten Parigi Moutong

Tabel 3.7
Proyeksi Inflasi Kab. Parigi Moutong
Tahun 2025 – 2026

TAHUN	PROYEKSI ANGKA INFLASI
(1)	(2)
2025*	4,0
2026*	3,5

Sumber:*)Ranwal RPJMD Kab.Parigi Moutong Tahun 2025-2029

3.1.5. Ketenagakerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 mencapai 2,10 % dari total angkatan kerja yang ada. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan hal ini mengindikasi bahwa penyerapan tenaga kerja terjadi penurunan hampir di semua sektor.dikarenakan peningkatan jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja namun tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerap Adapun tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja disajikan pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Tingkat Pengangguran Terbuka dan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2022 – 2026

Tahun	Pengangguran Terbuka	TPAK
2022	1,71	74,05
2023	2,11	73,30
2024	2,10	74,68
2025*	1,89	73,69
2026**	1,77	77,83

Sumber : BPS Kab. Parimo dan Data diolah, * Angka Proyeksi RKPD Tahun 2025

**Angka sementara (Proyeksi) RPJMD Kab. Parigi Moutong Tahun 2025-2029

3.1.6 Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong dalam 4 (empat) tahun terakhir ini menunjukkan trend penurunan yang cukup signifikan namun dua

tahun terakhir mengalami kenaikan dimana penduduk miskin tahun 2022 sebesar 74.600 jiwa atau 14,63% menjadi 77.180 jiwa atau 14,91% tahun 2023 dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 74.570 jiwa atau 14,20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.8. Data tersebut menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong yang mengalami penurunan meskipun melambat. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya pengaruh kebijakan pemerintah yang mendorong kenaikan inflasi, perubahan iklim yang sulit diprediksi sehingga mempengaruhi jadwal tanam dan akibat perubahan tersebut juga menyebabkan terjadinya bencana alam di beberapa daerah kecamatan dan desa di Kabupaten Parigi Moutong.

Tabel. 3.9
Penduduk Miskin Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2021 – 2024

TAHUN	JUMLAH JIWA	(%)
2021	76.790	15,28
2022	74.600	14,63
2023	77.180	14,91
2024	74.570	14,20

Sumber : BPS, Kab Parigi Moutong

Tabel. 3.10
Proyeksi Penduduk Miskin Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2025-2026

TAHUN	JUMLAH JIWA	(%)
2025	71.880	13,51
2026	71.200	13,30

Hasil RAKORTEKBANG (11 April 2025)

Dengan memperhatikan tabel 3.9 penurunan jumlah penduduk miskin tahun-tahun sebelumnya, maka proyeksi penurunan jumlah penduduk miskin tahun-tahun yang akan datang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan program/kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Oleh karena itu proyeksi penurunan jumlah penduduk miskin tahun 2025 sebesar 2.520 jiwa atau sebesar 0,1%. Dan tahun 2026 diproyeksikan akan turun sebesar 850. jiwa atau 0,17% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel. 3.11
Realisasi dan Proyeksi Penurunan Penduduk Miskin Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Realisasi								Proyeksi			
		2021		2022		2023		2024		2025*		2026*	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	76.790	15,28	74.600	14,63	77.180	14,29	74.570	14,20	71.880	13,51	71.200	13,30

Sumber: BPS (Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022-2025), (*)Hasil RAKORTEKBANG (11 April 2025)

Hal ini menjadi komitmen pemerintah kabupaten Parigi Moutong yang diimplementasikan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan didukung dengan berbagai program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah pusat.

Dengan keinginan yang kuat untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin, termasuk kemiskinan ekstrem di Kabupaten Parigi Moutong, Pemerintah Daerah telah menetapkan strategi jitu yang dapat dinikmati langsung pada sasaran kelompok masyarakat, khususnya penduduk miskin. Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 sebesar 223.871 jiwa yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) kecamatan dan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) desa dan 5 (lima) kelurahan/desa. Terbagi atas desil satu sejumlah 75.293 jiwa kelompok paling miskin, desil dua sejumlah 58.819 jiwa kelompok miskin dan desile tiga 44.754 jiwa dan desil empat 45.005 jiwa. Desil satu sejumlah 75.293 jiwa adalah masyarakat miskin ekstrem yang selayaknya mendapat perhatian khusus dari semua pihak, agar proses reduksi kemiskinan dapat berangsur terminimalisir, sehingga seluruh rumah tangga sasaran tersebut dapat terpapar pada intervensi program yang ada.

Untuk melihat indeks kedalaman kemiskinan dalam suatu periode tertentu di wilayah Kabupaten Parigi Moutong maka secara rinci dapat dilihat tabel 3.12 berikut ini:

Tabel. 3.12
Realisasi dan Proyeksi Indeks Kedalaman Kemiskinan
Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		2021	2022	2023	2024	2025*	2026*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,26	3,84	2,61	3,36	2,93	-

Sumber: BPS Kab. Parigi Moutong (*)*Hasil RAKORTEKBANG (11 April 2025)*

Jika dilihat perkembangan antar waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong periode Tahun 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan, pada tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan yaitu sebesar 2,61 % dan tahun 2024 yaitu sebesar 3,36%.

Untuk melihat indeks keparahan kemiskinan dalam suatu periode tertentu di wilayah Kabupaten Parigi Moutong maka secara rinci dapat dilihat tabel perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2021-2026 sebagai berikut ini :

Tabel. 3.13
Realisasi dan Proyeksi Indeks Keparahan Kemiskinan
Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		2021	2022	2023	2024	2025*	2026*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,95	1,37	0,64	1,08	0,94	-

Sumber: BPS Kab. Parigi Moutong (*)*Hasil RAKORTEKBANG (11 April 2025)*

Jika dilihat tabel tersebut di atas indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong selama periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, hanya berhasil turun di Tahun 2023 menjadi 0,64% kemudian di tahun 2024 kembali naik lagi menjadi 1,08%.

Dan diharapkan turun di tahun 2026 sebesar 0,81%.

3.1.7 Gini Rasio

Gini Rasio di Kabupaten Parigi Moutong selama periode 2021-2024 bergerak fluktuatif. Sepanjang tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Parigi Moutong yang diukur oleh nilai Gini Ratio pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,287. Namun pada Tahun 2022 gini ratio Kabupaten Parigi Moutong 0,279 hingga naik kembali pada tahun 2023 menjadi 0,298 dan pada Tahun 2024 menjadi sebesar 0,250. Tahun 2026 diperkirakan gini ratio Kabupaten Parigi Moutong bisa mencapai 0,230.

Tabel. 3.14
Realisasi dan Proyeksi Gini Rasio
Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		2021	2022	2023	2024	2025*	2026*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Gini Rasio	0,287	0,279	0,298	0,250	0,240	0,239

Sumber: BPS Kab. Parigi Moutong, (*)*Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2026*

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus rencana pendapatan dan belanja daerah. Pada dasarnya rencana pendapatan dan belanja daerah memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program, dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung

dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi,

Daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Dalam penyusunan anggaran yang digunakan untuk pencapaian program prioritas daerah tahun 2026 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
- (b) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal,
- (c) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya, Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparasi dan Akuntabilitas

Dalam mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab maka dalam penganggaran harus dapat menyajikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada

pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Efisiensi dan Efektivitas

Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan Transfer, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Adapun Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini :

Tabel 3.15
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Proyeksi RKPD Tahun 2026
4	PENDAPATAN	1.585.713.134.965,00	1.752.662.788.822,35	1.712.040.716.847	1.755.856.515.033	1.731.252.536.687
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.221.345.706,00	157.583.452.476,35	124.528.372.739	160.950.017.200	172.042.669.264
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.700.000.000,00	23.803.599.245,46	21.402.500.000	45.816.000.000	47.934.527.510
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.726.982.000,00	14.329.224.629,00	11.678.490.752	4.756.723.083	5.853.826.291
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg di Pisahkan	3.158.666.406,00	7.308.124.029,00	5.067.381.987	7.062.433.158	9.779.039.214
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	89.635.697.300,00	112.142.504.572,89	86.380.000.000,00	103.314.860.959	108.475.276.249
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.461.991.789.259,00	1.592.295.209.339,00	1.562.353.963.270,00	1.544.125.323.978	1.514.908.140.530
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.412.553.827.002,00	1.519.743.272.120,00	1.505.791.286.000,00	1.461.413.416.000	1.445.633.141.400
4.2.2	Transfer Antar Daerah	49.437.962.257,00	72.551.937.219,00	56.562.677.270,00	82.711.907.978	69.274.999.130
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.500.000.000,00	2.784.127.007,00	-25.158.380.838,00	50.781.173.855	44.301.726.893
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00	2.784.127.007,00	2.558.986.000,00	13.600.000.000	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	22.599.394.838,00	37.181.173.855 -	44.301.726.893 -

Sumber: BAPPENDA, BPKAD dan BAPPELITBANGDA Kab. Parigi Moutong (diolah) Tahun 2025

Dengan memperhatikan Tabel 3.15 tersebut diatas, maka proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong harus diupayakan menjadi sumber pembiayaan utama bagi belanja daerah di Kabupaten Parigi Moutong. Mulai Tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah, diharapkan dapat memperkuat posisi PAD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong secara keseluruhan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Parigi Moutong, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
2. Peningkatan pelayanan pajak dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi yang telah tersedia sebelumnya.
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan memperkuat database pajak serta perluasan

- obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
4. Perluasan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah bekerja sama dengan Bank RKUD sehingga masyarakat diberikan berbagai pilihan kemudahan tempat pembayaran pajak daerah;
 5. Pendayagunaan asset daerah;
 6. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
 7. Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah bidang pendapatan (*Law Enforcement*).
 8. Melakukan peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data baik dengan pemerintah pusat dan Propinsi dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak serta dana transfer lainnya.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2026 dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Kebijakan belanja tersebut dimulai sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pada proses pertanggungjawaban. Karena dalam proses tersebut harus memperhatikan arah kebijakan keuangan daerah yang juga merupakan kebijakan fiskal daerah, dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabel. Adapun arah kebijakan belanja daerah Tahun 2026 adalah arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan sekaligus rambu-rambu bagi pelaksanaan keuangan di

Kabupaten Parigi Moutong. Melalui arah kebijakan ini diharapkan pertama, keuangan daerah dapat menopang, bukan menghambat proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah. Kedua, diharapkan bahwa keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, diharapkan pula bahwa keuangan daerah dapat meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

Tabel 3.16
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Parigi Moutong

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Proyeksi RKPD Tahun 2026
1	2	3	4	5		
5.	BELANJA	1.605.525.433.498,00	1.830.151.199.049,80	1.728.834.503.385,00	1.776.868.987.800	1.724.252.536.687
5.1.	BELANJA OPERASI	1.126.306.352.456,00	1.272.025.469.916,80	1.194.377.710.422,00	1.334.079.827.199	1.328.445.501.867
5.1.1	<i>Belanja Pegawai</i>	675.405.892.466,00	630.041.917.271,00	710.503.845.489,00	861.830.722.624	862.615.148.614
5.1.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	313.980.319.886,00	534.640.227.088,80	385.964.418.526,00	430.251.500.797	462.574.131.252
5.1.3	<i>Belanja Bunga</i>	600.000.000,00	158.373.089,00	600.000.000,00	100.000.000	-
5.1.5	<i>Belanja Hibah</i>	134.120.140.104,00	15.336.237.300,00	94.301.079.380,00	40.435.503.928	3.256.222.000
5.1.6	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	2.200.000.000,00	2.764.651.250,00	3.008.367.027,00	1.462.099.850	
5.2	BELANJA MODAL	165.369.341.542,00	221.206.397.626,00	191.397.403.616,00	108.147.143.622	39.836.338.200
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	3.051.237.500,00	15.000.000.000,00	7.450.000.000	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	308.849.739.500,00	333.868.094.007,00	328.059.389.347,00	327.192.016.979	345.970.696.620

Sumber: BPKAD dan BAPPETITBANGDA Kab. Parigi Moutong (diolah) Tahun 2025

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga.

Belanja daerah tahun 2026 tetap dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Belanja Tahun 2026 telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Belanja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2026 antara lain :

- Penganggaran Belanja disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi anggaran serta diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dengan prinsip *Money Follow Program* dalam rangka pencapaian Tujuan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029.
- Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN serta operasional kantor dengan tetap mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

- c. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, memperluas penyediaan kesempatan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung arah kebijakan nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
- d. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- e. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2026 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya termasuk antisipasi terhadap potensi bencana yang cenderung meningkat beberapa waktu terakhir.
- f. Kebijakan terkait *mandatory spending* tetap dipertahankan. Pada tahun 2026 alokasi Bidang Pendidikan adalah minimal sebesar 20% dan bidang Kesehatan dialokasikan minimal sebesar Rp. 10%

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah salah satunya digunakan untuk menutupi defisit anggaran daerah Kabupaten Parigi Moutong. dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan

setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Gambaran realisasi dan proyeksi/target Pembiayaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut ini :

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Parigi Moutong

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Proyeksi Pembiayaan RKPD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.745.631.866,00	92.688.562.143,49	26.793.786.358,00	22.512.472.767 -	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20.745.631.866,00	92.688.562.143,49	26.793.786.358,00	22.512.472.767 -	-
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	933.333.333,00	1.700.000.000,00	10.000.000.000,00	1.500.000.000	7.000.000.000,00-
6.2.1	Pembentukan dana cadangan untuk pemilukada				-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	9.000.000.000,00	1.000.000.000,00	7.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	933.333.333,00	700.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
	NETTO PEMBIAYAAN DAERAH	19.812.298.533,00	90.988.562.143,49	16.793.786.358	21.012.472.767)	(7.000.000.000)-

Sumber: BPKAD dan BAPPELITBANGDA Kab. Parigi Moutong (diolah) Tahun 2025

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan, yaitu berupa SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;.
2. Pengeluaran pembiayaan, yaitu pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan diperlukan adanya kerangka yang jelas, akan memberikan arah bagi pelaksanaan urusan pemerintahan yang baik, terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025- 2029 yang memuat Visi **“PARIGI MOUTONG MAJU, MANDIRI, BERKELANJUTAN MELALUI GERBANG DESA”** dan dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata;
3. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing;
4. Memperkuat Ketahanan Ekologi Berbasis Sosial Budaya;
5. Melaksanakan Tata kelola Pemerintahan Yang Berkualitas.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025 - 2029, arah kebijakan Pembangunan Tahun 2026 direpresentatifkan dengan tema pembangunan daerah tahun 2026 yaitu “Memantapkan sinergitas dan kolaborasi dalam peningkatan pembangunan ekonomi, didukung oleh sumber daya manusia yang efektif, infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan”. Tema pembangunan ini telah disinkronkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. (Gambar 4.1)

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2026



“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”

“Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing”

“Memantapkan Sinergitas Dan Kolaborasi Dalam Peningkatan Pembangunan Ekonomi Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Efektif, Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan”

**Gambar 4.1
Tema Pembangunan Tahun 2026**

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diwujudkan sebagaimana rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2026 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 – 2029 disajikan pada tabel 4.I di bawah ini:

**Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran RKPD Tahun 2026**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja	Ket
					2024	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VISI : Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan Melalui Gerbang Desa							
MISI 1 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan		Tingkat kemiskinan	%	14.20	13,11	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (PTP)	%	2,10	1,77	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang Inklusif	Indeks kesejahteraan sosial yang Inklusif	%	50	52	
			Indeks Zakat Nasional	%	0,45	0,51	
		Meningkatnya angka partisipasi kerja	Rasio penduduk bekerja	%	49,68	42,02	
	Mewujudkan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah		Pertumbuhan ekonomi	%	3,58	5,13	
			Indeks desa	Nilai	0.707	0.717	
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas Koperasi dan UMKM	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB.	%	5	4,67	
			Rasio volume UMKM terhadap PDRB	-	-	-	
		Meningkatnya PDRB sektor Unggulan daerah	Rasio PDRB industri pengolahan terhadap PDRB ADHB.	%	-	6,48	
			PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rupiah (miliar)	-	10.396.681	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja	Ket
					2024	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 2 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur		Rasio PDRB penyediaan akomodasi Makan & minum (sektor pariwisata).	%	-	0,87	
			Meningkatnya pembangunan Perdesaan sebagai pusat Pertumbuhan ekonomi	Persentase Desa Mandiri	%	11,87	20,50
			Indeks infrastruktur daerah	%	56,72	58,05	
			Indeks kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan umum	%	70,05	71,59	
			Indeks kualitas Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	80,88	81,09	
			Rasio konektivitas Simpul transportasi Kabupaten	%	17,94	18,57	
			Rasio Elektrifikasi daerah	%	96,49	97,55	
Misi 3 : MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING	Meningkatkan Kulitas Pembangunan Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	67,21	70 - 71	
			Indeks Keluarga Sehat	%	0,291	0,491	
			Indeks Pendidikan	Indeks	68,97	70,33	
			Indeks Pembangunan Keluarga (I BANGGA)	Indeks	58,19	60,51	
			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,26	93,70	
Misi 4 : MEMPERKUAT KETAHANAN EKOLOGI BERBASIS SOSIAL BUDAYA	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Melalui Penguanan Sistem Sosial Budaya Dan Tata Kelola Ekologis Yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,81	77,32	
			Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	93,53	90,39	
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Yang Efektif Dan Ramah Lingkungan	Ton	NA	6084,09	
			Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	NA	27,54	
		Menurunnya	Penurunan Emisi	JUTA	NA	564.306,84	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja	Ket
					2024	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Emisi Gas Rumah Kaca (Grk)	GRK	TON CO2eq)			
		Meningkatnya Kapasitas Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan yang BerkelaJutan	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	(Lap. IPBK)	59	61,7	
		Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,67	0,69	
Misi 5 : MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Transparan, Dan Responsif	Terwujudnya Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	
			Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	
			Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-	
			Nilai Sakip	Nilai	65,27	77,00	
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	-	-	-	
			Indeks System Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	%	2,72	1,6	
			Tingkat Digitalisasi Arsip	%	10	10	
			Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	2	3	
			Indeks Akses Keuangan Daerah	%	3,24	3,35	
			Indeks Inovasi Daerah	%	49,36	55,13	

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. Prioritas dan sasaran pembangunan Parigi Moutong Tahun 2026 adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 - 2045 yang merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan, dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas dari target yang sudah ditetapkan yang dapat dilihat pada Bab VI tentang Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah.

Sasaran pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah yang akan dicapai pada akhir tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%
- 2) Indeks Modal Manusia 0,75
- 3) Tingkat kemiskinan menurun sebesar 6,5 – 7,5 %
- 4) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5 – 5,0 %
- 5) Rasio Gini : 0,377 – 0,380
- 6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 76,67

Selanjutnya sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai pada akhir tahun 2026 adalah;

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 8,3 – 11,0 %
2. Indeks Modal Manusia : 0,52 poin
3. Tingkat kemiskinan : 9,85 – 10,75 %
4. Tingkat Pengangguran terbuka : 2,22 – 2,75 %
5. Rasio Gini : 0,299
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (ILKHD) : 81,96 %

Berdasarkan perkembangan kondisi tahun 2024, fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan disemua bidang, dengan sebagian besar modal pembangunan berasal dari kekuatan sendiri. Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini

Tabel 4.2.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Satuan	Target
		Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang Inklusif	Indeks kesejahteraan sosial	%	52
			Indeks Zakat Nasional	%	0,51
		Meningkatnya angka partisipasi kerja	Rasio penduduk bekerja	%	42,02
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas Koperasi dan UMKM	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB.	%	4,67
			Rasio volume UMKM terhadap PDRB	%	-
		Meningkatnya PDRB sektor Unggulan daerah	Rasio PDRB industri pengolahan terhadap PDRB ADHB.	%	6,48
			PDRB sektor pertanian, kehutanan Dan perikanan	Rupiah (miliyar)	10.396.681
			Rasio PDRB penyediaan akomodasi Makan & minum (sektor pariwisata).	%	0,87
2	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Merata	Meningkatnya pembangunan Perdesaan sebagai pusat Pertumbuhan ekonomi	Persentase Desa Mandiri	%	20,50
		Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur Pekerjaan umum	Indeks kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan umum	%	71,59
		Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks kualitas layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	81,09
		Meningkatnya kualitas Simpul transportasi	Rasio konektivitas Simpul transportasi Kabupaten	%	18,57
		Meningkatnya rasio Elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	%	97,55
3	Terwujudnya Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	%	0,491
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	70,33
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Keluarga (I BANGGA)	Indeks	60,51
			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93.70
4	Memperkuat Ketahanan Ekologi Berbasis Sosial dan Budaya	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sampah Yang Efektif Dan Ramah Lingkungan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Ton	6084,09
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	27,54
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (Grk)	Penurunan Emisi GRK	JUTA TON	564.306,84

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Satuan	Target
		Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5	6
				CO2eq)	
		Meningkatnya Kapasitas Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Lap. IPBK)	61,7	
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Terwujudnya Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,69
			Indeks Reformasi Hukum	%	-
			Indeks Kualitas Kebijakan	%	
			Nilai Sakip	Nilai	77,00
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	%	-
			Indeks System Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	%	1,6
			Tingkat Digitalisasi Arsip	%	10
			Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	III
			Indeks Akses Keuangan Daerah	%	3,35
			Indeks Inovasi Daerah	%	55,13

4.3. ISU STRATEGIS KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Parigi Moutong, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah baik Kabupaten Parigi Moutong, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosila budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang. Uraian penjabaran isu strategis Kabupaten Parigi Moutong untuk Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada bagian berikut.

A. Isu Strategis Kemiskinan dan Pemerataan

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Kabupaten Parigi Moutong adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (basic needs access) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (sustainable livelihood) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, asset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasi, kelemahan jasmani dan psikologi, serta munculnya gejala kultur komodifikasi data di masyarakat, dengan memanfaatkan data untuk kepentingan mencari keuntungan sendiri.

Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas pertama dalam SDGs. Merealisasikan agenda SDGs menjadi strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2026. Meskipun persentase kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin

di Kabupaten Parigi Moutong masih bertambah pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2019 sebanyak 81,36 ribu atau 16,64 persen dari jumlah penduduk, menurun menjadi 78,76 ribu atau 15,85 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2020, menurun lagi menjadi 76,79 ribu atau 15,28 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 74,60 ribu atau 14,63 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong meningkat menjadi 77,18 ribu atau 14,91 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu jumlah di Sulawesi Tengah pada tahun 2019 sebanyak 410,36 ribu atau 13,48 persen dari jumlah penduduk, menurun menjadi 398,73 ribu atau 12,92 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2020, menurun lagi menjadi 404,44 ribu atau 13,00 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 388,36 ribu atau 12,33 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 penduduk miskin di Sulawesi Tengah meningkat menjadi 395,66 ribu atau 12,41 persen dari jumlah penduduk.

Jika dibandingkan rata-rata jumlah penduduk miskin se-Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong berada pada ranking ke-2 dalam hal persentase penduduk miskin (P0) dan berada diurutan pertama dalam jumlah penduduk miskin. Dalam hal kemiskinan ekstrim, jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong yang masuk dalam kategori ini sebanyak 29,94 ribu atau 5,96 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2021, meningkat menjadi 32,57 ribu atau 6,39 persen pada tahun 2022, dan menurun menjadi 12,47 ribu atau 2,41 persen pada tahun 2023. Sementara pada saat yang sama jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin ekstrim di Sulawesi Tengah sebanyak 97,91 ribu atau 3,15 persen dari jumlah penduduk, menurun menjadi 95,02 ribu atau 3,02 persen dari jumlah penduduk, menurun lagi menjadi 45,76 ribu atau 3,15 persen dari jumlah penduduk. Selama dua tahun terakhir kemiskinan ekstrim di Kabupaten Parigi Moutong dapat diturunkan sekitar 3,98 persen sementara pada saat yang sama di Sulawesi Tengah persentase kemiskinan ekstrim dapat diturunkan sebesar 1,58 persen.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral dan perlu saling bersinergi. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka penaggulangan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif termasuk penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT); penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencaharian yang

layak serta berkelanjutan. Untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut, perlu adanya kemitraan, baik antara Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah/Swasta/Masyarakat atau Komunitas Peduli, maupun sinergi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Desa. Sasaran dan permasalahan pokok penyebab kemiskinan sudah terdata dengan baik, yang utama adalah terbangunnya komitmen semua pemangku kepentingan untuk menyepakati program dan kegiatan di sektor nya masing-masing agar target penurunan angka kemiskinan pada 5 tahun ke depan dapat tercapai.

B. Isu Strategis Tingkat Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerjasama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada untuk mampu menyerapnya. Sedangkan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Isu pengangguran di Kabupaten Parigi Moutong untuk 5 tahun ke depan menjadi perhatian penting. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Parigi Moutong menurun meningkat antara tahun 2019-2021 yaitu berturut-turut 2,36 persen, 2,70 persen dan 2,97 persen dan dapat ditekan pada tahun 2022 pada angka 1,71 persen, namun meningkat lagi pada tahun 2023 pada angka 2,11 persen.

Secara umum TPT Kabupaten Parigi Moutong lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Tengah yang pada 2019-2023 terakhir berturut-turut 3,11 persen, 3,77 persen, 3,75 persen, 3,00 persen dan 2,95 persen. Walaupun demikian kondisi ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong agar APBD dan kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan daya ungkit yang besar untuk mengurangi tingkat pengangguran. Perhatian terhadap pengangguran perlu diberi porsi yang lebih untuk mengatasi kondisi ini. Kebanyakan TPT berada di bawah garis kemiskinan.

Isu pengangguran harus dapat diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan program oleh Pemerintah Daerah, antara lain dengan memperluas lapangan pekerjaan,

melalui upaya menarik investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri agar mendirikan ruang usaha padat karya. Untuk itu perlu kemudahan prosedur investasi dan ketersediaan peruntukan tata ruang industri yang memadai. Upaya lain yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi pengangguran adalah dengan mengembangkan sektor informal. Saat ini, sektor informal menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Sektor informal merupakan salah satu alternatif kesempatan kerja yang mampu menampung tenaga kerja tanpa persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan dan keterampilan kerja.

Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang memudahkan tenaga kerja memasuki sektor ini dan semakin mengukuhkan kehadirannya sebagai penyanga terhadap kelebihan tenaga kerja. Dalam beberapa hal, sektor informal lebih dapat beradaptasi dan tidak terganggu oleh manajemen operasional yang kaku. Dalam periode krisis perekonomian nasional, sektor informal yang bersifat adaptif dan lentur, masih tetap bertahan bahkan mampu mengembangkan peluang-peluang usaha dibandingkan dengan perusahaan besar. Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik khas seperti bidang kegiatan produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja, dan teknologi yang dipakai relative sederhana.

C. Isu Strategis Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasil pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tersebut, IPM Kabupaten Parigi Moutong menurun dari 65,47 poin pada Tahun 2019, menjadi 65,44 poin pada Tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 65,82 poin pada Tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 66,26 poin pada Tahun 2022. Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Parigi Moutong meningkat menjadi 67,11 poin. Dilain pihak IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat dari

69,50 poin pada Tahun 2019, menjadi 69,55 poin pada Tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 69,79 poin pada Tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 70,28 poin pada Tahun 2022. Pada tahun 2023 IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat menjadi 70,95 poin

Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Parigi Moutong dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 sebesar 2,50 persen lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 2,09 persen. Komponen utama yang menjadi tolok ukur pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah sector ekonomi, sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Kemampuan ekonomi yang dikur dengan belanja per kapita Kabupaten Parigi Moutong menurun dari Rp.9808 ribu pada tahun 2019 menjadi menjadi Rp.9.641 ribu pada tahun 2020. Tetapi pada tahun 2021 pengeluaran per capita masyarakat meningkat menjadi Rp.9.675 pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi Rp.10.063 ribu pada tahun 2022. Pada tahun 2023 pengeluaran per capita masrakat Kabupaten Parigi Moutong menjadi Rp. 10.471ribu.

Derajat kesehatan dan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), yang pada Tahun 2019 mencapai 63,94 tahun. AHH Kabupaten Parigi Moutong meningkat menjadi 64,30 tahun pada tahun 2020 dan 64,35 tahun pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, UHH Kabupaten Parigi Moutong masing-masing sebesar 64,35 tahun dan 64,62 tahun. Angka Harapan Hidup yang semakin meningkat bagi penduduk Kabupaten Parigi Moutong membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang mempunyai Angka Harapan Hidup tinggi mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia produktif.

Sedangkan pembangunan sektor pendidikan Kabupaten Parigi Moutong difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun yang memungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Parigi Moutong masih berjalan relative lamban. HLS Kabupaten Pari Moutong meningkat dari 12,46 pada tahun 2019 menjadi 12,47 pada tahun 2020. Peningkatan ini terus berlanjut menjadi 12,48 pada tahun 2021, 12,50 pada tahun 2022 dan 12,51 pada tahun 2023.

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Parigi Moutong yang mengenyam Pendidikan formal dan non formal. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Parigi moutong pada tahun 2019 sebesar 7,47 tahun, meningkat menjadi 7,48 tahun pada tahun 2020. Peningkatan ini terus berlanjut menjadi 7,74 pada tahun 2021, 7,77 tahun pada tahun 2022 dan 8,04 tahun pada tahun 2023. Dari data tahun 2023, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Parigi Moutong rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 9. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Parigi Moutong telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

D. Isu Strategis Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif

Kondisi daya saing Kabupaten Parigi Moutong secara singkat dapat dilihat pada PDRB Pengeluaran. PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Dari data tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2023 sekitar 61,43 persen perekonomian Kabupaten Parigi Moutong ditunjang dari konsumsi masyarakat, sekitar 5,98 persen ditunjang oleh Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), 11,61 persen ditunjang oleh konsumsi pemerintah, 48,97 persen ditunjang oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dan -28,20 persen dari net ekspor.

Hal ini mengindikasikan bahwa daya saing Kabupaten Parigi Moutong masih relatif belum kuat dan investasi masih relatif kecil. Hasil negatif nett ekspor (ekspor-impor) yang mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi belum berjalan berjalan di rel yang benar; karena belum dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri (self sufficiency) sehingga harus memangkas ketergantungannya dengan ekonomi dari luar. Sementara, dari tren perkembangan kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Parigi Moutong, belum terjadi structural transformation sektor ekonomi, karena semakin meningkatnya dominasi sector pertanian dalam pembentukan PDRB. Pada dasarnya kondisi ini merupakan hal yang umum terjadi pada kawasan yang mengalami perkembangan ekonomi yang dimotori sector pertanian. Untuk itu, peran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengatur (sebagai regulator) agar sektor agraris tidak ditinggalkan, mengingat banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor ini. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga perlu untuk mendorong industrialisasi pertanian agar memberikan nilai tambah yang baik bagi usaha sektor primer. Di sisi lain, Pemerintah

Kabupaten Parigi Moutong harus tetap mendorong perkembangan sector sekunder dan tersier untuk dapat menopang dapat menopang perekonomian daerah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong wajib melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi lokal, diantaranya pengembangan sektor wisata, pembangunan pasar tradisional, fasilitasi merk, fasilitasi SNI, dan pendampingan manajemen pelaku usaha. Daya saing ekonomi lokal harus didukung dengan inovasi dan kreativitas daerah sehingga dapat terus menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru terutama pada lapangan usaha industri kreatif. Menumbuhkembangkan industri kreatif harus didukung oleh kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, jejaring informasi dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual.

E. Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Konektivitas

Penyediaan dan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan memadai dalam rangka menyediakan prasarana dasar bagi aktivitas penduduk di Kabupaten Parigi Moutong sampai saat ini belum terlaksana secara optimal. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas akan menggerakkan perekonomian daerah tertinggal dan mempercepat pemerataan kesejahteraan ke wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan, yang secara otomatis pula akan mengurangi kesenjangan. Konektivitas wilayah utara-selatan masih menjadi tantangan Parigi Moutong dalam menghadapi dinamika perekonomian ke depan. Pembangunan infrastruktur perhubungan khususnya jalan perlu diperhatikan karena hal itu dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Panjang Jalan menurut tingkat kewenangan pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong (km) yaitu 2.049,69 Km yang terdiri dari 399,60 Km jalan negara, 46,47 Km jalan provinsi dan 1603,89 Km jalan kabupaten. Hamper semua jalan negara mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah pusat melalui Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mendukung aksebilitas kawasan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Parigi Moutong pemerintah melaksanakan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan untuk mewujudkan sistem jaringan jalan yang andal, terpadu, dan berkelanjutan. Ruas Jalan Molosipat Lambunu Mepanga Tinombo Sepanjang 145 km diperuntukkan sebagai jalur strategis karena terkoneksi antara kawasan industri sektor perikanan, pariwisata dengan pusat perekonomian di Kabupaten

Parigi Moutong hingga jalur logistik penghubung lintas provinsi Sulawesi Tengah dengan Gorontalo. Untuk mendukung geliat ekonomi tersebut, pada tahun anggaran 2023 ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan preservasi ruas jalan tersebut senilai Rp.24,7 miliar.

Kegiatan itu bertujuan untuk menjaga kondisi kemantapan ruas jalan nasional. Selain itu, konektivitas antar wilayah di Parigi Moutong juga diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. Dengan konektivitas yang semakin lancar, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat membantu proses percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Kegiatan preservasi ruas jalan Molosipat-Lambunu-Mepanga-Tinombo meliputi pekerjaan preservasi dan pemeliharaan rutin jalan, rutin kondisi, *holding*, pemeliharaan berkala jembatan, rehabilitas jembatan, dan penanganan 5 buah *Box Culvert* yang tersebar dibeberapa titik sepanjang 145 km. Usaha ini dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan jalan nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di Parigi Moutong khususnya ruas jalan Molosipat-Lambunu-Mepanga-Tinombo.

Karena berada di sepanjang pesisir pantai timur, sehingga keberadaan jalur ini juga akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah timur serta dapat menurunkan biaya logistik guna meredam inflasi. Dengan ditingatkannya layanan jalan penghubung dua provinsi yaitu Sulawesi Tengah dan provinsi tetangga Gorontalo yang dikenal sebagai kawasan Pariwisata dan Industri sektor perikanan, diharapkan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong. Kondisi ini juga berdampak pada kesenjangan dengan wilayah utara yang memiliki akses lebih baik karena infrastruktur yang lebih baik. Pembangunan jalan pada wilayah ini diharapkan dapat meredam disparitas wilayah terutama wilayah utara dan selatan. Konektivitas dan aksesibilitas antara wilayah utara dan selatan Parigi Moutong juga diperlukan untuk pemerataan pembangunan.

Di sisi lain, sampai saat ini anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan jalan di Kabupaten Parigi Moutong masih relative kecil. Anggaran dari APBD Kabupaten Parigi Moutong yang dialokasikan untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan kabupaten tersebut jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan. Hal ini belum bisa memenuhi harapan masyarakat umum yang menginginkan jalan-jalan di

Kabupaten Parigi Moutong dalam kondisi baik dan mulus. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan sangat penting, dimana masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

Mengingat anggaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang sangat terbatas, maka peran masyarakat sebagai pengguna jalan yang paling penting adalah masyarakat dapat bersikap tertib dan teratur dalam menggunakan jalan sehingga dapat menurunkan/meminimalisir kerusakan jalan-jalan di Kabupaten Parigi Moutong, seperti tidak menggunakan jalan untuk kegiatan yang tidak sesuai, menggunakan kendaraan yang sesuai dengan kelas jalan, tidak membawa muatan yang melebihi/overtonase terhadap kapasitas jalan, dan sebagainya.

Jalan yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten terutama jalan ke kantong produksi akan memudahkan transportasi dan aksesibilitas ke lahan pertanian. Jalan ini diharapkan dapat menghubungkan antara lahan pertanian dengan jalan raya utama, serta menghubungkan antara lahan pertanian dengan sumber daya pertanian seperti irigasi dan input pertanian lainnya. Jalan kabupaten memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mempermudah transportasi hasil pertanian dan aksesibilitas/konektivitas ke lahan pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar lahan pertanian.

F. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Parigi Moutong. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani. Banyak agenda yang masih harus diselesaikan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam hal ketatalaksanaan, e-goverment sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal. Belum ada sistem informasi yang terintegrasi sehingga sistem dan aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing SKPD belum bisa terbangun dan terkonsolidasi dalam satu jejaring. Optimalisasi sistem informasi dalam wujud e-government yang terintegrasi menjadi salah satu indikator

keberhasilan dalam ketatalaksanaan birokrasi. Pemanfaatan teknologi sistem informasi tentunya akan mendukung kecepatan, ketepatan, kecermatan dan biaya murah dalam memberikan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dasar perlu menjadi perhatian utama, dimana pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari sisi aspek ketatalaksanaan yang kurang optimal juga telah memicu wewenang yang tumpang tindih, hubungan antarinstansi kurang serasi, pelayanan publik yang buruk hingga campur aduknya tugas negara dengan tugas pribadi terbukti telah memicu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Rendahnya kualitas pelayanan publik akan langsung mendapatkan respon dari masyarakat dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Salah satu wujudnya berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Pelayanan public yang berkualitas juga akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal guna mengurangi ketergantungan Kabupaten Parigi Moutong pada Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dalam membiayai belanja daerah. Pelayanan publik yang berkualitas akan dapat meningkatkan potensi PAD, sehingga target penerimaan PAD seharusnya tidak hanya dilakukan pada proyeksi pertumbuhan PAD tetapi juga harus berpatokan pada penghitungan potensinya.

G. Isu Strategis Ketimpangan Sosial Ekonomi

Ketimpangan yang serius dapat membahayakan keharmonisan dan persatuan Masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, ketimpangan tersebut bertolak belakang dengan prinsip keadilan sosial yang menuntut pembagian sumber daya dan kesempatan yang adil. Kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur telah menciptakan divisi yang merugikan bagi masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Parigi Moutong mencakup akses terhadap pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan lapangan kerja dan upah yang tidak adil. Ketimpangan sosial dan ekonomi ini menghambat potensi pembangunan sosial dan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebab yang menjadi ketimpangan tersebut antara lain kondisi demografi yang memiliki perbedaan, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja, dan perbedaan status sosial di

masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut, seperti keadilan sosial, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan, digunakan sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan publik yang bertujuan mengurangi kesenjangan.

Bila dilihat Tingkat kesenjangan pendapatan antar individu di Kabupaten Parigi Moutong pada lima tahun terakhir secara umum cenderung meningkat dan fluktuatif setiap tahunnya. pada tahun 2019 gini ratio Kabupaten Parigi Moutong sebesar 0,272 poin, meningkat menjadi 0,293 poin pada tahun 2020, menurun menjadi 0,287 poin pada tahun 2021, menurun lagi menjadi 0,279 poin pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 0,298 poin pada tahun 2023. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir ketimpangan sosial dan ekonomi, masih ada tantangan yang harus diatasi. Beberapa tantangan tersebut termasuk ketidakmerataan dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai wilayah dan ketimpangan kecamatan yang masih berlanjut. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat implementasi kebijakan, memperluas cakupan program yang sudah ada, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Hal yang menjadi penyebab pemerintah kurang maksimal dalam menjalankan kebijakan tersebut antara lain ketidaktepatan kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan perbedaan konteks sosial dan ekonomi di berbagai wilayah di Kabupaten Parigi Moutong sehingga mengurangi efektivitas dalam mengatasi ketimpangan. Anggaran yang kurang memadai juga menjadi faktor utama dalam kegagalan implementasi kebijakan. Jika pemerintah tidak memberikan dana yang memadai atau tidak mengelolanya secara efektif, program-program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah lima tahun ke depan perlu melakukan upaya seperti kebijakan redistribusi pendapatan lebih efektif dan tepat sasaran dari kalangan teratas ke kalangan terbawah, melalui serangkaian program dengan menempatkan keadilan sebagai penjurunya.

H. Isu Strategis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Kualitas Air, Kualitas Udara, maupun Kualitas Lahan dan Kualitas Air Laut secara umum merupakan issu strategis yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Parigi Moutong. Dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah antara lain penanganan persampahan. Meningkatnya volume sampah dan sistem pengelolaan yang belum optimal menjadi perhatian utama. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Usaha yang perlu

dilakukan kedepannya adalah pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Selain itu pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir juga perlu dilakukan. Cara lainnya adalah pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Hal yang juga perlu mendapat perhatian penting lima tahun ke depan di Kabupaten Parigi Moutong adalah kualitas dan kuantitas air. Menjaga kualitas air sebagai sumber kehidupan yang sangat penting menjadi hal yang esensial. Banjir yang sering terjadi di musim hujan, pencemaran laut di Teluk Tomini, pencemaran air sungai dan sumber air lainnya akibat industry pertanian, tata ruang yang belum terkelola harus ditanggulangi secara serius. Menghemat penggunaan air tanah adalah cara untuk mencegah penurunan muka air tanah yang dapat berdampak pada kualitas air tanah. Selain itu mencegah pencemaran air tanah adalah cara untuk menjaga kualitas kimia dan biologis dari air tanah. Selanjutnya menjaga kualitas dan kuantitas air juga dapat dilakukan dengan melindungi daerah tangkapan atau catchment area dengan cara menjaga vegetasi dan tanah di daerah tersebut, menghindari deforestasi atau pembalakan liar dan menerapkan konsep tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Dalam hal issu kebencanaan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam menjadi kunci untuk meminimalisir dampak negatifnya. Pendekatan-pendekatan perlu dilakukan terkait dengan penanggulangan bencana untuk lima tahun ke depan melalui peningkatan tata kelola resiko bencana yang ada, kolaborasi pentahelix atau dengan melibatkan semua pihak. Resiko bencana akan tetap ada, sehingga kesiapan dan monitoring harus selalu dilakukan guna mengurangi resiko. Ke depan pemerintah daerah perlu memiliki rencana mewujudkan pariwisata aman bencana, keluarga tangguh bencana sebagai langkah antisipasi menganggulangi bencana.

Dalam rangka menjawab isu strategi tersebut perlu dirumuskan tema pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2026. Adapun rancangan tema pembangunan Kabupaten Parigi Moutong 2026 adalah :

“MEMANTAPKAN SINERGITAS DAN KOLABORASI DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI, DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA YANG EFEKTIF, INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Untuk mewujudkan tema pembangunan daerah pada tahun 2026, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong agar dapat memberi arah pembangunan yang jelas. Selanjutnya agar setiap prioritas pembangunan dapat diimplementasikan lebih terarah, maka prioritas tahun 2026 difokuskan pada ruang lingkup kegiatan sebagaimana tabel 4.3 berikut ini :

**Tabel 4.3
Prioritas, Fokus dan Ruang lingkup Kegiatan Pembangunan
Tahun 2026**

PRIORITAS	FOKUS	KEGIATAN PRIORITAS
1 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana, bibit, pupuk, peningkatan kapasitas penyuluhan bidang pertanian dan perikanan • Penerapan Teknologi tepat guna • Diversifikasi dan perluasan lahan Pertanian • Pemberdayaan kelompok tani dan nelayan • Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan • Penguatan Kelembagaan pelaku Usaha dan bantuan modal usaha • Meningkatkan pemasaran hasil komoditi Pertanian dan Perikanan • Optimalisasi penciptaan lapangan kerja di bidang pertanian dan perikanan • Mengoptimalkan penerapan sistem informasi terpadu untuk kemudahan perizinan dan investasi
2 Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pengelolaan Pendidikan • Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Peningkatan Minat Baca dan literasi berbasis inklusi sosial • Peningkatan Akses menuju fasilitas pendidikan ▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan; ▪ Peningkatan ketersediaan obat dan logistik kesehatan; ▪ Penyediaan tenaga kesehatan dan pendistribusian yang merata di seluruh wilayah. ▪ Peningkatan Akses menuju fasilitas Kesehatan ▪ Melaksanakan Advokasi Pengendalian Penduduk dan KB • Meningkatkan Peran PKK dalam Upaya Percepatan

PRIORITAS		FOKUS		KEGIATAN PRIORITAS
				Penurunan Stunting <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuka lapangan kerja baru; ▪ Melaksanakan operasi pasar secara berkala ▪ Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai • Penyusunan Roadmap model peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin ▪ Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah • Pemberian Bantuan Modal Kerja • Merubah Status Desa pada Komunitas Adat Terpencil Menjadi Desa Adat
3	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata.	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan masterplan dan peta jalan pembangunan infrastruktur PU (jalan, irigasi, air bersih, drainase) • Identifikasi infrastruktur eksisting dan kebutuhan layanan dasar. • Rehabilitasi ringan dan pemeliharaan infrastruktur prioritas (jalan desa/kabupaten yang rusak ringan) • pemutakhiran basis data perumahan dan permukiman berbasis spasial dan sosial ekonomi. • Identifikasi kawasan permukiman kumuh dan rawan bencana untuk penanganan prioritas. • Menyusun rencana induk pengembangan simpul transportasi berbasis kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi. • Mengidentifikasi simpul transportasi yang kritis, terisolir, atau berpotensi tinggi namun belum optimal.
4	Memperkuat Ketahanan Ekologi Berbasis Sosial Budaya	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pengendalian sumber pencemaran air • Pengawasan dan pengendalian sumber pencemaran udara • Pemantauan luasan tutupan lahan • Melaksanakan simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan
5	Melaksanakan Tata kolola Pemerintahan Yang Berkualitas	1	Tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM melalui Diklat, workshop, Sosialisasi; • Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan • Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah; • Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; • Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah.

Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Tahun 2026, Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dan Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,Dan Prioritas
Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026
1	2	3
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	Melaksanakan Tata kolola Pemerintahan Yang Berkualitas
2	Memantapkan Sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata.
4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial, dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelundupan	Melaksanakan Tata kolola Pemerintahan Yang Berkualitas
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memperkuat Ketahanan Ekologi Berbasis Sosial Budaya

Tabel 4.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2026

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2026	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2026
1	Berani Cerdas	Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing
		Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata.
2	Berani Sehat	Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing
		Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata.
3	Berani Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
		Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing
4	Berani Lancar;	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata.
5	Berani Menyala	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata.
6	Berani Makmur	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
		Memperkuat Ketahanan Ekologi Berbasis Sosial Budaya
7	Berani Berkah	Melaksanakan Tata kolola Pemerintahan Yang Berkualitas
		Memperkuat Ketahanan Ekologi Berbasis Sosial Budaya
8	Berani Harmoni	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata.
		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
		Memperkuat Ketahanan Ekologi Berbasis Sosial Budaya
9	Berani Berintegritas	Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing
		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
		Melaksanakan Tata kolola Pemerintahan Yang Berkualitas

Tabel 4.6.
Sandingan Prioritas dan Indikator Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2026

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sulawesi Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Indikator Kinerja Provinsi Sulawesi Tengah	Indikator Kinerja Kabupaten Parigi Moutong
1	Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	• Berani Berintegritas	Melaksanakan Tata kolola Pemerintahan Yang Berkualitas	1. Indeks demokrasi Indonesia 2. Indeks reformasi hukum 3. Indeks kerukunan beragama	1. Indeks demokrasi Indonesia 2. Indeks reformasi hukum 3. Indeks kerukunan beragama
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan Ekonomi Biru	• Berani Makmur • Berani Sejahtera • Berani Berintegritas	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	1. Indeks Daya Saing Daerah 2. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah 3. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal 4. Prevelensi tidak cukupan konsumsi pangan (prevalence undernourishment) 5. Konsusmsi listrik per kapita 6. Intensitas energi primer (SBM/Rp. Milyar) 7. Kapasitas Air baku 8. Persentase Akses rumah	1. Indeks ekonomi hijau 2. Prevelensi ketidak cukupan konsumsi pangan (prevalence undernourishment) 3. Pembentukan modal tetap Bruto 4. Tingkat inflasi 5. Nilai Tukar Petani (NTP)

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sulawesi Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Indikator Kinerja Provinsi Sulawesi Tengah	Indikator Kinerja Kabupaten Parigi Moutong
				<p>tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan</p> <p>9. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman</p> <p>10. Indeks Ekonomi Biru</p> <p>11. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Transformasi</p> <p>12. Indeks Ekonomi Hijau Daerah</p> <p>13. Indeks Kinerja Pengelolaan sampah</p> <p>14. Penurunan intensitas emisi (GRK)</p> <p>15. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati</p> <p>16. Indeks Kualitas lingkungan hidup (ILKH)</p>	
3	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	<ul style="list-style-type: none"> • Berani Cerdas • Berani Sehat • Berani Lancar • Berani Harmoni 	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata.	<p>1. Inklusi keuangan</p> <p>2. Total dana pihak ketiga/PDRB</p> <p>3. Aset Dana pensiun/PDRB</p> <p>4. Totak Kredit/PDRB</p> <p>5. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal</p> <p>6. Rasio volume usaha</p>	<p>1. Indeks infrastruktur daerah</p> <p>2. Rasio konektivitas simpul transportasi</p> <p>3. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman</p> <p>4. Ketahanan air</p> <p>5. Proporsi PDRB</p>

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sulawesi Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Indikator Kinerja Provinsi Sulawesi Tengah	Indikator Kinerja Kabupaten Parigi Moutong
	mengembangkan industry ekonomi kreatif serta mengembangkan agromaritim industri sentra produksi melalui peran aktif koperasi			koperasi terhadap PDRB 7. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi 8. Rasio kewirausahaan daerah 9. Rasio PDRB penyediaan makanan dan minuman 10. Jumlah Tamu wisatawan mancanegara 11. Proporsi PDRB Ekonomi kreatif terhadap PDRB	ekonomi kreatif 6. Produktifitas umkm, koperasi
4	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia SDM, Sains teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran Perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas	• Berani Cerdas • Berani Sehat • Berani Sejahtera	Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 2. Harapan lama sekolah 3. Hasil pembelajaran : a. Literasi b. Numerasi 4. Proporsi usia penduduk usia 15 tahun keatas yang berkualitas Pendidikan tinggi 5. Presentasi pekerjaan lulusan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian	1. Usia harapan hidup 2. Angka kematian ibu / 100.000 3. Pravelensi stunting 4. Penanganan tuberkolosis 5. Kecakupan kepesertaan jaminan Kesehatan 6. Hasil pembelajaran : a. Literasi b. Numerasi 7. rata-rata lama sekolah 8. Harapan lama sekolah

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sulawesi Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Indikator Kinerja Provinsi Sulawesi Tengah	Indikator Kinerja Kabupaten Parigi Moutong
				6. Usia harapan hidup 7. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (rata-rata anak per wanita) 8. Angka kematian ibu / 100.000 9. Pravelensi stunting 10. Penanganan tuberkolosis dan eliminasi schistosomiasis 11. Kecakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Provinsi 12. Indeks pembangunan kualitas keluarga 13. Indeks Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Pemuda 14. Indeks Ketimpangan gender 15. Indeks inovasi Daerah 16. Tingkat pengangguran terbuka 17. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan	9. Angka partisipasi sekolah 10. Presentasi pekerjaan lulusan menengah/SMK yang terserap di dunia kerja dan industry 11. Proporsi usia penduduk usia 15 tahun keatas yang berkualitas Pendidikan tinggi 12. Tingkat kemiskinan 13. Cakupan kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 14. Presentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal 15. Rasio PDRB ADHK sektor industri pengolahan 16. Indeks ketimpangan gender

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sulawesi Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Indikator Kinerja Provinsi Sulawesi Tengah	Indikator Kinerja Kabupaten Parigi Moutong
				18. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat fasilitas dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan 19. Indeks Pembangunan olahraga	17. Tingkat pengangguran terbuka 18. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan 19. Indeks Daya Saing 20. Indeks pembangunan kebudayaan 21. Indeks pembangunan kualitas keluarga
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Berani Makmur • Berani Harmoni 	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	1. Kontribusi PDRB industri pengolahan 2. Koefisien variasi harga antar wilayah Tingkat provinsi 3. PMTB 4. Ekpor barang dan jasa	1. Koefisien variasi harga antar wilayah 2. PMTB 3. Ekpor barang dan jasa 4. Indeks desa 5. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan 6. Rasio PDRB ADHK sektor industri pengolahan 7. Rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHK

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sulawesi Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Indikator Kinerja Provinsi Sulawesi Tengah	Indikator Kinerja Kabupaten Parigi Moutong
					8. Pengembangan Pariwisata 9. Pendalaman/intermediasi sektor keuangan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Berani Makmur • Berani Sejahtera 	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	1. Proporsi PDRB Ekonomi kreatif terhadap PDRB ADHB 2. Cakupan kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 3. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal 4. Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan 5. Persentase desa mandiri (indeks Desa)	1. Indeks desa 2. Proporsi kontribusi PDBR wilayah Kab/Kota 3. Rumah tangga dengan akses rumah layak huni
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi , serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	<ul style="list-style-type: none"> • Berani Berintegritas • Berani Berkah 	Melaksanakan Tata kolola Pemerintahan Yang Berkualitas	1. Indeks kualitas kebijakan 2. Indeks Integritas nasional 3. Indeks Reformasi Birokrasi 4. Retur non Aset (ROA) BUMD 5. Rasio pajak daerah terhadap PDRB	1. Indeks Integritas nasional 2. Indeks pelayanan public 3. Indeks SPBE 4. Indeks Inovasi Daerah 5. Indeks Pembangunan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah Sulawesi Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Indikator Kinerja Provinsi Sulawesi Tengah	Indikator Kinerja Kabupaten Parigi Moutong
	judi, dan penyulundupan			6. Tingkat Inflasi	Teknologi Informasi dan Komunikasi 6. Indeks Reformasi Birokrasi 7. Survey Penilaian Integritas 8. Nilai maturitas sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) 9. Indeks perencanaan Pembangunan daerah
8	Memperkuat penyealaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	• Berani Harmoni • Berani Berkah • Berani Makmur	Memperkuat Ketahanan Ekologi Berbasis Sosial Budaya	1. Indeks pembangunan kebudayaan 2. Indeks kerukunan umat beragama 3. Indeks resiko bencana	1. Indeks resiko bencana 2. Persentase luas genangan yang tertangani 3. Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah 4. Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kabupaten Parigi Moutong. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029.

Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah dalam RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dimana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 di input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui <http://sipd.kemendagri.go.id>. Selanjutnya, pagu indikatif rencana program /kegiatan/subkegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 Cetakan SIPD Tahun 2026 (Buku II)

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan secara kuantitatif maupun kualitatif dalam pencapaian target kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja daerah yang dilaksanakan berdasarkan pada aspek spesifik, obyektif, berkesinambungan, dan terukur.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 disajikan pada Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi	Target	KET
			2024	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tingkat Kemiskinan	%	14,20	13,11	
2.	Tingkat Penggaguran Terbuka	%	2,10	1,77	
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,58	5,13	
4.	Indeks Desa	Angka	0,707	0,717	
5.	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	56,72	57,30	
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	67,21	72,34	
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,81	77,32	
8.	Indeks Resiko Bencana	Nilai	93,53	90,39	
9.	Indeks Reformasi Birokrasi	Peringkat	B	B	

Selanjutnya, berdasarkan hasil Rakortekrenbang tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, telah disepakati sejumlah indikator makro pembangunan sebagai bagian dari proses transisi dan penyelarasan terhadap rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah. Adapun indikator kinerja daerah tersebut disajikan pada tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026

Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyele.nggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target	
		Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
Indeks Ketahanan Pangan	Angka	77,5	80,00
Prevalensi Kecukupan Komsumsi Pangan	%	9,02	8,59
Akses Rumah Tangga Terhadap Komsumsi Air Minum	%	95,13	95,36

Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target	
		Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Lingkungan Hidup Daerah	Angka	77,14	77,32
Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman	%	3,07	6,07
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Ton /Hari	29,11	34,11
Proporsi Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	42,82	42,83
Penurunan intensitas emisi GRK	Ton CO ₂ e	504.005,97	564.306,84
Indeks Risiko Bencana	Nilai	91,96	90,39
Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,68	0,69
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,69	1,05
Kepadatan penduduk	Jiwa/km ²	79,08	79,91
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,01	5,13
Tingkat Kemiskinan	%	13,9 - 14,05	13,11
PDRB per kapita	Rp juta	56,47-58,7	62,11
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,89	1,77
Indeks Gini	Angka	0,240	0,239
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,50	70 - 71
Usia Harapan Hidup	Tahun	64,75	64,90
Indeks Keluarga Sehat	%	0,291	0,391
Prevalensi Stunting	%	21,96	20,08
Rata-rata Lama Sekolah	%	8,19	8,34
Harapan Lama Sekolah	%	12,70	12,76
Angka Literasi/Numerasi :			
-Angka Literasi SD/MI	%	50,61	53,11
-Angka Literasi SMP/MTS	%	62,36	63,46
-Angka Numerasi SD/MI	%	47,28	50,18
-Angka Numerasi SMP/MTS	%	58,20	59,70
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tahun	45,25	50,15
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	46,03	52,92
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,66-77,81	77,43-78,63
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	23	24
Indeks Perlindungan Anak	Angka	76,00	76,54
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	59,35	60,51
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,518	0,512
Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,51	93,70
Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	-	-
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
Angka Ketergantungan	Angka	55,8	55,3
Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	5,55	6,48
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,73	0,87
Ratio Kewirausahaan	%	NA	1,1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,69	77,83
Indeks Inovasi Daerah	Angka	51,50	55,13
Indeks Ekonomi Hijau	Angka	62,86	63,97
Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka	54,07	55,55
Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur	Angka	57,30	58,05
Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Rumah tangga dengan akses hunian layak	%	81,78	81,09
Persentase Desa Mandiri	%	20,50	20,50
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,12	0,14
Tingkat Inflasi	%	4	3,5
Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	3,32	3,35
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Indeks Sistem Pemerintahan Baerbasis Eletronik	Angka	3,2	1,6
Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,75	3,83
Indeks Integritas Nasional	Angka	70,58	71,76
Persentase Penegakan Perda	%	100	100
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	100	100

Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target	
		Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,50	3,59
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)			
PENDIDIKAN			
1.Skor Literasi :			
- SD/MI	%	50,61	53,11
- SMP/MTS	%	62,36	63,46
2.Numerasi :			
- SD/MI	%	47,28	50,18
- SMP/MTS	%	58,20	59,70
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.70	12.76
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.19	8.34
KESEHATAN			
Umur Harapan Hidup	Tahun	64.75	64.90
Indeks Keluarga Sehat	%	0,391	0,491
Jumlah Kematian Ibu	Orang	6	5
Jumlah Kematian Belita	Orang	60	54
Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	%	99,50	83,53
Cakupan Penerima Pemeriksa Kesehatan Gratis	%	95	95
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	80,00	85,00
Angka Keberhasilan Pengobatan TB	%	100	100
Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	40	45
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,27	2,24
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	38,43	39,47
Persentase Rumah Tangga Terakses Air Bersih	%	95,13	95,36
Persentase Rumah Tangga Terakses Sanitasi	%	92,64	92,66
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Persentase Rumah Tangga dan Akses Hunian, Layak, Terjangkau, dan berkelanjutan	%	81,78	81,09
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	100	100
SOSIAL			
Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	51	52
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kabupaten	%	60,42	60,85
Angka Kemiskinan	%	13,9 - 14,05	13,11
TENAGA KERJA			
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.	%	51,190	51,688
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Indeks Pembangunan Gender	%	93,51	93,70
Indeks Ketimpangan Gender	%	0,460	0,449
Indeks Perlindungan Anak	%	76,00	76,54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,36	60,89
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	%	56,25	75,38
PANGAN			
Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	77,5	80,00
PERTANAHAN			
LINGKUNGAN HIDUP			
Indeks Kualitas Lingkungan hidup	%	77,14	77,32
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	%	84,69-	85,89
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Indeks Desa	Nilai	0,715	0,717
Persentase Desa Mandiri	%	20,50	20,50
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Indeks Pembangunan Keluarga	%	59,35	60,51

Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target	
		Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	%	60,3	61,7
Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi Alat /Cara KB Modern	%	85,75	86,59
Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	%	40,85	38,9
Persentase Kehamilinan tidak di inginkan	%	11,19	10,08
PERHUBUNGAN			
Rasio Konektivitas	%	18,33	18,57
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	%	3,20	3,60
KOPERASI DAN UMKM			
Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	-	-
Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level Kabupaten	%	82,4	82,43
PENANAMAN MODAL			
Persentase peningkatan investasi	%	20	20
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Indeks Pembangunan Pemuda	%	-	-
Indeks Partisipasi Olahraga	%	-	-
STATISTIK			
Indeks Pembangunan Statistik	%	2,15	2,6
PERSANDIAN			
Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	%	3,2	1,6
KEBUDAYAAN			
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	23	24
PERPUSTAKAAN			
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	%	45,25	50,45
KEARSIPAN			
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	%	10	15
KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	-	-
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Nilai	-	-
PARIWISATA			
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,73	0,87
PERTANIAN			
Nilai Tukar Petani	%	107,46	107,68
PERDAGANGAN			
- Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB			
- ADHB	%	8,81	9,06
- ADHK	%	6,68	6,78
PERINDUSTRIAN			
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	%	-	-
Rasio PDRB ADHK industri pengolahan	%	5,55	6,48
Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level Kabupaten	%	82,4	82,43
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	2,44	-
TRANSMIGRASI			
Pendapatan Per Kapita di wilayah Transmigrasi	Rupiah	51.060.000	55.184.022
SEKRETARIAT DAERAH			
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B
Indeks Pelayanan Publik	%	3,75	3,83
SEKRETARIAT DPRD			
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	%	100	100
PERENCANAAN			
Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100
Persentase Konsistensi Penjabaran arah Kebijakan RPJMD dalam RKPD	%	100	100
KEUANGAN			

Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Target	
		Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP
KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT			
Persentase ASN yang ditingkatkan kopetensinya	%	20	20
Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	20	20
Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	%	20	20
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Indeks inovasi daerah	Nilai	51,50	55,13
PENGAWASAN			
Nilai Muturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Nilai	3	3
KEWILAYAHAN			
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	-	-

BAB VII

PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman untuk penganggaran tahunan yaitu berupa pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Parigi Moutong Tahun digunakan sebagai pedoman menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran, dan disiplin serta komitmen para pelaku pembangunan dalam mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlu kaidah-kaidah dan prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Kepala Perangkat Daerah agar segera menindaklanjuti dengan menyesuaikan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026
4. Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program-program RKPD ini dengan sebaik-baiknya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPTELITBANGDA) berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap penjabaran dan sinergitas serta capaian indikator ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan serta

diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Parigi Moutong secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi masalah pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Parigi Moutong.